

# LAPORAN KEUANGAN AUDITED KEMENTERIAN KEUANGAN

## BA 015 TA 2010



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Gedung Juanda I

Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta 10710

[www.depkeu.go.id](http://www.depkeu.go.id)

## **BAGIAN ANGGARAN 015**



**LAPORAN KEUANGAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2010  
*AUDITED***

*Jalan Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat*

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2010, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Kementerian Keuangan adalah salah satu Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun Anggaran (TA) 2010 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja Kementerian Keuangan. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2010 adalah sebesar **Rp723.531.430.596.043,00** atau **97,26** persen dari estimasi pendapatan TA 2010 sebesar **Rp743.914.748.104.240,00**. Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar **Rp14.276.465.681.945,00** atau **92,75** persen dari pagu yang dianggarkan dalam DIPA TA 2010 sebesar **Rp15.391.864.198.000,00**.
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Kementerian Keuangan per 31 Desember 2010. Adapun nilai Aset Kementerian Keuangan per 31 Desember 2010 adalah sebesar **Rp109.432.138.938.078,00** dan Kewajiban sebesar **Rp761.816.067.975,00**, sehingga Ekuitas Dana (kekayaan bersih) Kementerian Keuangan per 31 Desember 2010 adalah sebesar **Rp108.670.322.870.103,00**.
3. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.
4. Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2010 ini berstatus sebagai laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK-RI (*Audited*).

Kami menyadari bahwa laporan keuangan tahunan ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan laporan keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Jakarta, Mei 2011  
Sekretaris Jenderal,



Mulia P. Nasution  
NIP 195108271976031001

# SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

## KEMENTERIAN KEUANGAN

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan serta untuk mempermudah penyajian laporan keuangan, maka kami sampaikan sistematika penyajian laporan keuangan sebagai berikut:

### **Sistematika penyajian Laporan Keuangan Kementerian Keuangan**

#### **1. Sampul Luar**

Merupakan sampul luar dari laporan keuangan, memuat informasi mengenai Kementerian Negara/Lembaga dan periode penyampaian laporan keuangan.

#### **2. Sampul Dalam**

Merupakan sampul dalam dari laporan keuangan, memuat informasi mengenai Kementerian Negara/Lembaga dan periode penyampaian laporan keuangan.

#### **3. Kata Pengantar**

Merupakan pengantar dari laporan keuangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memberikan gambaran ringkas mengenai laporan keuangan yang disampaikan.

#### **4. Daftar Isi**

Merupakan daftar yang memuat isi laporan beserta nomor halamannya.

#### **5. Daftar Tabel**

Merupakan daftar tabel yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar tersebut memuat nama tabel, nomor tabel dan nomor halamannya.

#### **6. Daftar Grafik**

Merupakan daftar grafik yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar tersebut memuat nama grafik, nomor dan nomor halamannya.

#### **7. Daftar Lampiran**

Merupakan daftar lampiran yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar tersebut memuat nama lampiran, nomor lampiran dan nomor halamannya.

#### **8. Daftar Singkatan**

Merupakan daftar yang memuat singkatan-singkatan yang digunakan dalam laporan keuangan.

#### **9. Pernyataan Tanggung Jawab**

Merupakan pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran terhadap penggunaan anggaran pada lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Pernyataan Tanggung Jawab ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan

Lembaga setiap periode penyampaian laporan keuangan. Pernyataan tanggung jawab paling tidak memuat pernyataan sebagai berikut :

- pernyataan bertanggungjawab terhadap penyusunan dan isi laporan keuangan yang disampaikan;
- pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAP dan;
- pernyataan laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.

**10. Pernyataan Telah Direviu**

Merupakan pernyataan dari aparat pengawasan intern kementerian negara/lembaga atas hasil reviu terhadap LKKL sebelum dipertanggungjawabkan oleh menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan.

**11. Ringkasan**

Merupakan gambaran ringkas mengenai kondisi laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan. Memuat gambaran ringkas mengenai anggaran, realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

**12. Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Laporan Realisasi Anggaran dihasilkan berdasarkan cetakan dari SAI, untuk laporan keuangan periode semesteran, laporan yang disampaikan adalah laporan Semester I. Untuk periode tahunan laporan yang disampaikan adalah laporan komparatif dengan membandingkan anggaran dan realisasi Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) dengan tahun anggaran berjalan.

**13. Neraca**

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal tertentu.

Neraca dihasilkan melalui SAI. Neraca Semester I menyajikan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas per 30 Juni TA berjalan. Untuk Neraca Tahunan menyajikan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember TA berjalan. Neraca disajikan secara komparatif dengan posisi keuangan pada TAYL.

**14. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan pendapatan dan belanja selama tahun anggaran. Laporan yang disampaikan dapat dilihat pada lembar muka laporan keuangan. Untuk laporan keuangan periode semesteran, laporan yang disampaikan adalah laporan Semester I. Untuk periode tahunan, laporan yang disampaikan adalah laporan komparatif, dengan membandingkan anggaran dan realisasi TAYL dengan tahun anggaran berjalan.

**15. Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) mengungkapkan penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

CaLK merupakan unsur pokok, wajib, dan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

**16. Lampiran Laporan Keuangan**

- a. Laporan-laporan pendukung sebagai lampiran
  - i) LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan
  - ii) LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja
  - iii) Neraca Percobaan
- b. Laporan barang pengguna
  - i) Laporan Barang Pengguna Tahunan
    - Laporan Barang Pengguna Tahunan Intrakomptabel
    - Laporan Barang Pengguna Tahunan Ekstrakomptabel
    - Laporan Barang Pengguna Tahunan Gabungan
  - ii) Laporan Posisi BMN di Neraca
- c. Laporan Keuangan BLU:
  - i) Pusat Investasi Pemerintah (PIP)
  - ii) Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)
- d. Laporan Keuangan Lembaga Non Struktural :
  - Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP)
- e. Laporan Rekening Pemerintah
- f. Tindak Lanjut Atas Temuan BPK

**17. Lampiran lainnya sebagai pendukung Catatan**

- a. Berita Acara Rekonsiliasi LRA
- b. Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap
- c. Laporan Barang Pengguna Barang Persediaan
- d. Laporan Barang Tegahan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- e. Laporan Barang Sitaan Direktorat Jenderal Pajak

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Sistematika Penyajian Laporan Keuangan	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Grafik	xi
Indeks Catatan atas Laporan Keuangan	xii
Daftar Lampiran	xv
Daftar Singkatan	xvi
Pernyataan Tanggung Jawab	xviii
Pernyataan Telah Direviu	xix
I. Ringkasan	1
II. Laporan Realisasi Anggaran ( LRAKT perbandingan 2010 dan 2009)	3
III. Neraca (NSAIKPT perbandingan 2010 dan 2009)	4
IV. Catatan atas Laporan Keuangan	5
A. Penjelasan Umum	5
A.1. Dasar Hukum	5
A.2. Kebijakan Teknis Kementerian Keuangan	8
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	17
A.4. Kebijakan Akuntansi	19
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	26
B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran	26
B.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran	26
B.3. Catatan Penting Lainnya	61
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	68
C.1. Penjelasan Umum Neraca	68
C.2. Penjelasan Per Pos Neraca	69
C.3. Catatan Penting/Pengungkapan Lainnya	127
D. Pengungkapan Penting Lainnya	142
D.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK	142
D.2. Rekening Pemerintah	142
D.3. Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual	143
D.4. Barang Tegahan	144
D.5. Barang Sitaan	144

Laporan-laporan Pendukung sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan

Nomor PER- 65 /PB/2010

- LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan
- LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja
- Neraca Percobaan

Laporan Barang Pengguna

- Laporan Barang Pengguna Tahunan
- Laporan Posisi BMN di Neraca

---

Lampiran-Lampiran Lain :

1. Laporan Keuangan BLU:
  - i) Pusat Investasi Pemerintah (PIP)
  - ii) Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)
2. Laporan Keuangan Lembaga Non Struktural :  
Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP)
3. Laporan Rekening Pemerintah
4. Tindak Lanjut Atas Temuan BPK
5. Berita Acara Rekonsiliasi LRA
6. Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap
7. Laporan Barang Pengguna Barang Persediaan
8. Laporan Barang Tegahan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
9. Daftar Barang Sitaan Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)

---

**DAFTAR TABEL**

	Halaman	
Tabel 1	Rekapitulasi Jumlah Satker menurut Eselon I	17
Tabel 2	Rekapitulasi Jumlah Satker menurut Eselon I	19
Tabel 3	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2010	26
Tabel 4	Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2010	26
Tabel 5	Perbandingan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2010 dan 2009	27
Tabel 6	Realisasi Pendapatan Per Unit Eselon I TA 2010	28
Tabel 7	Perbandingan Realisasi Pendapatan Per Unit Eselon I TA 2010 dan 2009	28
Tabel 8	Realisasi Pendapatan Per Jenis Penerimaan TA 2010	29
Tabel 9	Perbandingan Realisasi Pendapatan Per Jenis Penerimaan TA 2010 dan 2009	29
Tabel 10	Realisasi Penerimaan Perpajakan Per Jenis Penerimaan TA 2010	30
Tabel 11	Perbandingan Realisasi Penerimaan Perpajakan Per Jenis Penerimaan	30
Tabel 12	Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2010	33
Tabel 13	Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2010 dan 2009	34
Tabel 14	Realisasi Pengembalian Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2010 dan 2009	37
Tabel 15	Realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional TA 2010	38
Tabel 16	Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	38
Tabel 17	Perbandingan Realisasi Pengembalian Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional TA 2010 dan 2009	40
Tabel 18	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2010	40
Tabel 19	Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2010 dan 2009	41
Tabel 20	Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2010	42
Tabel 21	Perbandingan Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2010 dan 2009	43
Tabel 22	Perbandingan Realisasi Pengembalian Pendapatan PNBP Lainnya TA 2010 dan 2009	43
Tabel 23	Realisasi Pendapatan BLU TA 2010	44
Tabel 24	Perbandingan Realisasi Pendapatan BLU TA 2010 dan 2009	44
Tabel 25	Realisasi Pendapatan BLU TA 2010 Berdasarkan Satuan Kerja	45
Tabel 26	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana TA 2010	47
Tabel 27	Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana TA 2010 dan 2009	48
Tabel 28	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Unit Eselon I TA 2010	48
Tabel 29	Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Unit Eselon I TA 2010 dan 2009	49
Tabel 30	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Fungsi TA 2010	49
Tabel 31	Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Fungsi TA 2010 dan 2009	50
Tabel 32	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2010	51
Tabel 33	Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2010 dan TA 2009	52
Tabel 34	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2010	53
Tabel 35	Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2010 dan 2009	54
Tabel 36	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Per Eselon I TA 2010	54
Tabel 37	Perbandingan Belanja Pegawai TA 2010 dan TA 2009	55
Tabel 38	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Barang TA 2010	55
Tabel 39	Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2010 dan 2009	56
Tabel 40	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Barang Per Eselon I TA 2010	57
Tabel 41	Perbandingan Belanja Barang Per Eselon I TA 2010 dan TA 2009	57
Tabel 42	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Modal TA 2010	58
Tabel 43	Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2010 dan 2009	59
Tabel 44	Realisasi Belanja Modal Per Eselon I TA 2010	60
Tabel 45	Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2010 dan 2009	60
Tabel 46	Realisasi Pembayaran Kewajiban Utang TA 2010 dan 2009	61
Tabel 47	Komposisi Neraca Per 31 Desember 2010 dan 2009	68
Tabel 48	Kas di Bendahara Pengeluaran Per Eselon I Per 31 Desember 2010 dan 2009	69
Tabel 50	Penyetoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2010	70

Tabel 51	Kas di Bendahara Penerimaan Per Eselon I Per 31 Desember 2010 dan 2009	70
Tabel 52	Penyetoran Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2009	71
Tabel 53	Penyetoran Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2010	71
Tabel 54	Kas Lainnya dan Setara Kas Per Eselon I Per 31 Desember 2010 dan 2009	72
Tabel 55	Penyetoran Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Ke Kas Negara Per 31 Desember 2009	72
Tabel 56	Pembayaran Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Kepada Pihak Lain Per 31 Desember 2009	73
Tabel 57	Penyetoran Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Ke Kas Negara Per 31 Desember 2010	73
Tabel 58	Pembayaran Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Kepada Pihak Lain Per 31 Desember 2010	73
Tabel 59	Kas pada Badan Layanan Umum Per Eselon I Per 31 Desember 2010 dan 2009	74
Tabel 60	Piutang Pajak Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2010 dan 2009	75
Tabel 61	Rincian Piutang Pajak Per Jenis Pajak Per 31 Desember 2010 dan 2009	76
Tabel 62	Rincian Piutang Pajak Berdasarkan Umur Piutang Per 31 Desember 2010	76
Tabel 63	Rincian Piutang Pajak Per Jenis Pajak Per 31 Desember 2010	79
Tabel 64	Rincian Piutang Pajak Berdasarkan Umur Piutang Per 31 Desember 2010	79
Tabel 65	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2010	80
Tabel 66	Piutang PNBP Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2010 dan 2009	81
Tabel 67	Rincian Piutang Bukan Pajak di BPPK Per 31 Desember 2010	85
Tabel 68	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Per Eselon I Per 31 Desember 2010 dan 2009	86
Tabel 69	Uang Muka Belanja Per Eselon I Per 31 Desember 2010 dan 2009	86
Tabel 70	Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Per Eselon I Per 31 Desember 2010 dan 2009	87
Tabel 71	Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU Per Eselon I Per 31 Desember 2010 dan 2009	87
Tabel 72	Rincian Piutang Kekurangan Jasa Giro Per 31 Desember 2010	88
Tabel 73	Rincian Piutang Dari Kegiatan Non Operasional BLU Per 31 Desember 2010	88
Tabel 74	Persediaan Per Eselon I Per 31 Desember 2010 dan 2009	89
Tabel 75	Persediaan Per Jenis Per 31 Desember 2010	89
Tabel 76	Persediaan BLU Per Eselon I Per 31 Desember 2010 dan 2009	90
Tabel 77	Investasi Jangka Panjang Per Eselon I Per 31 Desember 2010 dan 2009	90
Tabel 78	Perbandingan Komposisi Aset Tetap Per Jenis Aset Per 31 Desember 2010 dan 2009	92
Tabel 79	Mutasi/Perubahan Aset Tetap	94
Tabel 80	Rincian Mutasi Aset terkait Belanja Modal Per 31 Desember 2010	95
Tabel 81	Perbandingan Saldo Awal Aset Tetap Neraca dan SIMAK BMN per 31 Desember 2009	96
Tabel 82	Perbandingan Posisi Aset Tetap Neraca dan SIMAK BMN per 31 Desember 2010	98
Tabel 83	Tanah Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2010 dan 2009	99
Tabel 84	Mutasi/Perubahan Tanah	100
Tabel 85	Peralatan dan Mesin Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2010 dan 2009	101
Tabel 86	Mutasi / Perubahan Peralatan dan Mesin	102
Tabel 87	Gedung dan Bangunan Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2010 dan 2009	103
Tabel 88	Mutasi/Perubahan Gedung dan Bangunan	103
Tabel 89	Jalan dan Jembatan Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2010 dan 2009	104
Tabel 90	Mutasi/Perubahan Jalan dan Jembatan	104
Tabel 91	Irigasi Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2010 dan 2009	105
Tabel 92	Mutasi/Perubahan Irigasi	105
Tabel 93	Jaringan Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2010 dan 2009	106
Tabel 94	Mutasi/Perubahan Jaringan	106
Tabel 95	Aset Tetap Lainnya Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2010 dan 2009	107
Tabel 96	Mutasi/Perubahan Aset Tetap Lainnya	107

Tabel 97	Konstruksi Dalam Penggerjaan Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2010 dan 2009	108
Tabel 98	Mutasi/Perubahan Konstruksi Dalam Penggerjaan	108
Tabel 99	Tanah BLU Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2010 dan 2009	108
Tabel 100	Mutasi/Perubahan Tanah BLU	109
Tabel 101	Peralatan dan Mesin BLU Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2010 dan 2009	109
Tabel 102	Mutasi/Perubahan Peralatan dan Mesin BLU	110
Tabel 103	Gedung dan Bangunan BLU Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2010 dan 2009	110
Tabel 104	Mutasi/Perubahan Gedung dan Bangunan BLU	110
Tabel 105	Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2010 dan 2009	111
Tabel 106	Mutasi/Perubahan Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU	111
Tabel 107	Aset Tetap Lainnya BLU Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2010 dan 2009	111
Tabel 108	Mutasi/Perubahan Aset Tetap Lainnya BLU	112
Tabel 109	Konstruksi Dalam Penggerjaan BLU Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2010 dan 2009	112
Tabel 110	Mutasi/Perubahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Penggerjaan BLU	112
Tabel 111	Komposisi Aset Lainnya Per Jenis Aset Per 31 Desember 2010 dan 2009	113
Tabel 112	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2010 dan 2009	114
Tabel 113	Aset Tak Berwujud Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2010 dan 2009	115
Tabel 114	Mutasi/Perubahan Aset Tak Berwujud	115
Tabel 115	Aset Tak Berwujud BLU Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2010 dan 2009	116
Tabel 116	Mutasi/Perubahan Aset Tak Berwujud BLU	116
Tabel 117	Aset Tak Berwujud BLU Per Jenis	116
Tabel 118	Aset Lain-lain Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2010 dan 2009	117
Tabel 119	Perbedaan Saldo Akhir Akun Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan Pada Neraca SAK dengan Laporan Posisi BMN di Neraca	117
Tabel 120	Aset Lain-lain BLU Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2010 dan 2009	118
Tabel 121	Mutasi/Perubahan Aset Lain-lain BLU STAN	119
Tabel 122	Rincian Dana Kelolaan BLU	119
Tabel 123	Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2010 dan 2009	120
Tabel 124	Utang Kepada Pihak Ketiga Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2010 dan 2009	120
Tabel 125	Utang Kepada Pihak Ketiga Per Akun Per 31 Desember 2010	121
Tabel 126	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2010 dan 2009	121
Tabel 127	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Per Akun Per 31 Desember 2010	122
Tabel 128	Pendapatan Diterima di Muka Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2010 dan 2009	122
Tabel 129	Uang Muka Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2010 dan 2009	123
Tabel 130	Uang Muka dari KPPN Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2010 dan 2009	123
Tabel 131	Pendapatan Yang Ditangguhkan Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2010 dan 2009	124
Tabel 132	Rincian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya Per 31 Desember 2010 dan 2009	124
Tabel 133	Rincian Ekuitas Dana Lancar Per 31 Desember 2010 dan 2009	125
Tabel 134	Rekening Pemerintah Lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2010 dan 2009	142
Tabel 135	Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2010	143

---

**DAFTAR GRAFIK**

	Halaman	
Grafik 1	Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2010	27
Grafik 2	Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2010	27
Grafik 3	Komposisi Realisasi Penerimaan Perpajakan Per Jenis Penerimaan TA 2010	31
Grafik 4	Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2010	33
Grafik 5	Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2010 dan 2009	34
Grafik 6	Komposisi Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2010	35
Grafik 7	Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2010 dan 2009	41
Grafik 8	Komposisi Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2010	42
Grafik 9	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Kementerian Keuangan TA 2010 dan 2009	46
Grafik 10	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana TA 2010	47
Grafik 11	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Fungsi TA 2010	50
Grafik 12	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2010	51
Grafik 13	Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2010	52
Grafik 14	Komposisi Realisasi Belanja Pegawai TA 2010	53
Grafik 15	Komposisi Realisasi Belanja Barang TA 2010	56
Grafik 16	Komposisi Realisasi Belanja Modal TA 2010	59
Grafik 17	Komposisi Neraca Per 31 Desember 2010 dan 2009	68
Grafik 18	Komposisi Piutang Pajak Per Jenis Pajak Per 31 Desember 2010	77
Grafik 19	Komposisi Aset Tetap Per Jenis Aset Per 31 Desember 2010	93
Grafik 20	Perkembangan Aset Tetap per Jenis Aset Tetap	93
Grafik 21	Komposisi Aset Lainnya Per Jenis Aset Per 31 Desember 2010	113

## INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Halaman

### LAPORAN REALISASI APBN

#### Pendapatan Negara dan Hibah

Catatan	B.	Penjelasan atas pos-pos laporan realisasi anggaran	
Catatan	B.1.	Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran (Netto)	
Catatan	B.2.	Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran (Bruto)	
Catatan	B.2.1	Pendapatan Negara dan Hibah	26
Catatan	B.2.1.1	Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Per Unit Eselon I	28
Catatan	B.2.1.2	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Per Jenis Penerimaan	28
Catatan	B.2.1.2.1	Penerimaan Perpajakan	29
Catatan	B.2.1.2.1.1	Pendapatan Pajak Dalam Negeri	32
Catatan	B.2.1.2.1.2	Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	38
Catatan	B.2.1.2.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	40
Catatan	B.2.1.2.2.1	Pendapatan PNBP Lainnya	42
Catatan	B.2.1.2.2.2	Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	43
Catatan	B.2.1.2.3	Penerimaan Hibah	45

#### Belanja Negara

Catatan	B.2.2	Belanja Negara	46
Catatan	B.2.2.1	Belanja Kementerian Keuangan Menurut Sumber Dana	47
Catatan	B.2.2.2	Belanja Kementerian Keuangan Menurut Unit Eselon I	48
Catatan	B.2.2.3	Belanja Kementerian Keuangan Menurut Fungsi	49
Catatan	B.2.2.4	Belanja Kementerian Keuangan Menurut Jenis Belanja	50
Catatan	B.2.2.4.1	Belanja Pegawai	52
Catatan	B.2.2.4.2	Belanja Barang	55
Catatan	B.2.2.4.3	Belanja Modal	58
Catatan	B.2.2.4.4	Pembayaran Kewajiban Utang	61
Catatan	B.3	Catatan Penting Lainnya	61

### NERACA

#### ASET

#### Aset Lancar

Catatan	C	Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	68
Catatan	C.1	Penjelasan Umum Neraca	68
Catatan	C.2	Penjelasan Per Pos Neraca	69
Catatan	C.2.1	Aset Lancar	69
Catatan	C.2.1.1	Kas di Bendahara Pengeluaran	69
Catatan	C.2.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	70
Catatan	C.2.1.3	Kas Lainnya dan setara Kas	71
Catatan	C.2.1.4	Kas pada BLU	74
Catatan	C.2.1.5	Piutang Pajak	75

Catatan	C.2.1.6	Piutang Bukan Pajak	81
Catatan	C.2.1.7	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	85
Catatan	C.2.1.8	Uang muka belanja	86
Catatan	C.2.1.9	Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	87
Catatan	C.2.1.10	Piutang dari kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	87
Catatan	C.2.1.11	Persediaan	88
Catatan	C.2.1.12	Persediaan Badan Layanan Umum	89

#### **Investasi Jangka Panjang**

Catatan	C.2.2	Investasi Jangka Panjang	90
Catatan	C.2.2.1	Investasi Non Permanen BLU	90
Catatan	C.2.2.1.1	Investasi BLU Pengelola Dana Investasi	90

#### **Aset Tetap**

Catatan	C.2.3	Aset Tetap	92
Catatan	C.2.3.1	Tanah	99
Catatan	C.2.3.2	Peralatan dan Mesin	101
Catatan	C.2.3.3	Gedung dan Bangunan	102
Catatan	C.2.3.4	Jalan dan Jembatan	104
Catatan	C.2.3.5	Irigasi	105
Catatan	C.2.3.6	Jaringan	106
Catatan	C.2.3.7	Aset Tetap Lainnya	107
Catatan	C.2.3.8	Konstruksi dalam Pengerjaan	108
Catatan	C.2.3.9	Tanah BLU	108
Catatan	C.2.3.10	Peralatan dan Mesin BLU	109
Catatan	C.2.3.11	Gedung dan Bangunan BLU	110
Catatan	C.2.3.12	Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU	111
Catatan	C.2.3.13	Aset Tetap Lainnya BLU	111
Catatan	C.2.3.14	Konstruksi dalam Pengerjaan BLU	112

#### **Aset Lainnya**

Catatan	C.2.4	Aset Lainnya	113
Catatan	C.2.4.1	Tuntutan Perpendidahaaraan/Tuntutan Ganti Rugi	114
Catatan	C.2.4.2	Aset Tak Berwujud	114
Catatan	C.2.4.3	Aset Tak Berwujud BLU	115
Catatan	C.2.4.4	Aset Lain-Lain	116
Catatan	C.2.4.5	Aset Lain-Lain BLU	118
Catatan	C.2.4.6	Dana Kelolaan BLU	119

#### **KEWAJIBAN**

##### **Kewajiban Jangka Pendek**

Catatan	C.2.5	Kewajiban Jangka Pendek	119
Catatan	C.2.5.1	Utang kepada Pihak Ketiga	120
Catatan	C.2.5.2	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	121

Catatan	C.2.5.3	Pendapatan Diterima Dimuka	122
Catatan	C.2.5.4	Uang Muka	123
Catatan	C.2.5.5	Uang Muka dari KPPN	123
Catatan	C.2.5.6	Pendapatan yang Ditangguhkan	124

#### **Kewajiban Jangka Panjang**

Catatan	C.2.6	Kewajiban Jangka Panjang	124
Catatan	C.2.6.1	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	124

#### **EKUITAS**

##### **Ekuitas Dana Lancar**

Catatan	C.2.7	Ekuitas Dana Lancar	125
Catatan	C.2.7.1	Cadangan Piutang	125
Catatan	C.2.7.2	Cadangan Persediaan	125
Catatan	C.2.7.3	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	125
Catatan	C.2.7.4	Dana Lancar BLU	126
Catatan	C.2.7.5	Barang/Jasa yang harus diterima	126
Catatan	C.2.7.6	Barang/Jasa yang harus diserahkan	126

##### **Ekuitas Dana Investasi**

Catatan	C.2.8	Ekuitas Dana Investasi	126
Catatan	C.2.8.1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	126
Catatan	C.2.8.2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	126
Catatan	C.2.8.3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	127
Catatan	C.2.8.4	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	127
Catatan	C.3	Catatan Penting Lainnya	127

#### **Pengungkapan Penting Lainnya**

Catatan	D	Pengungkapan Penting Lainnya	142
Catatan	D.1	Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK	142
Catatan	D.2	Rekening Pemerintah	142
Catatan	D.3	Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual	143
Catatan	D.4	Barang Tegahan	144
Catatan	D.5	Barang Sitaan	144

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan	
Lampiran 2	LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja	
Lampiran 3	Berita Acara Rekonsiliasi LRA	
Lampiran 4	Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Perpjakan DJP	
Lampiran 5	Pungutan Ekspor/Bea Keluar	
Lampiran 6	Informasi Pendapatan dan Belanja Akrual	
Lampiran 7	Neraca Percobaan	
Lampiran 8	Piutang Pajak DJP	
Lampiran 9	Berita Acara Rekonsiliasi Piutang Pajak DJP	
Lampiran 10	BAR Rekon SP3DRI antara DJP dengan DJBC	
Lampiran 11	Piutang Bukan Pajak Bapepam-LK	
Lampiran 12	Daftar Tagihan TGR	
Lampiran 13	Laporan Barang Pengguna Kementerian Keuangan	
Lampiran 14	Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap	
Lampiran 15	Daftar Barang Sitaan Kementerian Keuangan	
Lampiran 16	Laporan Rekening Pemerintah	
Lampiran 17	Temuan dan Tindak Lanjut Atas Temuan BPK	
Lampiran 18	Peraturan Mengenai Kebijakan BAPEPAM-LK	
Lampiran 19	Laporan Keuangan BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	
Lampiran 20	Laporan Keuangan BLU Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)	
Lampiran 21	Laporan Keuangan Lembaga Non Struktural : Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP)	

---

## DAFTAR SINGKATAN

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
BLU	:	Badan Layanan Umum
BMDTP	:	Bea masuk Ditanggung Pemerintah
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BUN	:	Bendahara Umum Negara
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
MA	:	Mata Anggaran Penerimaan / Pengeluaran
MPN	:	Modul Penerimaan Negara
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
SIMAK-BMN	:	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SAI	:	Sistem Akuntansi Instansi
SAK	:	Sistem Akuntansi Keuangan
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SKPA	:	Surat Kuasa Pengguna Anggaran
UP	:	Uang Persediaan
TA	:	Tahun Anggaran
TAB	:	Tahun Anggaran Berjalan
TAYL	:	Tahun Anggaran Yang Lalu
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
TPA	:	Tagihan Penjualan Angsuran
UP	:	Uang Persediaan
TNP	:	<i>Treasury Notional Pooling</i>
SETJEN	:	Sekretariat Jenderal
ITJEN	:	Inspektorat Jenderal
DJA	:	Direktorat Jenderal Anggaran

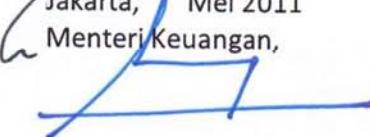
---

DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
DJBC	: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJPK	: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
DJPU	: Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
DJPB	: Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DJKN	: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
BAPEPAM-LK	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
BPPK	: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
BKF	: Badan Kebijakan Fiskal

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Bagian Anggaran 015 (BA 015) Kementerian Keuangan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2010 (*Audited*) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 1 Mei 2011  
Menteri Keuangan,  


Agus DW Martowardojo



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**INSPEKTORAT JENDERAL**

Gedung Juanda II Kementerian Keuangan Lantai IV s.d XIII  
Jl. DR Wahidin No.1 Jakarta 10710, Kotak Pos 3132  
Telepon (021) 3865430; (021) 3810162/6; Faksimili (021) 3847448; Situs [www.itjen.depkeu.go.id](http://www.itjen.depkeu.go.id)

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2010**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 999.07 (audited) untuk tahun anggaran 2010 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2010, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Kementerian Keuangan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan SAP. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

Jakarta, Mei 2011

Inspektur Jenderal  
Kementerian Keuangan

Sonny Loho  
NIP 195706011979111001

## I. RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007, menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Kementerian Keuangan ini telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (*Audited*)

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2010 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2010 *Audited* ini disusun dari laporan keuangan seluruh satuan kerja yang berada di bawah Kementerian Keuangan dan disusun secara berjenjang.

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2010 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja, selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2010 sebesar **Rp723.531.430.596.043,00** atau **97,26** persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2010 sebesar **Rp743.914.748.104.240,00**. Jumlah tersebut terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar **Rp722.544.159.296.194,00** atau mencapai **97,20** persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp987.271.299.849,00** atau mencapai **167,66** persen dari estimasi yang ditetapkan.

Realisasi Belanja Negara termasuk imbalan bunga pada TA 2010 sebesar **Rp14.276.465.681.945,00** atau mencapai **92,75** persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Rupiah Murni sebesar **Rp14.137.374.903.142,00** (termasuk didalamnya realisasi belanja imbalan bunga yang tidak tersedia pagu anggarannya dalam DIPA sebesar **Rp1.321.487.211.977,00**) atau **95,02** persen dari anggarannya, Belanja Pinjaman dan Hibah Luar Negeri sebesar **Rp139.090.778.803,00** atau **27,10** persen dari anggarannya. Adapun realisasi Belanja Negara tanpa imbalan bunga pada TA 2010 adalah sebesar **Rp12.954.978.469.968,00** atau mencapai **84,17** persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Rupiah Murni sebesar **Rp12.815.887.691.165,00** atau **86,14** persen dari anggarannya, Belanja Pinjaman dan Hibah Luar Negeri sebesar **Rp139.090.778.803,00** atau **27,10** persen dari anggarannya.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2010 dan 2009 dapat disajikan sebagai berikut:

				<i>(Dalam Rupiah)</i>	
				TA 2010	TA 2009
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KAS		741.914.748.104.240	708.714.294.939.832	650.138.525.778.845	621.255.832.292.278
Penerimaan Perpajakan		741.325.906.000.000	707.727.023.639.983	649.454.823.000.000	620.039.044.324.637
PNBP		588.842.104.240	987.271.299.849	683.702.778.845	1.216.787.967.641
Hibah		0	0	0	0
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI NON KAS		2.000.000.000.000	14.817.135.656.211	2.500.000.000.000	10.782.084.798
Penerimaan Perpajakan		2.000.000.000.000	14.817.135.656.211	2.500.000.000.000	10.782.084.798
PNBP		0	0	0	0
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH		743.914.748.104.240	723.531.430.596.043	652.638.525.778.845	621.266.614.377.076

<b>BELANJA TRANSAKSI KAS</b>	<b>15.391.864.198.000</b>	<b>14.276.465.681.945</b>	<b>15.579.306.142.000</b>	<b>12.762.371.875.491</b>
Belanja Rupiah Murni	14.878.568.057.000	14.137.374.903.142	15.023.634.441.000	12.616.119.198.369
Belanja PHLN	513.296.141.000	139.090.778.803	555.671.701.000	146.252.677.122
Jumlah Belanja	<b>15.391.864.198.000</b>	<b>14.276.465.681.945</b>	<b>15.579.306.142.000</b>	<b>12.762.371.875.491</b>

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Nilai Aset adalah sebesar **Rp109.432.138.938.078,00** yang terdiri dari Aset Lancar sebesar **Rp72.387.991.856.046,00**, Investasi Jangka Panjang sebesar **Rp0,00**, Aset Tetap sebesar **Rp36.058.407.872.153,00** dan Aset Lainnya sebesar **Rp985.739.209.879,00**.

Nilai Kewajiban adalah sebesar **Rp761.816.067.975,00** yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar **Rp611.878.292.975,00** dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar **Rp149.937.775.000,00**.

Sementara itu, nilai Ekuitas Dana adalah sebesar **Rp108.670.322.870.103,00** yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar **Rp71.846.529.727.455,00** dan Ekuitas Dana Investasi sebesar **Rp36.823.793.142.648,00**.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2010 dan 2009 dapat disajikan sebagai berikut:

<b>Uraian</b>	<b>Tanggal Neraca</b>		<b>(Dalam Rupiah) Nilai kenaikan/ (penurunan)</b>
	<b>31 Desember 2010</b>	<b>31 Desember 2009</b>	
<b>Aset</b>	<b>109.432.138.938.078</b>	<b>103.708.465.479.002</b>	<b>5.723.673.459.076</b>
Aset Lancar	72.387.991.856.046	64.710.404.152.663	7.677.587.703.383
Investasi Jangka Panjang	0	1.195.731.694.655	(1.195.731.694.655)
Aset Tetap	36.058.407.872.153	33.779.034.063.296	2.279.373.808.857
Aset Lainnya	985.739.209.879	4.023.295.568.388	(3.037.556.358.509)
<b>Kewajiban</b>	<b>761.816.067.975</b>	<b>359.251.417.318</b>	<b>402.564.650.657</b>
Kewajiban Jangka Pendek	611.878.292.975	359.251.417.318	252.626.875.657
Kewajiban Jangka Panjang	149.937.775.000	0	149.937.775.000
<b>Ekuitas Dana</b>	<b>108.670.322.870.103</b>	<b>103.349.214.061.684</b>	<b>5.321.108.808.419</b>
Ekuitas Dana Lancar	71.846.529.727.455	64.351.152.735.345	7.495.376.992.110
Ekuitas Dana Investasi	36.823.793.142.648	38.998.061.176.339	(2.174.268.033.691)

## 3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, CaLK menyajikan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sementara itu, penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana di neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

**II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
(LRAKT PERBANDINGAN TA 2010 dan 2009)**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
 UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010  
 (DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
	I PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI KAS	741,914,748,104,240	708,714,294,939,832	( 33,200,453,164,408)	95.53
	1. PENERIMAAN DALAM NEGERI	741,914,748,104,240	708,714,294,939,832	( 33,200,453,164,408)	95.53
	a. Penerimaan Perpajakan	741,325,906,000,000	707,727,023,639,983	( 33,598,882,360,017)	95.47
	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	588,842,104,240	987,271,299,849	398,429,195,609	167.66
	2. HIBAH	0	0	0	0.00
	II PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI NON KAS	2,000,000,000,000	14,817,135,656,211	12,817,135,656,211	740.86
	1. PENERIMAAN DALAM NEGERI NON KAS	2,000,000,000,000	14,817,135,656,211	12,817,135,656,211	740.86
	a. Penerimaan Perpajakan Non Kas	2,000,000,000,000	14,817,135,656,211	12,817,135,656,211	740.86
	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Kas	0	0	0	0.00
	2. HIBAH NON KAS	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A I + A II)	743,914,748,104,240	723,531,430,596,043	( 20,383,317,508,197)	97.26
B	BELANJA				
	I BELANJA TRANSAKSI KAS	15,391,864,198,000	14,276,465,681,945	( 1,115,398,516,055)	92.75
	Belanja Pegawai	7,626,567,848,000	7,177,469,494,589	( 449,098,353,411)	94.11
	Belanja Barang	5,161,993,559,000	3,927,556,076,682	( 1,234,437,482,318)	76.09
	Belanja Modal	2,603,302,791,000	1,849,952,898,697	( 753,349,892,303)	71.06
	Pembayaran Bunga Utang	0	1,321,487,211,977	1,321,487,211,977	0.00
	Subsidi	0	0	0	0.00
	Hibah	0	0	0	0.00
	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00
	II BELANJA TRANSAKSI NON KAS	0	0	0	0.00
	Belanja Pegawai Non Kas	0	0	0	0.00
	Belanja Barang Non Kas	0	0	0	0.00
	Belanja Modal Non Kas	0	0	0	0.00
	Pembayaran Bunga Utang Non Kas	0	0	0	0.00
	Subsidi Non Kas	0	0	0	0.00
	Hibah Non Kas	0	0	0	0.00
	Bantuan Sosial Non Kas	0	0	0	0.00
	Belanja Lain-lain Non Kas	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	15,391,864,198,000	14,276,465,681,945	( 1,115,398,516,055)	92.75
C	PEMBIAYAAN				
	1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00
	b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00
	2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00
	b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2)	0	0	0	0.00

Jakarta, Mei 2011

Sekretaris Jenderal,



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010  
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

Kode Lap. : LRAKT  
Tanggal : 27 Mei 2011  
Halaman : 1  
Prog. Id : lu\_paudat

No	URAIAN	2010				2009			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH								
A.I	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI KAS	741,914,748,104,240	708,714,294,939,832	( 33,200,453,164,408)	95.53	650,138,525,778,845	621,255,832,292,278	( 28,882,693,486,567)	95.56
A.I.1	PENERIMAAN NEGARA	741,914,748,104,240	708,714,294,939,832	( 33,200,453,164,408)	95.53	650,138,525,778,845	621,255,832,292,278	( 28,882,693,486,567)	95.56
A.I.1.a	Penerimaan Perpajakan	741,325,906,000,000	707,727,023,639,983	( 33,598,882,360,017)	95.47	649,454,823,000,000	620,039,044,324,637	( 29,415,778,675,363)	95.47
A.I.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	588,842,104,240	987,271,299,849	398,429,195,609	167.66	683,702,778,845	1,216,787,967,641	533,085,188,796	177.97
A.I.2	HIBAH	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.II	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI NON KAS	2,000,000,000,000	14,817,135,656,211	12,817,135,656,211	740.86	2,500,000,000,000	10,782,084,798	( 2,489,217,915,202)	0.43
A.II.1	PENERIMAAN NEGARA NON KAS	2,000,000,000,000	14,817,135,656,211	12,817,135,656,211	740.86	2,500,000,000,000	10,782,084,798	( 2,489,217,915,202)	0.43
A.II.1.a	Penerimaan Perpajakan Non Kas	2,000,000,000,000	14,817,135,656,211	12,817,135,656,211	740.86	2,500,000,000,000	10,782,084,798	( 2,489,217,915,202)	0.43
A.II.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.II.2	HIBAH NON KAS	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.I + A. II)	743,914,748,104,240	723,531,430,598,043	( 20,383,317,508,197)	97.26	652,638,525,778,845	621,266,614,377,076	( 31,371,911,401,769)	95.19
B	BELANJA NEGARA								
B.I	BELANJA TRANSAKSI KAS	15,391,864,198,000	14,276,465,681,945	( 1,115,398,516,055)	92.75	15,579,306,142,000	12,762,371,875,491	( 2,816,934,266,509)	81.92
B.I.1	Rupiah Murni	14,878,568,057,000	14,137,374,903,142	( 741,193,153,858)	95.02	15,023,634,441,000	12,616,119,198,369	( 2,407,515,242,631)	83.98
B.I.1.a	Belanja Pegawai	7,626,567,848,000	7,177,469,494,589	( 449,098,353,411)	94.11	7,841,374,777,000	6,747,850,896,515	( 1,093,523,880,485)	86.05
B.I.1.b	Belanja Barang	4,948,954,640,000	3,839,908,972,990	( 1,109,045,667,010)	77.59	4,531,191,068,000	3,140,694,103,425	( 1,390,496,964,575)	69.31
B.I.1.c	Belanja Modal	2,303,045,569,000	1,798,509,223,586	( 504,536,345,414)	78.09	2,651,068,596,000	1,670,746,362,125	( 980,322,233,875)	63.02
B.I.1.d	Pembayaran Bunga Utang	0	1,321,487,211,977	1,321,487,211,977	0.00	0	1,056,827,836,304	1,056,827,836,304	0.00
B.I.1.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2	Pinjaman dan Hibah Luar Negeri	513,296,141,000	139,090,778,803	( 374,205,362,197)	27.10	555,671,701,000	146,252,677,122	( 409,419,023,878)	26.32
B.I.2.a	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.b	Belanja Barang	213,038,919,000	87,647,103,692	( 125,391,815,308)	41.14	208,577,824,000	102,119,980,994	( 106,457,843,006)	48.96
B.I.2.c	Belanja Modal	300,257,222,000	51,443,675,111	( 248,813,546,889)	17.13	347,093,877,000	44,132,696,128	( 302,961,180,872)	12.71
B.I.2.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II	BELANJA TRANSAKSI NON KAS	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010  
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

Kode Lap. : LRAKT  
Tanggal : 27 Mei 2011  
Halaman : 2  
Prog.Id : lu\_pauait

No	URAIAN	2010				2009			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B.II.1	Belanja Pegawai Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.2	Belanja Barang Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.3	Belanja Modal Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.4	Pembayaran Bunga Utang Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.5	Subsidi Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.6	Hibah Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.7	Bantuan Sosial Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.8	Belanja Lain-lain Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
JUMLAH BELANJA (B.I + B. II)		15,391,864,198,000	14,276,465,681,945	( 1,115,398,516,055)	92.75	15,579,306,142,000	12,762,371,875,491	( 2,816,934,266,509)	81.92
C	PEMBIAYAAN								
C.I	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.I.1	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.I.2	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2)		0	0	0	0.00	0	0	0	0.00



**III.NERACA  
(NSAIKPT PERBANDINGAN TA 2010 dan 2009)**

**NERACA**  
**TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA**  
**PER 31 DESEMBER 2010**  
**(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan: LSAIKB  
Tanggal : 27/05/11  
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
<b>ASET</b>	
<b>ASET LANCAR</b>	
Kas di Bendahara Pengeluaran	2,253,757,563
Kas di Bendahara Penerimaan	4,068,349,035
Kas Lainnya dan Setara Kas	2,149,709,248
Kas pada Badan Layanan Umum	1,085,722,227,076
Piutang Pajak	70,945,271,446,620
Piutang Bukan Pajak	59,128,826,922
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	327,204,855
Uang muka belanja	30,201,365,733
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	1,800,000
Piutang dari kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	6,146,237,068
Persediaan	251,167,008,102
Persediaan Badan Layanan Umum	1,553,923,824
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>72,387,991,856,046</b>
<b>ASET TETAP</b>	
Tanah	17,154,828,794,908
Peralatan dan Mesin	7,306,062,037,508
Gedung dan Bangunan	9,880,476,902,813
Jalan, Irigasi dan Jaringan	316,775,657,845
Aset Tetap Lainnya	20,496,576,201
Konstruksi Dalam Pengerjaan	615,651,377,375
Tanah Badan Layanan Umum	545,192,062,827
Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum	31,697,703,142
Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum	144,672,506,225
Jalan,Irigasi, dan Jaringan Badan Layanan Umum	16,745,701,264
Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum	7,486,585,860
Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum	18,321,966,185
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>36,058,407,872,153</b>
<b>ASET LAINNYA</b>	
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi	5,402,005,376
Aset Tak Berwujud	360,495,002,682
Aset Tak Berwujud- Badan Layanan Umum	808,658,790
Aset Lain-lain	548,617,378,647
Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum	70,416,164,384
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>985,739,209,879</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>109,432,138,938,078</b>
<b>KEWAJIBAN</b>	
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	
Utang kepada Pihak Ketiga	202,520,284,203
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	329,105,858,431
Pendapatan Diterima di Muka	1,657,970,182

**NERACA**  
**TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA**  
**PER 31 DESEMBER 2010**  
**(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan: LSAJKB  
Tanggal : 27/05/11  
Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
Uang Muka	4,155,000
Uang Muka dari KPPN	2,249,602,563
Pendapatan Yang Ditangguhkan	76,340,422,596
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>611,878,292,975</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	149,937,775,000
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>149,937,775,000</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>761,816,067,975</b>
<b>EKUITAS DANA</b>	
<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>	
Cadangan Piutang	71,010,875,515,466
Cadangan Persediaan	252,720,931,926
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	-531,332,342,563
Dana Lancar BLU	1,085,722,227,076
Barang/Jasa Yang Harus Diterima	30,201,365,732
Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan	-1,657,970,182
<b>JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR</b>	<b>71,846,529,727,455</b>
<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>	
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	36,058,407,872,153
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	915,323,045,495
Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	-149,937,775,000
<b>JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI</b>	<b>36,823,793,142,648</b>
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	<b>108,670,322,870,103</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>109,432,138,938,078</b>

Jakarta, Mei 2011

Sekretaris Jenderal,



**NERACA**  
**TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA**  
**PER 31 DESEMBER 2010 DAN 2009**  
**(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan : NSAIKLT  
 Tanggal : 27/05/11  
 Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2010	2009	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas di Bendahara Pengeluaran	2,253,757,563	4,021,141,586	( 1,767,384,023)	( 43.95)
Kas di Bendahara Penerimaan	4,068,349,035	11,580,915,329	( 7,512,566,294)	( 64.87)
Kas Lainnya dan Setara Kas	2,149,709,248	1,487,211,062	662,498,186	44.54
Kas pada Badan Layanan Umum	1,085,722,227,076	684,555,535,893	401,166,691,183	58.60
Piutang Pajak	70,945,271,446,620	63,658,772,887,180	7,286,498,559,440	11.44
Piutang Bukan Pajak	59,128,826,922	87,368,486,446	( 28,239,659,524)	( 32.32)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan	327,204,855	228,062,418	99,142,437	43.47
Uang muka belanja	30,201,365,733	35,148,473,051	( 4,947,107,318)	( 14.07)
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	1,800,000	24,255,654,147	( 24,253,854,147)	( 99.99)
Piutang dari kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	6,146,237,068	17,028,732,863	( 10,882,495,795)	( 63.90)
Persediaan	251,167,008,102	184,780,228,921	66,386,779,181	35.92
Persediaan Badan Layanan Umum	1,553,923,824	1,176,823,767	377,100,057	32.04
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>72,387,991,856,046</b>	<b>64,710,404,152,663</b>	<b>7,677,587,703,383</b>	<b>11.86</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>				
Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum	0	1,195,731,694,655	( 1,195,731,694,655)	( 100.00)
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>0</b>	<b>1,195,731,694,655</b>	<b>( 1,195,731,694,655)</b>	<b>( 100.00)</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	17,154,828,794,908	16,447,664,813,816	707,163,981,092	4.29
Peralatan dan Mesin	7,306,062,037,508	6,424,420,868,487	881,641,169,021	13.72
Gedung dan Bangunan	9,880,476,902,813	9,173,928,261,053	706,548,641,760	7.70
Jalan, Irigasi dan Jaringan	316,775,657,845	194,929,862,012	121,845,795,833	62.50
Aset Tetap Lainnya	20,496,576,201	259,015,726,496	( 238,519,150,295)	( 92.08)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	615,651,377,375	629,408,676,151	( 13,757,298,776)	( 2.18)
Tanah Badan Layanan Umum	545,192,062,827	543,228,844,000	1,963,218,827	0.36
Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum	31,697,703,142	17,514,762,483	14,182,940,659	80.97
Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum	144,672,506,225	62,505,104,506	82,167,401,719	131.45
Jalan, Irigasi, dan Jaringan Badan Layanan Umum	16,745,701,264	3,702,124,784	13,043,576,480	352.32
Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum	7,486,585,860	5,621,511,860	1,865,074,000	33.17
Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum	18,321,966,185	17,093,507,648	1,228,458,537	7.18
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>36,058,407,872,153</b>	<b>33,779,034,063,296</b>	<b>2,279,373,808,857</b>	<b>6.74</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Tagihan Tuntutan Perpendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi	5,402,005,376	5,422,524,798	( 20,519,422)	( 0.37)
Aset Tak Berwujud	360,495,002,682	312,417,249,310	48,077,753,372	15.38
Aset Tak Berwujud- Badan Layanan Umum	808,658,790	534,108,790	274,550,000	51.40
Aset Lain-lain	548,617,378,647	386,815,398,044	161,801,980,603	41.82
Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum	70,416,164,384	2,706,287,446	67,709,876,938	2,501.94
Dana Kelolaan Badan Layanan Umum	0	3,315,400,000,000	( 3,315,400,000,000)	( 100.00)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>985,739,209,879</b>	<b>4,023,295,568,388</b>	<b>( 3,037,556,358,509)</b>	<b>( 75.49)</b>

**NERACA**  
**TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA**  
**PER 31 DESEMBER 2010 DAN 2009**  
**(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan: NSAIKLT  
 Tanggal : 27/05/11  
 Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2010	2009	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>109,432,138,938,078</b>	<b>103,708,465,479,002</b>	<b>5,723,673,459,076</b>	<b>5.51</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	202,520,284,203	47,132,934,883	155,387,349,320	329.67
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	329,105,858,431	294,292,169,306	34,813,689,125	11.82
Pendapatan Diterima di Muka	1,657,970,182	1,803,878,207	( 145,908,025)	( 8.08)
Uang Muka	4,155,000	0	4,155,000	0.00
Uang Muka dari KPPN	2,249,602,563	4,021,141,586	( 1,771,539,023)	( 44.05)
Pendapatan Yang Ditangguhkan	76,340,422,596	12,001,293,336	64,339,129,260	536.10
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>611,878,292,975</b>	<b>359,251,417,318</b>	<b>252,626,875,657</b>	<b>70.32</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>				
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	149,937,775,000	0	149,937,775,000	0.00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>149,937,775,000</b>	<b>0</b>	<b>149,937,775,000</b>	<b>0.00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>761,816,067,975</b>	<b>359,251,417,318</b>	<b>402,564,650,657</b>	<b>112.05</b>
<b>EKUITAS DANA</b>				
<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>				
Cadangan Piutang	71,010,875,515,466	63,822,802,296,105	7,188,073,219,361	11.26
Cadangan Persediaan	252,720,931,926	185,957,052,688	66,763,879,238	35.90
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka	-531,332,342,563	-342,162,149,341	( 189,170,193,222)	55.28
Dana Lancar BLU	1,085,722,227,076	684,555,535,893	401,166,691,183	58.60
Barang/Jasa Yang Harus Diterima	30,201,365,732	0	30,201,365,732	0.00
Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan	-1,657,970,182	0	( 1,657,970,182)	0.00
<b>JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR</b>	<b>71,846,529,727,455</b>	<b>64,351,152,735,345</b>	<b>7,495,376,992,110</b>	<b>11.64</b>
<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>				
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	0	1,195,731,694,655	( 1,195,731,694,655)	( 100.00)
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	36,058,407,872,153	33,779,034,063,296	2,279,373,808,857	6.74
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	915,323,045,495	4,023,295,568,388	( 3,107,972,522,893)	( 77.24)
Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka	-149,937,775,000	0	( 149,937,775,000)	0.00
<b>JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI</b>	<b>36,823,793,142,648</b>	<b>38,998,061,326,339</b>	<b>( 2,174,268,183,691)</b>	<b>( 5.57)</b>
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	<b>108,670,322,870,103</b>	<b>103,349,214,061,684</b>	<b>5,321,108,808,419</b>	<b>5.14</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>109,432,138,938,078</b>	<b>103,708,465,479,002</b>	<b>5,723,673,459,076</b>	<b>5.51</b>

Jakarta, Mei 2011

Sekretaris Jenderal,

Mulia P. Nasution

NIP. 195108271976031001



## **IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITED**

### **A. PENJELASAN UMUM**

#### **Dasar Hukum**

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
4. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30 ayat (1) menetapkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 55 ayat (4) menetapkan bahwa Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa Pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan .
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menetapkan bahwa Laporan Keuangan (*Audited*) disusun berdasarkan Laporan Keuangan (*Audited*) yang telah dikoreksi atau disesuaikan menurut hasil pemeriksaan BPK.
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor atas Barang Ekspor Tertentu.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 yang telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 49 Tahun 1991 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pungutan-Pungutan Lainnya terhadap Pelaksanaan Kuasa dan Ijin Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik.
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
17. Instruksi Presiden RI No. 12 tahun 1975 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Karya, Kontrak Production Sharing dan Kegiatan Pertamina sendiri.
18. Peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.02/2005 tentang Tata cara pembayaran kembali PPN dan PPnBM atas perolehan BKP dan atau JKP yang digunakan oleh BU atau BUT dalam pengusahaan minyak dan gas bumi.
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor.
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2005 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pungutan Ekspor.
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.02/2005 tentang Penetapan Tarif Pungutan Ekspor atas Batubara.
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2008 tanggal 4 November 2008 tentang Mekanisme Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik.
23. Keputusan Menteri Keuangan No.766/KMK.04/1992 tentang Tatacara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-Pungutan Lainnya atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik.
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 Tentang Modul Penerimaan Negara.
25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja .
26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtempahan Barang Milik Negara.
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2007 tentang Kodefikasi Barang Milik Negara.
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/KM.05/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah.
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja pada Kategori Usaha Tertentu.
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.05/2009 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2009.
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 tentang Standar Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
38. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-07/PB/2005 Tentang Pemberian Kuasa Antar Kuasa Pengguna Anggaran.
39. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-38/PB/2006 Tentang Pedoman Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan.
40. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-40/PB/2006 Tentang Pedoman Akuntansi Persediaan.
41. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-48/PB/2006 Tentang SP3.
42. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-67/PB/2006 Tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengesahan atas Realisasi Hibah Luar Negeri Pemerintah yang Dilaksanakan Secara Langsung.
43. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-69/PB/2006 Tentang Pedoman Koreksi Kesalahan Laporan Keuangan.
44. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-78/PB/2006 Tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara.
45. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-02/PB/2007 Tentang Pedoman Penatausahaan Dan Akuntansi Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

46. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-67/PB/2007 Tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.
47. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-09/PB/2009 tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Pelaporan Realisasi Pendapatan Sektor Pajak pada Sistem Akuntansi Instansi Direktorat Jenderal Pajak.
48. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-62/PB/2009 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan.
49. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-08/PB/2009 tentang Penambahan dan Perubahan BAS.
50. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-65/PB.05/2010 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga.

Rencana  
Strategis

## A.2. KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN KEUANGAN

### A.2.1. Visi Kementerian Keuangan

Visi Kementerian Keuangan adalah **Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya dan Akuntabel untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan.**

Dari visi yang ditetapkan tersebut, yang dimaksud dengan **Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara** adalah Kementerian Keuangan sebagai lembaga/institusi yang mempunyai tugas menghimpun dan mengalokasikan keuangan negara dan kekayaan negara. **Dipercaya** adalah semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat karena pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dilakukan secara transparan, yaitu semua penerimaan negara, belanja negara, dan pembiayaan defisit anggaran dilakukan melalui mekanisme APBN. **Akuntabel** adalah pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang mengacu pada praktik terbaik internasional yang berlandaskan atas profesionalitas, proporsionalitas, dan keterbukaan.

### A.2.2. Misi Kementerian Keuangan

Untuk merealisasikan Visi yang telah ditetapkan, maka Kementerian Keuangan memiliki Misi:

1. **Misi Fiskal** adalah mengembangkan kebijakan fiskal yang sehat, berkelanjutan, hati-hati (*prudent*), dan bertanggung jawab.
2. **Misi Kekayaan Negara** adalah Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparan, efisien, dan bertanggung jawab.
3. **Misi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan** adalah Mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non-bank sebagai penggerak dan penguat perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global.
4. **Misi Penguatan Kelembagaan** adalah:
  - i. Membangun dan Mengembangkan Organisasi Berlandaskan Administrasi Publik Sesuai dengan Tuntutan Masyarakat.
  - ii. Membangun dan Mengembangkan SDM yang Amanah, Profesional,

- Berintegritas Tinggi dan bertanggung jawab.
- iii. Membangun dan Mengembangkan Teknologi Informasi Keuangan yang Modern dan Terintegrasi serta Sarana dan Prasarana Strategis Lainnya.

#### A.2.3. Tujuan Kementerian Keuangan

Guna mengaktualisasikan visi dan misi tersebut, maka Kementerian Keuangan menetapkan tujuan pencapaian organisasi sebagai berikut :

- |    |          |   |  |
|----|----------|---|--|
| 1. | Tujuan 1 | : | Meningkatkan dan Mengamankan Pendapatan Negara dengan Mempertimbangkan Perkembangan Ekonomi dan Keadilan Masyarakat,   |
| 2. | Tujuan 2 | : | Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Belanja Negara Untuk Mendukung Penyelenggaraan Tugas K/L dan Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal,   |
| 3. | Tujuan 3 | : | Mewujudkan kapasitas pembiayaan yang mampu memberikan daya dukung bagi kesinambungan fiskal,   |
| 4. | Tujuan 4 | : | Pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional dan akuntabel serta mengedepankan kepuasan stakeholders atas kinerja perbendaharaan negara,   |
| 5. | Tujuan 5 | : | Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal serta menjadikan nilai kekayaan negara sebagai acuan dalam berbagai keperluan,   |
| 6. | Tujuan 6 | : | Membangun Otoritas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang Amanah dan Profesional, yang Mampu Mewujudkan Industri Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank Sebagai Penggerak Perekonomian Nasional yang Tangguh dan Berdaya Saing Global. |

#### A.2.4. Sasaran Strategis

- a. Sasaran Strategis dalam Tema Pendapatan Negara adalah:
1. Tingkat pendapatan yang optimal  
Tingkat pendapatan yang optimal adalah tingkat pencapaian penerimaan dalam negeri yang sesuai dengan target sebagaimana tercantum dalam APBN atau APBN-P.  
2. Tingkat kepercayaan *stakeholders* yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal.  
Tingkat kepercayaan *stakeholders* yang tinggi diukur berdasarkan hasil survei kepuasan *stakeholder* oleh lembaga independen. Hasil survei yang positif akan meningkatkan citra Kementerian Keuangan di mata *stakeholder*.  
3. Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi.  
Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai terhadap peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya menunjukkan potensi pendapatan pajak, kepabeanan dan cukai.
- b. Sasaran Strategis dalam Tema Belanja Negara :
1. Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel
    - Alokasi belanja negara yang tepat sasaran adalah alokasi anggaran yang dapat mencapai kinerja program dan kegiatan kementerian negara/lembaga yang telah ditetapkan dalam APBN.

- Alokasi belanja negara yang tepat waktu adalah pengesahan DIPA yang dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan.
  - Alokasi belanja negara yang efisien adalah penuangan anggaran pada DIPA yang dapat digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan.
  - Alokasi belanja negara yang akuntabel adalah alokasi belanja negara yang proporsional sesuai dengan prioritas rencana kerja pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.
2. Tata kelola yang tertib transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara.
- Tata kelola yang tertib adalah pengelolaan belanja Negara sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
  - Tata kelola yang transparan dan akuntabel adalah pengelolaan belanja Negara yang dilakukan secara terbuka sehingga proses pengelolaannya dapat diketahui oleh stakeholder dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah;
- Perimbangan Keuangan adalah pelaksanaan kebijakan hubungan keuangan Pusat dan daerah yang dapat menjamin keseimbangan keuangan terkait dengan besarnya beban, tanggung jawab, dan kewenangan yang dimiliki oleh pusat maupun daerah sesuai dengan norma dan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah.
- Tata kelola yang tertib adalah pengelolaan transfer ke daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - Transparan adalah pelaksanaan kebijakan transfer ke daerah dapat diakses oleh seluruh *stakeholder*.
  - Akuntabel adalah pelaksanaan kebijakan transfer ke daerah dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Sasaran Strategis dalam Tema Pembiayaan APBN adalah:
1. Terpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang secara tepat waktu, cukup, dan efisien.

Memenuhi target pembiayaan APBN melalui utang yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri, dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) dan Pinjaman, dengan mempertimbangkan biaya dan risiko untuk mendukung kesinambungan fiskal.
  2. Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan pelaku pasar lainnya) terhadap pengelolaan utang yang transparan, akuntabel, dan kredibel.

Tersedianya informasi terkait pengelolaan utang kepada publik secara transparan dan akurat, dan terjadinya kredibilitas pengelolaan utang dengan melakukan pembayaran kewajiban secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.
  3. Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal.

Mengoptimalkan struktur jatuh tempo SBN dengan memperhatikan jenis,

- tingkat bunga, dan tenor, serta kondisi pasar keuangan.
4. Terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid.  
Mengembangkan pasar SBN dengan menyediakan alternatif instrumen SBN yang variatif, serta meningkatkan sebaran investor.
- d. Sasaran Strategis dalam Tema Perbendaharaan Negara adalah:
1. Efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja negara.  
Penyaluran belanja negara untuk mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan secara akurat dan tepat waktu berarti pelaksanaan penyaluran belanja dilakukan sesuai dengan norma waktu yang ditetapkan.
  2. Optimalisasi pengelolaan kas.  
Optimalisasi pengelolaan kas negara meliputi dalam hal perencanaan kas, pengendalian kas, dan pemanfaatan *idle* kas, yang dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan kas dalam jumlah yang cukup.  
Optimalisasi pengelolaan kas negara adalah dalam rangka mewujudkan efisiensi pengelolaan kas dengan mengedepankan prinsip "meminimumkan biaya" dan "memaksimalkan manfaat" bila terjadi kekurangan kas (*cash mismatch*) atau pemanfaatan kelebihan kas (*idle cash*).
  3. Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya.  
Salah satu bagian dari pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya adalah pengembalian penerusan pinjaman. Dana penerusan pinjaman tersebut harus dioptimalkan pengembalian dan penyetorannya kembali ke APBN sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan pengembalian dana tersebut mempunyai kontribusi dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri dan penerimaan defisit APBN.
  4. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU.  
Melalui penyempurnaan regulasi terkait dengan pengelolaan BLU, peningkatan penilaian kinerja satker BLU serta pembinaan yang berkelanjutan, diharapkan satker yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU akan dapat melaksanakan fungsinya secara lebih efektif dan efisien. Hal tersebut dapat dilihat dari kinerja keuangan pada satker BLU, sehingga selanjutnya akan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanannya kepada masyarakat.
  5. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.  
Salah satu kebijakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah melalui penerapan akuntansi pemerintah modern sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Sampai dengan saat ini LKPP yang telah disusun masih berdasarkan basis Kas Menuju Akrual. Selanjutnya secara bertahap LKPP akan disusun berdasarkan akrual basis, sehingga diharapkan akan terwujud peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta peningkatan opini BPK (dari Disclaimer menjadi Wajar Tanpa Pengecualian) melalui LKPP yang lebih berkualitas.

6. Terciptanya sistem perpendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu.

Untuk menciptakan sistem perpendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu, mulai tahun anggaran 2009 telah dilaksanakan proyek penyempurnaan sistem perpendaharaan dan anggaran negara yang dikenal dengan Proyek Sistem Perpendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

- e. Sasaran Strategis dalam Tema Kekayaan Negara adalah:
  1. Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal Mengkoordinasikan pemberian data dan informasi keberadaan *asset idle* kementerian dan lembaga dalam rangka perencanaan pengadaan belanja modal dari kementerian dan lembaga, serta penghematan penggunaan anggaran dengan mengoptimalkan BMN *idle* yang ada di kementerian dan lembaga.
  2. Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel Penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel adalah tercatatnya seluruh kekayaan negara/BMN dalam daftar barang baik di kementerian dan lembaga sebagai pengguna dan di Kementerian Keuangan sebagai pengelola.
  3. Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip *the highest and best use* Pemanfaatan BMN adalah upaya penggunaan secara maksimal seluruh BMN untuk mendukung penyelenggaraan Tupoksi penyelenggaraan negara.
  4. Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara Pelayanan pengelolaan kekayaan Negara meliputi pelayanan permohonan penetapan status pemanfaatan, penggunaan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara.
  5. Terwujudnya database nilai kekayaan negara yang kredibel Mendapatkan, mengumpulkan dan mengolah data kekayaan negara sehingga menjadi informasi eksekutif yang utuh, tepat waktu, akurat, dan dapat digunakan untuk proses pengambilan keputusan bagi pimpinan Kementerian Keuangan.
- f. Sasaran Strategis dalam Tema Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank adalah:
  1. Terwujudnya regulator bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional
  2. Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif
  3. Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sarana investasi yang menarik dan kondusif dan sarana pengelolaan risiko yang handal
  4. Terwujudnya industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, *resilience* dan *liquid*
  5. Tersedianya kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan keterbukaan (*fairness and transparency*)
  6. Tersedianya infrastruktur pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang kredibel, dapat diandalkan dan berstandar internasional

- g. Sasaran Strategis Pembelajaran dan Pertumbuhan dalam menunjang pencapaian tujuan strategis 6 tema pokok adalah:
1. Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi;  
Sistem rekrutmen yang kredibel dan pengembangan SDM yang tertata dan berkelanjutan diharapkan menghasilkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi dalam mengelola Keuangan Negara
  2. Terwujudnya organisasi yang handal dan modern;  
Pengembangan organisasi dilakukan berdasarkan fungsi masing-masing unit organisasi dan SOP yang dimiliki
    - Fungsi unit organisasi merupakan fungsi yang telah disusun berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
    - SOP (*Standar Operating Procedure*) adalah standar yang dijadikan panduan bagaimana suatu kegiatan dilaksanakan sehingga akan memberikan kepastian mengenai apa yang harus dilaksanakan, waktu penyelesaian, dan biaya (bila ada biaya). SOP yang disusun harus memenuhi prinsip efisiensi.
  3. Terwujudnya *good governance*;  
*Good Governance* adalah terciptanya tata kelola pemerintahan dalam menerapkan prinsip *Good Governance* (Transparansi, Akuntabilitas, Responsiveness, Responsibilitas, Efektifitas, dan Efisien)
  4. Terwujudnya dan termanfaatkannya TIK yang terintegrasi;  
Sistem informasi/aplikasi yang ada di seluruh lingkungan Kementerian Keuangan diupayakan terintegrasi didukung dengan kualitas layanan infrastruktur yang prima
  5. Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan;  
Sasaran strategis ini terkait dengan *product/service* yang dihasilkan oleh Inspektorat Jenderal yang difokuskan pada hasil pengawasan yang dapat memberikan nilai tambah bagi kinerja Kementerian Keuangan melalui asistensi, monitoring dan *review* penyusunan Laporan Keuangan pada unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan dan Laporan Keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.

#### A.2.5. Program dan Kegiatan Kementerian Keuangan

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, dengan mengacu kepada RPJM Nasional 2010–2014, Kementerian Keuangan menetapkan 14 (empat belas) program.

**REALISASI DIPA PER PROGRAM**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2010**

KODE	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
102	Program Pembiayaan lain-lain	-	1.321.487.211.977	0,00
109	Program penerapan kepemerintahan yang baik	11.452.085.319.000	10.159.903.474.363	88,72
110	Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara.	44.656.077.000	41.298.617.084	92,48
113	Pengelolaan sumber daya manusia aparatur.	231.707.128.000	180.796.874.848	78,03
117	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara.	986.776.542.000	765.333.101.010	77,56
120	Program peningkatan penerimaan dan pengamanan keuangan negara.	1.585.625.706.000	978.764.882.704	61,73
121	Program peningkatan efektivitas pengeluaran negara.	519.660.524.000	386.523.171.710	74,38
122	Program pembinaan akuntansi keuangan negara.	97.296.971.000	74.088.113.745	76,15
123	Program pengembangan kelembagaan keuangan.	66.927.385.000	56.273.690.655	84,08
124	Program stabilisasi ekonomi dan sektor keuangan.	103.255.788.000	88.040.174.547	85,26
125	Program pengelolaan dan pembiayaan hutang.	34.074.382.000	32.325.136.634	94,87
126	Program pemantapan pelaksanaan sistem penganggaran.	10.295.903.000	9.690.086.269	94,12
128	Program pengembangan komunikasi dan informasi dan hubungan antar lembaga	161.910.500.000	98.649.644.554	60,93
601	Program pendidikan tinggi.	97.591.973.000	83.291.501.845	85,35
<b>Jumlah</b>		<b>15.391.864.198.000</b>	<b>14.276.465.681.945</b>	<b>92,75</b>

terdapat 2 (dua) SS Kementerian Keuangan yaitu Transparansi dan kredibilitas pengelolaan keuangan negara dan Tingkat Kepuasan Pelanggan yang tinggi.

Dari perspektif proses internal Kementerian Keuangan, untuk mendukung pencapaian SS Kementerian Keuangan pada dua *layer stakeholders perspective* dan *customers perspective* tersebut diperlukan adanya tiga faktor penting berupa perumusan, pengelolaan dan pengembangan, serta pengawasan dan pengembangan hukum terhadap *core business* Kementerian Keuangan. Dalam hal ini, proses internal yang dimaksud terkait dengan kajian dan perumusan kebijakan yang berkualitas, pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang efektif dan efisien, peningkatan edukasi masyarakat dan pelaku ekonomi, serta monitoring dan evaluasi kepatuhan dan penegakan hukum yang efektif.

Sedangkan dari perspektif *learning and growth*, terdapat empat faktor penting yang harus dikelola dengan baik guna menciptakan modal utama untuk mencapai tujuan organisasi yaitu faktor pengembangan sumber daya manusia, organisasi, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan pengelolaan anggaran.

Sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2010, dari 39 IKU Depkeu-Wide terdapat 33 IKU berstatus hijau, 6 IKU berstatus kuning, dan tidak ada IKU berstatus merah. Adapun 3 IKU yang berstatus kuning tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase realisasi penerimaan pajak (Sub IKU dari IKU Jumlah Pendapatan Negara)

Unit yang bertanggung jawab adalah Direktorat Jenderal Pajak dengan target sebesar **Rp661,49T (100%)** yang dicapai sebesar **Rp649,35T (98,16%)**.

Realisasi Penerimaan Pajak tidak mencapai target, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Penerimaan PPh Pasal 21 tidak mencapai target, diantaranya disebabkan tidak ada lagi kewajiban memasukkan SPT Tahunan, sehingga tidak ada lagi penerimaan PPh Pasal 29 dari SPT Tahunan PPh Pasal 21.
- Penerimaan PPh Pasal 22 tidak mencapai target diantaranya disebabkan tidak tercapainya penyerapan anggaran tahun 2010, menurunnya penerimaan PPh Pasal 22 dari pemungut, menurunnya penerimaan dari penyerahan rokok, serta menurunnya penerimaan dari SKPKB PPh Pasal 22.
- Penerimaan PPh Pasal 23 tidak mencapai target diantaranya disebabkan adanya penurunan tarif PPh Pasal 23 terutama terhadap sewa dan penggunaan harta, serta menurunnya penerimaan PPh Pasal 23 dari deviden.
- Penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi tidak mencapai target diantaranya disebabkan tidak adanya lagi penerimaan dari *sunset policy* di tahun 2009.
- Penerimaan PPh Final tidak mencapai target diantaranya disebabkan tingkat suku bunga 2010 (**6,5%**) relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat suku bunga 2009 (**8,75% - 6,75%**).
- Penerimaan PPh Fiskal Luar Negeri tidak mencapai target diantaranya disebabkan bertambahnya jumlah kepemilikan NPWP dan berlakunya ketentuan bebas fiskal bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP.
- Penerimaan PPN Dalam Negeri tidak mencapai target diantaranya disebabkan tidak tercapainya penyerapan anggaran tahun 2010, dan tingginya pertumbuhan restitusi jika dibandingkan dengan tahun 2009

(26,89%).

- Penerimaan PPn Impor tidak mencapai target diantaranya disebabkan adanya tren penguatan nilai tukar rupiah.

## 2. Indeks Kepuasan Pelanggan

Unit yang bertanggung jawab adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan target 3,92 dan realisasi 3,87.

Indeks kepuasan pelanggan tidak mencapai target, diantaranya disebabkan masih adanya :

- Kemampuan teknis SDM yang masih kurang di beberapa lokasi pelayanan
- Sikap petugas layanan yang kurang “bersahabat,”
- Kebijakan baru yang belum dipahami sepenuhnya, dan
- Ketidakpatuhan, terutama dalam pelayanan ekspor impor, fiskal, dan perpajakan di beberapa satuan kerja.

## 3. Persentase penyerapan DIPA

Unit yang bertugas adalah Sekretariat Jenderal dengan target 85,00 persen dan realisasi 84,09 persen.

Target penyerapan DIPA tidak mencapai target, diantaranya disebabkan:

- Efisiensi belanja, seperti belanja transito, lembur, honorarium, belanja perjalanan, langganan daya dan jasa, jasa konsultan dan jasa profesi, operasional perkantoran, serta belanja modal sehubungan dengan pengadaan melalui *e-procurement* sebesar Rp1.704,55 Miliar.
- Kendala eksternal, seperti terlambatnya *No Objection Letter* (NOL) dari *lender* untuk kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, keterlambatan dukungan dari instansi lain serta kesulitan memperoleh lahan sebesar Rp664,78 Miliar.
- Kendala internal, seperti kurangnya panitia pengadaan barang dan jasa di daerah dan rencana kerja yang kurang baik sebesar Rp50,78 Miliar.

Laporan capaian kinerja Kementerian Keuangan secara lengkap terlampir.

### Pendapatan

#### PENDAPATAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Realisasi Pendapatan Kementerian Keuangan TA 2010 adalah sebesar Rp723.531.430.596.043,00 atau 97,26 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2010 sebesar Rp743.914.748.104.240,00. Dibandingkan dengan TA 2009, realisasi pendapatan TA 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp102.264.816.218.967,00 atau 16,46 persen.

### Belanja

#### BELANJA KEMENTERIAN KEUANGAN

Realisasi Belanja Kementerian Keuangan pada TA 2010 adalah sebesar Rp14.276.465.681.945,00 (termasuk didalamnya realisasi belanja imbalan bunga yang tidak tersedia pagu anggarannya dalam DIPA sebesar Rp1.321.487.211.977,00) atau 92,75 persen dari pagu belanja dalam DIPA sebesar Rp15.391.864.198.000,00. Sedangkan realisasi belanja tanpa imbalan bunga sebesar Rp12.954.978.469.968,00 atau 84,17 persen dari anggarannya. Realisasi belanja TA 2010 mengalami kenaikan

sebesar Rp1.514.093.806.454,00 atau 11.86 persen dari realisasi belanja TA 2009 sebesar Rp12.762.371.875.491,00.

### A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2010 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Kementerian Keuangan, termasuk di dalamnya jenjang struktural di bawah Kementerian Keuangan seperti eselon I, kantor wilayah, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan Kementerian Keuangan disusun berdasarkan penggabungan data/laporan keuangan satuan kerja Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan TA 2010 ini memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp15.391.864.198.000,00 meliputi:

- Satuan kerja pusat/KP termasuk 1 satker BLU PIP sebesar Rp10.007.457.531.701,00.
- Satuan kerja daerah/KD termasuk 1 satker BLU STAN sebesar Rp5.384.406.666.299,00.

Dari total anggaran di atas, rincian anggaran satuan kerja BLU adalah sebagai berikut :

Tahun Anggaran	Jumlah Satker	Jenis Sumber Dana							
		APBN				BLU			
2009	2	60.086.973.000				49.003.932.000			
2010	2	70.698.528.000				44.799.935.000			

Jumlah satuan kerja lingkup Kementerian Keuangan adalah 1.066 satker. Dari jumlah tersebut terdapat 11 satker pada DJP yang tidak mengelola DIPA, sehingga tidak menyampaikan laporan keuangan. Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 1**  
**Rekapitulasi Jumlah Satker Menurut Eselon 1**

Kode Eselon I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker
		KP		KD		DK		TP		
		M	TM	M	TM	M	TM	M	TM	
01	Sekretariat Jenderal	9	-	22	-	-	-	-	-	31
02	Inspektorat Jenderal	1	-	-	-	-	-	-	-	1
03	Ditjen Anggaran	1	-	-	-	-	-	-	-	1
04	Ditjen Pajak	1	-	559	11	-	-	-	-	571
05	Ditjen Bea dan Cukai	5	-	134	-	-	-	-	-	139
06	Ditjen Perimbangan Keuangan	1	-	-	-	-	-	-	-	1
07	Ditjen Pengelolaan Utang	1	-	-	-	-	-	-	-	1
08	Ditjen Perbendaharaan	3	-	208	-	-	-	-	-	211
09	Ditjen Kekayaan Negara	1	-	87	-	-	-	-	-	88
10	Bapepam-LK	1	-	-	-	-	-	-	-	1
11	BPPK	1	-	19	-	-	-	-	-	20
12	BKF	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Jumlah		26	-	1029	11	-	-	-	-	1066

Keterangan:

M = Menyampaikan LK

TM = Tidak menyampaikan LK

Selain memperoleh dana dari DIPA BA 015 Kementerian Keuangan juga mengelola dana yang berasal dari BA 999.07 (Belanja Subsidi) sebesar **Rp158.252.739.094.526,00** dan dari BA 999.08 (Belanja Lain-lain) sebesar **Rp56.098.962.478.000,00**.

Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan penggabungan Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi yang berada di bawah Kementerian Keuangan Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja.

2. Neraca

Neraca disusun berdasarkan penggabungan neraca entitas akuntansi yang berada di bawah Kementerian Keuangan dan disusun melalui SAI.

3. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Data BMN yang disajikan di neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN.

Jumlah satuan kerja lingkup Kementerian Keuangan adalah 1.066 satker. Dari jumlah tersebut terdapat 11 satker pada DJP yang tidak mengelola DIPA/Barang Milik Negara, sehingga tidak menyampaikan laporan barang. Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

**Tabel 2**  
**Rekapitulasi Jumlah Satker Menurut Eselon 1**

Kode Eselon I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan										Jumlah Satker	
		KP		KD		DK		TP					
		M	TM	M	TM	M	TM	M	TM				
01	Sekretariat Jenderal	9	-	22	-	-	-	-	-	-	-	31	
02	Inspektorat Jenderal	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
03	Ditjen Anggaran	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
04	Ditjen Pajak	1	-	559	11	-	-	-	-	-	-	571	
05	Ditjen Bea dan Cukai	5	-	134	-	-	-	-	-	-	-	139	
06	Ditjen Perimbangan Keuangan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
07	Ditjen Pengelolaan Utang	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
08	Ditjen Perbendaharaan	3	-	208	-	-	-	-	-	-	-	211	
09	Ditjen Kekayaan Negara	1	-	87	-	-	-	-	-	-	-	88	
10	Bapepam-LK	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
11	BPPK	1	-	19	-	-	-	-	-	-	-	20	
12	BKF	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Jumlah	26	-	1029	11	-	-	-	-	-	-	1066	

Keterangan:

M = Menyampaikan Laporan Barang

TM = Tidak menyampaikan Laporan Barang

#### *Kebijakan Akuntansi*

#### A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian LK TA 2009 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK Kementerian Keuangan adalah :

#### *Pendapatan*

##### (1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

*Belanja*

**(2) Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di lembar muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, adapun di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

*Aset*

**(3) Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar*

**a. Aset Lancar**

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca dengan menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Kebijakan penyisihan Piutang Pajak dan umur piutang pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai dengan PER-08/PJ/2009 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak, sedangkan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sesuai dengan P-47/BC/2010 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di DJBC. Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI) yang dikeluarkan oleh DJBC ke DJP merupakan dokumen hapus buku atas piutang pajak DJBC.

Berdasarkan Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang menyatakan bahwa Tagihan Ganti Rugi merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau

kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh melalui pembelian,
- Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- Nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

## *Investasi*

### **b. Investasi**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang, ditujukan dalam rangka manajemen kas, dan beresiko rendah atau bebas dari perubahan atau pengurangan harga yang signifikan. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

#### **(i) Investasi Non Permanen**

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya, investasi dalam bentuk dana bergulir, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi non permanen lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi:

- Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan melalui *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) dan dana dalam negeri dalam bentuk Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang dipinjamkan kepada BUMN/BUMD dan Pemda.
- Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman

Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR, dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- . Dana pemerintah yang ditanamkan dalam bentuk surat berharga pada BUMN terjadi dalam rangka penyelamatan perekonomian.

(ii) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Hukum Milik Negara (BHMN). PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN.

PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.

Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

**Aset Tetap**

**c. Aset Tetap**

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh Pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Kementerian Keuangan per 31 Desember 2010 berdasarkan harga perolehan.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

- a.) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan
- b.) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi

tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2004 disajikan berdasarkan hasil penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Terhadap aset tetap per 31 Desember 2004 yang belum dilakukan penilaian disajikan dengan harga perolehan.

Berdasarkan Buletin Teknis 09 tentang akuntansi aset tetap menyatakan bahwa pengakuan aset tetap renovasi yang telah selesai pada akhir periode pelaporan harus segera diserahterimakan kepada satker kuasa pengguna barang. Apabila sampai dengan akhir periode pelaporan dokumen sumber penyerahan telah diterbitkan atau aset renovasi belum diserahkan, maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca dan Kementerian Keuangan selaku entitas pelaporan akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Aset Tetap Renovasi yang belum selesai pada akhir periode pelaporan maka Aset Tetap Renovasi tersebut dieliminasi dari neraca dan Kementerian Keuangan selaku entitas pelaporan akan mencatat dan menambahkannya sebagai Kontruksi Dalam Penggerjaan Aset Tetap terkait.

#### *Aset Lainnya*

##### **d. Aset Lainnya**

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, Dana Kelolaan BLU dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan dana moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Dana Kelolaan BLU adalah bagian dari dana yang disediakan pada PIP, yang sampai dengan tanggal pelaporan belum direalisasikan sebagai pinjaman kepada pihak lain atau belum diinvestasikan.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Di samping itu, piutang macet Kementerian Keuangan yang dialihkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

## Kewajiban

### (4) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

#### a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

#### b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

*Ekuitas Dana*

**(5) Ekuitas Dana**

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan merupakan akun lawan dari Dana Cadangan.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN (NETTO)

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Keuangan pada TA 2010 adalah sebesar **Rp723.531.430.596.043,00** atau **97,26** persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2010 sebesar **Rp743.914.748.104.240,00**.

Realisasi Belanja Negara Kementerian Keuangan pada TA 2010 adalah sebesar **Rp14.276.465.681.945,00** atau **92,75** persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN TA 2010 sebesar **Rp15.391.864.198.000,00**.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2010 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

**Tabel 3**  
**Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2010**  
**(dalam rupiah)**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah	743.914.748.104.240	723.531.430.596.043	97,26
	Penerimaan Perpajakan	743.325.906.000.000	722.544.159.296.194	97,20
	Penerimaan Negara Bukan Pajak	588.842.104.240	987.271.299.849	167,66
2	Realisasi Belanja Negara	15.391.864.198.000	14.276.465.681.945	92,75
	Belanja Rupiah Murni	14.878.568.057.000	14.137.374.903.142	95,02
	Belanja Pinjaman dan Hibah LN	513.296.141.000	139.090.778.803	27,10

### B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (BRUTO)

#### B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi  
Pendapatan Negara  
dan Hibah TA 2010  
Rp764.237.829.758.  
441,00*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Keuangan pada TA 2010 adalah sebesar **Rp764.237.829.758.441,00** atau **102,73** persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2010 sebesar **Rp743.914.748.104.240,00**. Dibandingkan dengan TA 2009, realisasi pendapatan TA 2010 mengalami kenaikan sebesar **Rp111.590.792.899.827,00** atau **17,10** persen. Kenaikan ini berasal dari Penerimaan Perpajakan sebesar **Rp111.820.133.642.254,00**.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2010 dapat dilihat pada Tabel 4 dan Grafik 1 berikut.

**Tabel 4**  
**Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2010**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	Estimasi	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Netto	%
Penerimaan Perpajakan	743.325.906.000.000	763.250.365.531.763	40.706.206.235.569	722.544.159.296.194	102,68
Penerimaan Negara Bukan Pajak	588.842.104.240	987.464.226.678	192.926.829	987.271.299.849	167,70
Jumlah	743.914.748.104.240	764.237.829.758.441	40.706.399.162.398	723.531.430.596.043	102,73



Perbandingan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2010 dan TA 2009 dapat dilihat pada Tabel 5.

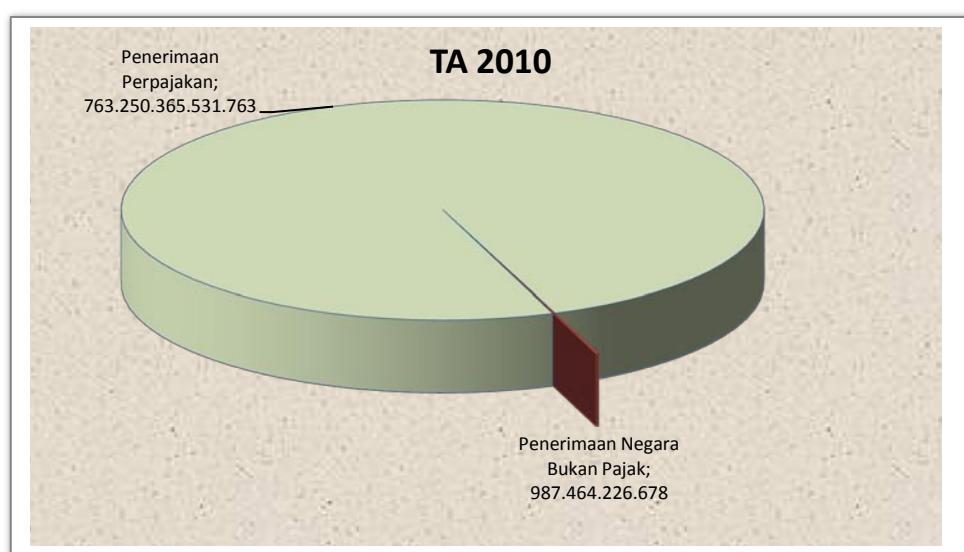
**Tabel 5**  
**Perbandingan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2010 dan 2009**  
(dalam rupiah)

Uraian	TA 2010	TA 2009	Kenaikan/(Penurunan)	%
Penerimaan Perpajakan	763.250.365.531.763	651.430.231.889.509	111.820.133.642.254	17,17
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	733.773.231.080.969	632.135.968.398.435	101.637.262.682.534	16,08
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	29.477.134.450.794	19.294.263.491.074	10.182.870.959.720	52,78
Penerimaan Negara Bukan Pajak	987.464.226.678	1.216.804.969.105	(229.340.742.427)	(18,85)
Jumlah	764.237.829.758.441	652.647.036.858.614	111.590.792.899.827	17,10

*Komposisi Realisasi Pendapatan*

Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2010 dapat dilihat pada Grafik 2 berikut.

**Grafik 2**  
**Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2010**



### B.2.1.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Per Unit Eselon I

Realisasi pendapatan per unit eselon I lingkup Kementerian Keuangan dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.

**Tabel 6**  
**Realisasi Pendapatan Per Unit Eselon I TA 2010**  
**(dalam rupiah)**

No.	Eselon I	Estimasi	Realisasi	%
1	SETJEN	237.375.022.000	415.752.233.550	175,15
2	ITJEN	90.000.000	161.981.008	179,98
3	DJA	0	133.530.975	0,00
4	DJP	661.504.155.660.295	667.612.639.469.364	100,92
5	DJBC	82.000.648.414.000	95.920.277.966.861	116,98
6	DJPK	0	366.345.425	0,00
7	DJPU	0	30.394.135	0,00
8	DJPB	1.846.011.945	6.113.004.047	331,15
9	DJKN	111.753.496.000	183.291.874.933	164,01
10	BAPEPAM-LK	40.004.000.000	74.178.888.729	185,43
11	BPPK	18.875.500.000	24.552.718.377	130,08
12	BKF	0	331.351.037	0,00
	JUMLAH	<b>743.914.748.104.240</b>	<b>764.237.829.758.441</b>	<b>102,73</b>

Perbandingan realisasi pendapatan per unit eselon I TA 2010 dan 2009 dapat dilihat pada Tabel 7 berikut.

**Tabel 7**  
**Perbandingan Realisasi Pendapatan Per Unit Eselon I TA 2010 dan 2009**  
**(dalam rupiah)**

NO.	ESELON I	TA 2010	TA 2009	Kenaikan/(Penurunan)	%
1	SETJEN	415.752.233.550	546.601.377.460	(130.849.143.910)	(23,94)
2	ITJEN	161.981.008	76.263.755	85.717.253	112,40
3	DJA	133.530.975	335.053.415	(201.522.440)	(60,15)
4	DJP	667.612.639.469.364	575.441.606.530.389	92.171.032.938.975	16,02
5	DJBC	95.920.277.966.861	76.231.330.238.126	19.688.947.728.735	25,83
6	DJPK	366.345.425	89.197.009	277.148.416	310,71
7	DJPU	30.394.135	12.639.446	17.754.689	140,47
8	DJPB	6.113.004.047	225.923.950.553	(219.810.946.506)	(97,29)
9	DJKN	183.291.874.933	119.437.344.530	63.854.530.403	53,46
10	BAPEPAM-LK	74.178.888.729	63.527.078.783	10.651.809.946	16,77
11	BPPK	24.552.718.377	17.883.052.567	6.669.665.810	37,30
12	BKF	331.351.037	214.132.581	117.218.456	54,74
	JUMLAH	<b>764.237.829.758.441</b>	<b>652.647.036.858.614</b>	<b>111.590.792.899.827</b>	<b>17,10</b>

### B.2.1.2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Per Jenis Penerimaan

Pendapatan Kementerian Keuangan terdiri dari (1) Penerimaan Perpajakan; dan (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Komposisi realisasi pendapatan TA 2010 dapat dilihat pada Tabel 8 berikut.

**Tabel 8**  
**Realisasi Pendapatan Per Jenis Penerimaan TA 2010**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Penerimaan Perpjakan	743.325.906.000.000	763.250.365.531.763	102,68
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	720.764.533.000.000	733.773.231.080.969	101,80
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	22.561.373.000.000	29.477.134.450.794	130,65
Penerimaan Negara Bukan Pajak	588.842.104.240	987.464.226.678	167,70
Jumlah	743.914.748.104.240	764.237.829.758.441	102,73

Perbandingan realisasi pendapatan per jenis penerimaan TA 2010 dan 2009 dapat dilihat pada Tabel 9 berikut.

**Tabel 9**  
**Perbandingan Realisasi Pendapatan Per Jenis Penerimaan TA 2010 dan 2009**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	TA 2010	TA 2009	Kenaikan/(Penurunan)	%
Penerimaan Perpjakan	763.250.365.531.763	651.430.231.889.509	111.820.133.642.254	17,17
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	733.773.231.080.969	632.135.968.398.435	101.637.262.682.534	16,08
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	29.477.134.450.794	19.294.263.491.074	10.182.870.959.720	52,78
Penerimaan Negara Bukan Pajak	987.464.226.678	1.216.804.969.105	(229.340.742.427)	(18,85)
Jumlah	764.237.829.758.441	652.647.036.858.614	111.590.792.899.827	17,10

*Realisasi  
Penerimaan  
Perpjakan  
Rp763.250.365.531.  
763,00*

#### B.2.1.2.1. Penerimaan Perpjakan

Penerimaan Perpjakan berasal dari Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. Realisasi Penerimaan Perpjakan TA 2010 adalah sebesar **Rp763.250.365.531.763,00** atau **102,68** persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2010 sebesar **Rp743.325.906.000.000,00**. Realisasi Penerimaan Perpjakan TA 2010 mengalami kenaikan sebesar **Rp111.820.133.642.254,00** atau **17,17** persen dari realisasi Penerimaan Perpjakan TA 2009. Kenaikan Penerimaan Perpjakan terutama terjadi pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar **Rp42.475.781.225.303,00**, Pajak Penghasilan (PPh) sebesar **Rp42.853.674.116.417,00**, Pendapatan Cukai sebesar **Rp 9.465.225.570.725,00**, dan Pendapatan Bea Keluar sebesar **Rp8.380.153.894.681,00**.

Realisasi Penerimaan Perpjakan per jenis penerimaan TA 2010 dapat dilihat pada Tabel 10 berikut.

**Tabel 10**  
**Realisasi Penerimaan Perpajakan Per Jenis Penerimaan TA 2010**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	Estimasi	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Netto	%
Penerimaan Perpajakan	743.325.906.000.000	763.250.365.531.763	40.706.206.235.569	722.544.159.296.194	102,68
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	720.764.533.000.000	733.773.231.080.969	40.143.890.012.173	693.629.341.068.796	101,80
Pendapatan PPh	362.219.020.000.000	370.271.004.036.003	13.436.235.101.134	356.834.768.934.869	102,22
Pendapatan PPN	262.962.992.000.000	256.625.594.430.927	26.573.530.758.781,00	230.052.063.672.146	97,59
Pendapatan PBB	25.319.148.000.001	28.596.227.374.901	15.261.194.396,00	28.580.966.180.505	112,94
Pendapatan BPHTB	7.155.525.000.000	8.051.639.534.905	24.871.140.517,00	8.026.768.394.388	112,52
Pendapatan Cukai	59.265.922.000.000	66.168.497.209.797	2.579.470.205,00	66.165.917.739.592	111,65
Pendapatan Pajak Lainnya	3.841.925.999.999	4.060.268.494.436	91.412.347.140,00	3.968.856.147.296	105,68
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	22.561.373.000.000	29.477.134.450.794	562.316.223.396	28.914.818.227.398	130,65
Pendapatan Bea Masuk	17.106.813.000.000	20.542.127.081.987	525.357.337.486,00	20.016.769.744.501	120,08
Pendapatan Bea Keluar	5.454.560.000.000	8.935.007.368.807	36.958.885.910,00	8.898.048.482.897	163,81

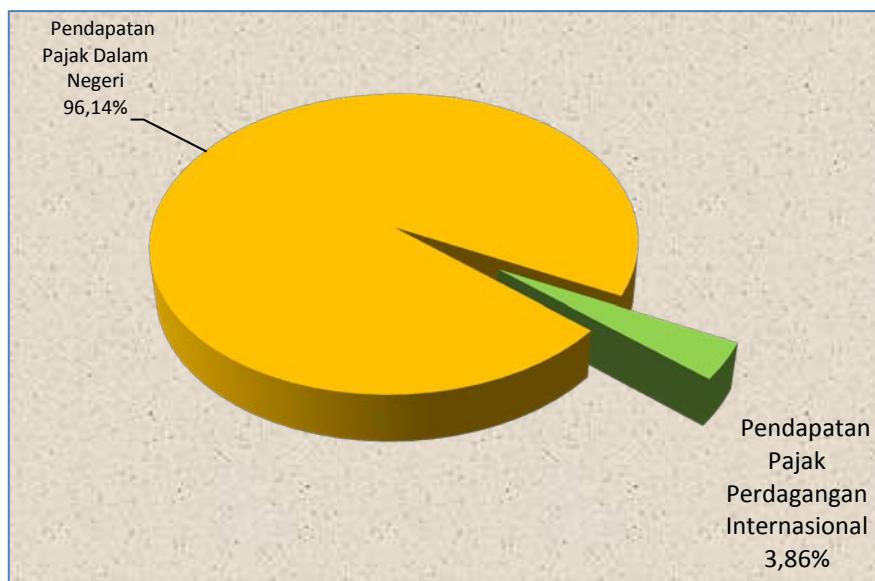
Perbandingan realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2010 dan 2009 per Jenis Penerimaan dapat dilihat pada Tabel 11 berikut.

**Tabel 11**  
**Perbandingan Realisasi Penerimaan Perpajakan Per Jenis Penerimaan**  
**TA 2010 dan 2009**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	TA 2010	TA 2009	Kenaikan/(Penurunan)	%
Penerimaan Perpajakan	763.250.365.531.763	651.430.231.889.509	111.820.133.642.254	17,17
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	733.773.231.080.969	632.135.968.398.435	101.637.262.682.534	16,08
Pendapatan PPh	370.271.004.036.003	327.417.329.919.586	42.853.674.116.417	13,09
Pendapatan PPN	256.625.594.430.927	214.149.813.205.624	42.475.781.225.303	19,83
Pendapatan PBB	28.596.227.374.901	24.206.935.651.561	4.389.291.723.340	18,13
Pendapatan BPHTB	8.051.639.534.905	6.482.715.490.740	1.568.924.044.165	24,20
Pendapatan Cukai	66.168.497.209.797	56.703.271.639.072	9.465.225.570.725	16,69
Pendapatan Pajak Lainnya	4.060.268.494.436	3.175.902.491.852	884.366.002.584	27,85
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	29.477.134.450.794	19.294.263.491.074	10.182.870.959.720	52,78
Pendapatan Bea Masuk	20.542.127.081.987	18.739.410.016.948	1.802.717.065.039	9,62
Pendapatan Bea Keluar	8.935.007.368.807	554.853.474.126	8.380.153.894.681	1.510,34

Komposisi realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2010 per jenis penerimaan dapat dilihat pada Grafik 3 berikut.

**Grafik 3**  
**Komposisi Realisasi Penerimaan Perpajakan Per Jenis Penerimaan TA 2010**



Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2010 adalah sebesar **Rp733.773.231.080.969,00** yang berarti mengalami kenaikan sebesar **Rp101.637.262.682.534,00** atau naik **16,08** persen dibanding realisasi TA 2009 yang besarnya **Rp632.135.968.398.435,00**.

Sedangkan Realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional TA 2010 adalah sebesar **Rp29.477.134.450.794,00**. Dibandingkan dengan TA 2009, realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional TA 2010 mengalami kenaikan sebesar **Rp10.182.870.959.720,00** atau **52,78** persen.

Dalam upaya meningkatkan Penerimaan Perpajakan, Pemerintah melaksanakan penyempurnaan administrasi perpajakan. Langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki administrasi perpajakan dalam mengatasi rendahnya rasio pajak dipengaruhi oleh (i) sistem perpajakan yang rumit dan kecenderungan terjadinya tumpang-tindih peraturan; (ii) tendensi wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya; (iii) dan kondisi perekonomian yang didominasi sektor informal. Upaya nyata yang telah dilakukan adalah perubahan UU perpajakan, yaitu UU No. 28/2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, agar pelaksanaan sistem perpajakan dapat lebih efektif dan efisien. Tercapainya prinsip-prinsip perpajakan yang sehat seperti persamaan, kesederhanaan, dan keadilan diharapkan mampu meningkatkan kapasitas fiskal dan merangsang perkembangan ekonomi makro yang lebih baik dengan menghapuskan hambatan berinvestasi.

Direktorat Jenderal Pajak dalam TA 2009 merencanakan reformasi perpajakan tahap ke dua yang juga disebut sebagai PINTAR (*Project for Indonesian Tax Administration Reform*). PINTAR merupakan *Project Assistance* pada Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai jangka waktu pelaksanaan 48 bulan (1 Januari 2009 – 1 Januari 2016). Estimasi Total Pendanaan PINTAR adalah sebesar USD 150 juta, terdiri dari Pendanaan Luar Negeri dan Dalam Negeri.

Sebagaimana GFMRAP (*Government Financial Management and Revenue*

*Administration Project*) Tahap I yang dititikberatkan pada *Public Financial Management*, dengan kegiatan utama dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. PINTAR merupakan GFMRAP Tahap II yang difokuskan pada administrasi perpajakan dan dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Pajak.

*Pemindahbukuan  
(Pbk) Penerimaan  
Pajak*

Untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak yang menghendaki pembayaran pajaknya melalui perhitungan dengan kelebihan pembayaran pajak dan/atau bunga yang diterima dan/atau melalui perhitungan dengan setoran pajak yang lain, Kementerian Keuangan mengatur tata cara pembayaran pajak melalui pemindahbukuan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 88/KMK.04/1991 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Melalui Pemindahbukuan, Pemindahbukuan meliputi:

- a. Pemindahbukuan karena adanya kelebihan pembayaran pajak atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang berdasarkan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak atau surat keputusan lainnya yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran pajak.
- b. Pemindahbukuan karena adanya pemberian bunga kepada Wajib Pajak akibat kelambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- c. Pemindahbukuan karena diperolehnya kejelasan Surat Setoran Pajak (SSP) yang semula diadministrasikan dalam Bermacam-macam Penerimaan Pajak (BPP).
- d. Pemindahbukuan karena salah mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak lain.
- e. Pemindahbukuan karena adanya pemecahan setoran pajak yang berasal dari Surat Setoran Pajak.
- f. Pemindahbukuan karena adanya pelimpahan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangka impor atas dasar inden sebelum berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.04/ 1990 tentang Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah untuk kegiatan usaha di bidang impor atas dasar inden.

Pemindahbukuan yang terjadi selama TA 2010 adalah sebesar Rp2.284.335.163.103,00. Nilai tersebut merupakan pemindahbukuan yang disebabkan oleh perubahan Mata Anggaran Pendapatan (MAP) dan bukan merupakan pelunasan tunggakan pajak. Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud belum terakomodasi dalam nilai Penerimaan Perpajakan dalam Laporan Keuangan dikarenakan belum adanya Peraturan dalam Pedoman Induk Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi Pajak (TUPRP) yang mengatur pemindahbukuan berdasarkan data MPN. Perubahan terhadap TUPRP (saat ini masih mengacu pada KEP - 11/PJ./1994) masih dalam proses pembahasan.

#### B.2.1.2.1.1. Pendapatan Pajak Dalam Negeri

*Realisasi  
Pendapatan Pajak  
Dalam Negeri  
Rp733.773.231.080.969,00*

Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2010 adalah sebesar Rp733.773.231.080.969,00 atau 101,80 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2010 sebesar Rp720.764.533.000.000,00. Hal ini berarti Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp101.637.262.682.534,00 atau

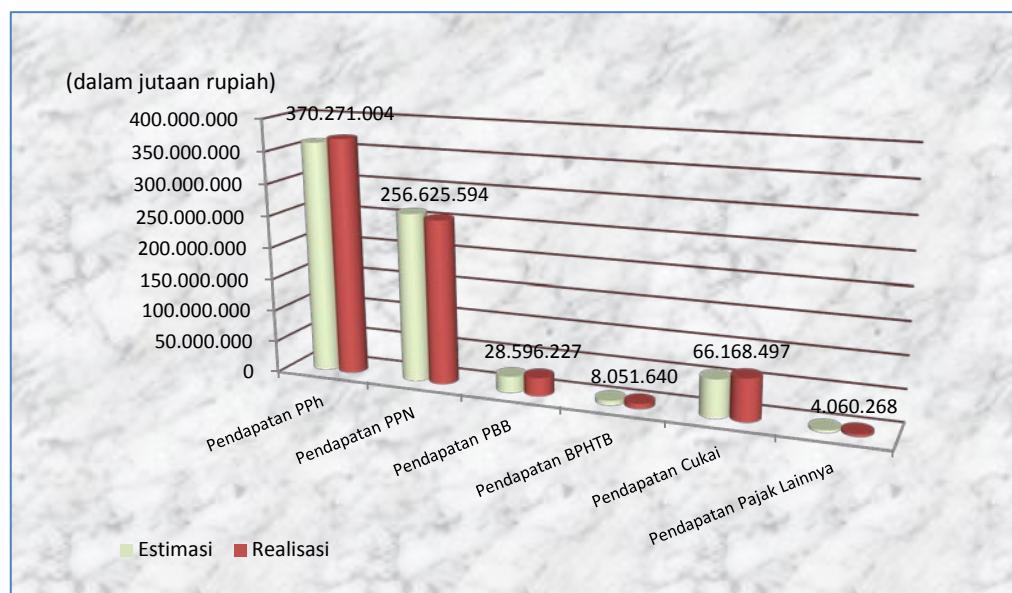
naik **16,08** persen dari realisasi TA 2009.

Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2010 dapat dilihat pada Tabel 12 dan Grafik 4 berikut.

**Tabel 12**  
**Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2010**  
(dalam rupiah)

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	720.764.533.000.000	733.773.231.080.969	101,80
Pendapatan PPh	362.219.020.000.000	370.271.004.036.003	102,22
Pendapatan PPN	262.962.992.000.000	256.625.594.430.927	97,59
Pendapatan PBB	25.319.148.000.001	28.596.227.374.901	112,94
Pendapatan BPHTB	7.155.525.000.000	8.051.639.534.905	112,52
Pendapatan Cukai	59.265.922.000.000	66.168.497.209.797	111,65
Pendapatan Pajak Lainnya	3.841.925.999.999	4.060.268.494.436	105,68

**Grafik 4**  
**Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2010**

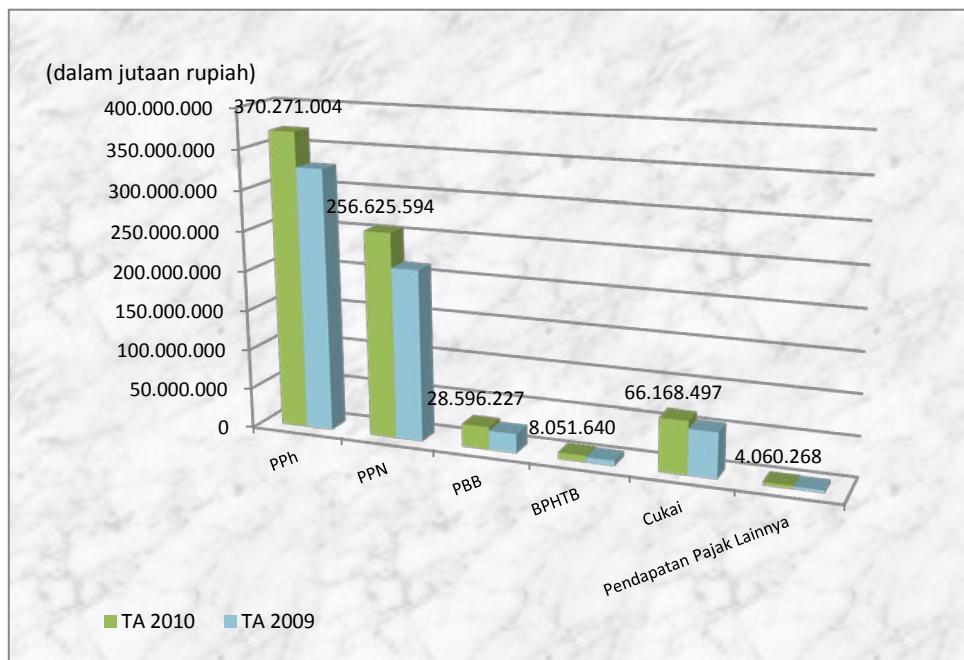


Perbandingan realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2010 dan 2009 dapat dilihat pada Tabel 13 dan Grafik 5 berikut.

**Tabel 13**  
**Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri**  
**TA 2010 dan 2009**  
**(dalam rupiah)**

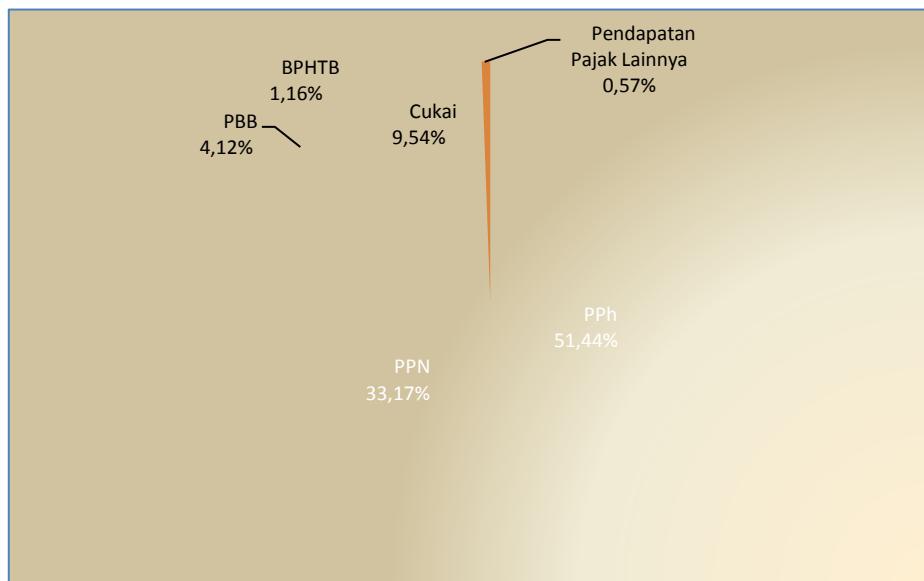
Uraian	TA 2010	TA 2009	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	733.773.231.080.969	632.135.968.398.435	101.637.262.682.534	16,08
PPH	370.271.004.036.003	327.417.329.919.586	42.853.674.116.417	13,09
PPN	256.625.594.430.927	214.149.813.205.624	42.475.781.225.303	19,83
PBB	28.596.227.374.901	24.206.935.651.561	4.389.291.723.340	18,13
BPHTB	8.051.639.534.905	6.482.715.490.740	1.568.924.044.165	24,20
Cukai	66.168.497.209.797	56.703.271.639.072	9.465.225.570.725	16,69
Pendapatan Pajak Lainnya	4.060.268.494.436	3.175.902.491.852	884.366.002.584	27,85

**Grafik 5**  
**Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2010 dan 2009**



Komposisi Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2010 dapat dilihat pada Grafik 6 berikut.

**Grafik 6**  
**Komposisi Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2010**



Kenaikan Pendapatan Pajak Dalam Negeri merupakan salah satu capaian positif dari upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk selalu meningkatkan Penerimaan Perpajakan, baik melalui penyempurnaan administrasi perpajakan maupun reformasi perpajakan.

*Pajak Ditanggung  
Pemerintah (DTP)*

Berdasarkan Undang-Undang APBN Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 terdapat anggaran untuk Pajak Ditanggung Pemerintah sebesar Rp17.928.154.483.526,00. Realisasi Pajak DTP TA 2010 sebesar Rp14.817.135.656.211,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pajak Penghasilan dengan anggaran sebesar Rp3.290.423.962.000,00, terdapat realisasi Pendapatan Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dengan rincian sebagai berikut:
  1. PPh DTP atas penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang diterima atau diperoleh masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp191.656.627.804,00 berdasarkan PMK Nomor 239/PMK.011/2010;
  2. PPh DTP atas hasil pengusahaan sumber daya bumi untuk pembangkitan energi/listrik Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp624.250.000.000,00 berdasarkan PMK Nomor 35/PMK.011/2010;
  3. PPh DTP atas bunga atau imbalan Surat Berharga Negara yang diterbitkan di pasar internasional sebesar Rp2.000.000.000.000,00 berdasarkan PMK Nomor 226/PMK.011/2010; dan
  4. PPh DTP atas Piutang Pajak eks BPPN dan TVRI sebesar Rp461.073.962.863,00 berdasarkan PMK Nomor 240/PMK.011/2010;
- b. Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp12.637.730.521.526,00, dari anggaran tersebut terdapat realisasi Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah dengan rincian sebagai berikut:
  1. PPN DTP atas Subsidi Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Nabati, dan LPG

- Tabung Tiga Kilogram Bersubsidi Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp5.897.545.000.000,00 berdasarkan PMK Nomor 215/PMK.02/2010;
2. PPN DTP atas Pembayaran Kekurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak, LPG Tabung Tiga Kilogram, dan *Marketing Fee* PT Pertamina Persero pada tahun-tahun sebelumnya dan tahun berjalan sebesar Rp1.527.902.917.637,00 berdasarkan PMK Nomor 252/PMK/03/2010;
  3. PPN DTP atas impor barang untuk kegiatan usaha eksplorasi minyak dan gas bumi serta kegiatan eksplorasi panas bumi Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp1.457.726.880.227,00 berdasarkan PMK Nomor 24/PMK.011/2010;
  4. PPN DTP atas Piutang Pajak tertentu eks BPPN, TVRI, dan PT KAI sebesar Rp1.292.028.466.101,00 berdasarkan PMK Nomor 221/PMK.011/2010;
  5. PPN DTP atas transaksi Murabahah perbankan syariah sebesar Rp248.902.140.414,00 berdasarkan PMK Nomor 251/PMK.011/2010;
  6. PPN DTP atas penyerahan minyak goreng di dalam negeri dan atas impor dan/atau penyerahan gandum dan tepung gandum/terigu untuk realisasi yang melebihi APBN pada Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp851.800.000.000,00 berdasarkan PMK Nomor 253/PMK.011/2010;
  7. PPN DTP atas penyerahan minyak goreng kemasan sederhana di dalam negeri untuk Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp4.555.091.961,00 berdasarkan PMK Nomor 25/PMK.011/2010.
- c. Bea Masuk sebesar Rp2.000.000.000,00, dari anggaran tersebut terdapat realisasi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil) sebesar Rp2.061.591.716,00;
  2. Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP) sebesar Rp257.632.977.488,00.

Jika dibandingkan dengan TA 2009, Pendapatan Pajak Dalam Negeri mengalami kenaikan, diantaranya disebabkan oleh kenaikan Pendapatan PPN sebesar Rp5.619.702.913.479,00 atau 26,82 persen dan kenaikan Pendapatan PPh sebesar Rp3.696.194.443.788,00 atau 37,95 persen. Kenaikan Pendapatan PPN disebabkan oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah masing-masing sebesar 56,70 persen dan 9,1 persen pada tahun 2010. Sedangkan kenaikan Pendapatan PPh disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. meningkatnya impor TA 2010 senilai US\$ 135,61 miliar atau meningkat sebesar 40,05 persen dibandingkan TA 2009;
- b. peningkatan pembayaran masa di tahun 2010 seiring dengan tidak diwajibkannya lagi SPT Tahunan PPh Pasal 21;
- c. naiknya harga minyak dunia pada tahun 2010 sehingga menyebabkan naiknya PPh Pasal 22 Final Penebusan Migas;
- d. pertumbuhan sektor pengangkutan sebesar 13,50 persen yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan dari sektor jasa; dan
- e. meningkatnya pembayaran dividen kepada WP Luar Negeri sehingga menyebabkan PPh Pasal 26 mengalami pertumbuhan positif sebesar 25,15 persen.

Realisasi Pendapatan Cukai TA 2010 sebesar Rp66.168.102.279.797,00 juga mengalami kenaikan sebesar Rp9.464.830.640.725,00 atau 16,69 persen dari realisasi TA 2009.

Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang mulai berlaku 1 Januari 2010 dan adanya kenaikan tarif cukai etil alkohol serta tarif cukai MMEA yang berlaku mulai 1 April 2010. Disamping itu juga karena adanya *extra effort* dari DJBC dalam pemberantasan peredaran rokok dengan pita cukai palsu atau tanpa pita cukai serta upaya peningkatan efektivitas pemungutan cukai.

Pendapatan Cukai pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri atas Pendapatan Cukai yang terdiri dari Cukai Hasil Tembakau, Cukai Hasil Etil Alkohol (EA) dan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Pendapatan Cukai hingga saat ini masih merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting. Dalam tiga tahun terakhir ini pendapatan cukai mengalami peningkatan. Perkembangan pendapatan cukai juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan jumlah produksi barang kena cukai serta tarif dan Harga Jual Eceran (HJE) produk Hasil Tembakau. Faktor lain yang juga mempengaruhi kinerja pendapatan cukai adalah upaya peningkatan efektivitas pemungutan cukai.

Dalam upaya meningkatkan target penerimaan dari sektor cukai ditemukan kendala diantaranya dalam bentuk penyimpangan seperti pita cukai palsu, atau pita yang tidak sesuai peruntukannya. Untuk mengeliminasi penyimpangan tersebut, disamping dilakukan perubahan peraturan, juga dilakukan penegakan hukum terhadap pemakai jasa yang melanggar aturan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pita cukai ilegal.

*Realisasi  
Pengembalian  
Pendapatan Pajak  
Dalam Negeri  
Rp40.143.890.012.1  
73,00*

Realisasi Pengembalian Pendapatan Pajak Perdagangan Dalam Negeri TA 2010 adalah sebesar **Rp40.143.890.012.173,00**. Perbandingan Realisasi Pengembalian Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2010 dan 2009 dapat dilihat pada Tabel 14 berikut.

**Tabel 14**  
**Realisasi Pengembalian Pendapatan Pajak Dalam Negeri**  
**TA 2010 dan 2009**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	TA 2010	TA 2009	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	40.143.890.012.173	30.772.184.529.519	9.371.705.482.654	30,46
PPh	13.436.235.101.134	9.740.040.657.346	3.696.194.443.788	37,95
PPN	26.573.530.758.781	20.953.827.845.306	5.619.702.913.475	26,82
PBB	15.261.194.396	3.403.494.977	11.857.699.419	348,40
BPHTB	24.871.140.517	13.585.638.085	11.285.502.432	83,07
Cukai	2.579.470.205	1.478.446.919	1.101.023.286	74,47
Pendapatan Pajak Lainnya	91.412.347.140	59.848.446.886	31.563.900.254	52,74

### B.2.1.2.1.2. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

*Realisasi  
Pendapatan Pajak  
Perdagangan  
Internasional  
Rp29.477.497.134.4  
50.794,00*

Realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional TA 2010 adalah sebesar **Rp29.477.134.450.794,00** atau **130,65** persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2010 sebesar **Rp22.561.373.000.000,00**. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Bea Masuk **Rp20.542.127.081.987,00** atau **120,08** persen dari target yang ditetapkan dan Pendapatan Bea Keluar sebesar **Rp8.935.007.368.807,00** atau **163,81** persen dari target yang ditetapkan. Hal ini berarti Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional TA 2010 mengalami kenaikan sebesar **Rp10.182.870.959.720,00** atau **52,78** persen dari realisasi TA 2009. Besarnya realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional dapat dilihat pada Tabel 15 berikut.

**Tabel 15**  
**Realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional TA 2010**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	22.561.373.000.000	29.477.134.450.794	130,65
Pendapatan Bea Masuk	17.106.813.000.000	20.542.127.081.987	120,08
Pendapatan Bea Keluar	5.454.560.000.000	8.935.007.368.807	163,81

Perbandingan realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional TA 2010 dan 2009 dapat dilihat pada Tabel 16 berikut.

**Tabel 16**  
**Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional**  
**TA 2010 dan 2009**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	TA 2010	TA 2009	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	29.477.134.450.794	19.294.263.491.074	10.182.870.959.720	52,78
Pendapatan Bea Masuk	20.542.127.081.987	18.739.410.016.948	1.802.717.065.039	9,62
Pendapatan Bea Keluar	8.935.007.368.807	554.853.474.126	8.380.153.894.681	1.510,34

Realisasi Pendapatan Bea Masuk selama TA 2010 tercatat sebesar **Rp20.542.127.081.987,00** atau **120,08** persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2010 sebesar **Rp17.106.813.000.000,00**. Hal ini berarti Pendapatan Bea Masuk TA 2010 mengalami kenaikan sebesar **Rp1.802.717.065.039,00** atau **9,62** persen dari realisasi TA 2009.

Kenaikan Pendapatan Bea Masuk pada TA 2010 tersebut disebabkan oleh meningkatnya kegiatan impor karena mulai pulihnya kondisi perekonomian dalam negeri yang ditunjukkan dengan menguatnya nilai tukar rupiah dan meningkatnya transaksi impor-ekspor. Nilai *Dutiable Impor* selama TA 2010 sebesar USD 52.574 juta sedangkan pada TA 2009 sebesar USD 33.234 juta sehingga mengalami peningkatan sebesar 58,19%. Demikian pula nilai kurs rupiah rata-rata menguat 16,65% atau dari Rp11.057,20 pada TA 2009 menjadi Rp9.215,83 pada TA 2010.

Pendapatan Bea Masuk ditentukan oleh beberapa variabel antara lain: Nilai Devisa Bayar, Tarif Efektif Rata-rata dan Nilai Tukar Rupiah atau Kurs. Ketiga variabel tersebut

berbanding lurus terhadap peningkatan nilai Pendapatan Bea Masuk. Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi, diharapkan meningkatkan Devisa Bayar yang akan berdampak positif bagi peningkatan Pendapatan Bea Masuk. Namun demikian terdapat faktor-faktor lain yang dapat menimbulkan dampak penurunan terhadap penerimaan, yaitu antara lain: adanya komitmen perdagangan internasional, dimana Indonesia terikat perjanjian dengan negara-negara lain di bidang liberalisasi perdagangan. Kesepakatan seperti : ASEAN Free Trade Area ( AFTA), IJEPA dengan Jepang dan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA ), berdampak pada penurunan tarif, serta berbagai fasilitas perdagangan dan industri yang diberikan pemerintah dalam rangka mendorong peningkatan daya saing.

Variabel lain yang mempengaruhi Pendapatan Bea Masuk adalah Nilai tukar Rupiah/kurs terhadap US\$, yang menjadi salah satu variabel Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (NDPB). Faktor nilai tukar rupiah akan berpengaruh terhadap Pendapatan Bea Masuk, dimana nilai tukar rupiah yang tinggi cenderung meningkatkan Bea Masuk, namun disisi lain dapat mempengaruhi tingkat importasi, yang berdampak negatif terhadap tingkat penerimaan Bea Masuk. Terjadinya penurunan Tarif Efektif rata-rata dan nilai tukar Rupiah akan sangat berpengaruh terhadap tingkat Pendapatan Bea Masuk

Untuk Bea Masuk di Tanggung Pemerintah (BM DTP) terdapat estimasi sebesar Rp2.000.000.000.000,00 yang merupakan transaksi non kas dan tidak dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Bea dan Cukai. Sebagian besar realisasi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah terjadi pada akhir tahun 2010.

Realisasi Pendapatan Bea Keluar selama TA 2010 tercatat sebesar **Rp8.935.007.368.807,00** atau **163,81** persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2010 sebesar **Rp5.454.560.000.000,00**. Hal ini berarti Pendapatan Bea Keluar TA 2010 mengalami kenaikan sebesar **Rp8.380.153.894.681,00** atau **1.510,34** persen dari realisasi TA 2009.

Peningkatan ini disebabkan karena tarif bea keluar pada Triwulan I naik sebesar 3% dan pada Triwulan II naik 4.5%. Kenaikan tersebut dipicu oleh harga referensi komoditi CPO mengalami peningkatan pada Triwulan I sebesar \$782,61/ton dan pada Triwulan II sebesar \$ 825,21/ton. Demikian pula Harga Pungutan Ekspor (HPE) meningkat pada Triwulan I sebesar \$708/ton dan pada Triwulan II sebesar \$753,67/ton sehingga tarif Bea Keluar yang digunakan lebih tinggi. Di samping itu terhitung mulai April 2010 atas eksport biji kakao terkena bea keluar dengan tarif 10% dan harga pungutan eksportnya di atas \$ 2.750/ton.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, maka mulai tahun 2009 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertanggung jawab atas pemungutan Bea Keluar. Dasar pengenaan Bea Keluar adalah amanat dalam perubahan undang-undang tersebut, yang menyatakan bahwa terhadap barang eksport dapat dikenakan Bea Keluar. Bea Keluar menjadi penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sebagai pengganti Pungutan Ekspor yang selama ini merupakan penerimaan Direktorat Jenderal Anggaran.

Tujuan pengenaan Bea Keluar sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 antara lain adalah: untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri, melindungi kelestarian sumber daya alam, mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi eksport tertentu di pasaran internasional atau menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri. Dengan demikian, pengenaan Bea Keluar terhadap beberapa komoditi eksport tidak semata-mata ditujukan untuk menghimpun penerimaan negara tetapi ada tujuan lain sebagaimana disebutkan di

atas. Saat ini komoditi ekspor yang dikenakan Bea Keluar adalah ekspor komoditi CPO dan turunannya, kayu, kulit, rotan, dan biji kakao.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, penatausahaan Pendapatan Bea Keluar yang semula menjadi tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Anggaran, dialihkan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mulai TA 2009.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara yang Berasal dari Pengenaan Denda Administrasi atas Pengangkutan Barang Tertentu, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2009, pengelolaan Pendapatan Bea Keluar dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

*Realisasi Pengembalian Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Rp562.316.223.396,00*

Realisasi Pengembalian Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional TA 2010 adalah sebesar [Rp562.316.223.396,00](#). Perbandingan Realisasi Pengembalian Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional TA 2010 dan 2009 dapat dilihat pada Tabel 17 berikut.

**Tabel 17**  
**Perbandingan Realisasi Pengembalian Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional TA 2010 dan 2009**  
(dalam rupiah)

Uraian	TA 2010	TA 2009	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	562.316.223.396	608.220.950.555	(45.904.727.159)	(7,55)
Pendapatan Bea Masuk	525.357.337.486	606.467.204.953	(81.109.867.467)	(13,37)
Pendapatan Bea Keluar	36.958.885.910	1.753.745.602	35.205.140.308	2.007,43

#### B.2.1.2.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp987.464.226.678,00*

Penerimaan Negara Bukan Pajak berasal dari (i) Pendapatan PNBP Lainnya; dan (ii) Pendapatan Badan Layanan Umum. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2010 adalah sebesar [Rp987.464.226.678,00](#) atau [167,70](#) persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2010 sebesar [Rp588.842.104.240,00](#). Besarnya realisasi PNBP TA 2010 dapat dilihat dalam Tabel 18 berikut.

**Tabel 18**  
**Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2010**  
(dalam rupiah)

Uraian	Estimasi	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Netto	%
Pendapatan PNBP Lainnya	332.606.682.240	560.717.991.208	192.926.829	560.525.064.379	168,58
Pendapatan BLU	256.235.422.000	426.746.235.470	0,00	426.746.235.470	166,54
Jumlah	588.842.104.240	987.464.226.678	192.926.829	987.271.299.849	167,70

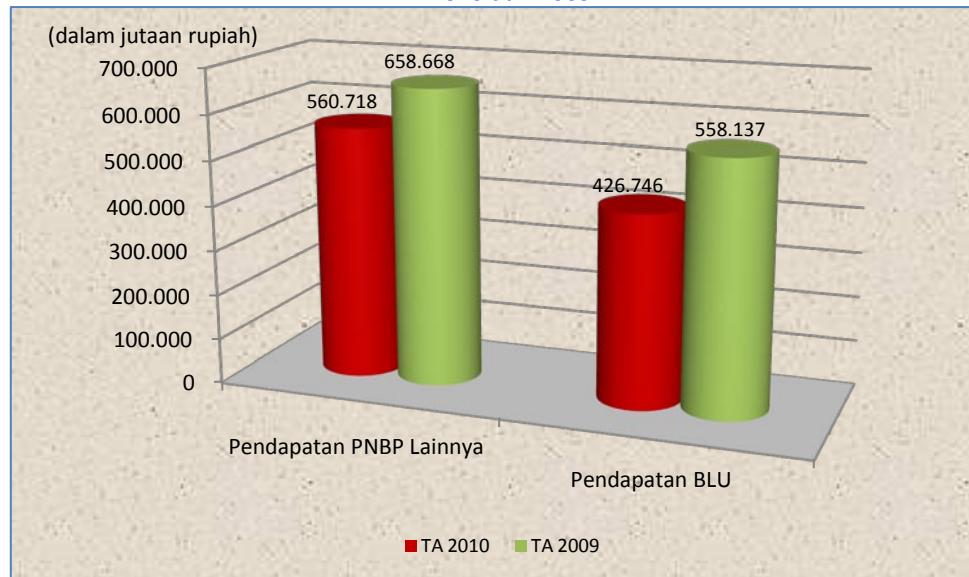
Apabila dibandingkan dengan TA 2009, PNBP TA 2010 mengalami penurunan sebesar [Rp229.340.742.427,00](#) atau [18,85](#) persen dari realisasi TA 2009. Penurunan PNBP ini terjadi pada pos-pos PNBP yaitu PNBP Lainnya mengalami penurunan sebesar [Rp97.950.122.940,00](#) atau [14,87](#) persen dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) mengalami penurunan sebesar [Rp131.390.619.487,00](#) atau [23,54](#) persen.

Perbandingan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2010 dan 2009 dapat dilihat pada Tabel 19 dan Grafik 7 berikut.

**Tabel 19**  
**Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak**  
**TA 2010 dan 2009**  
**(dalam rupiah)**

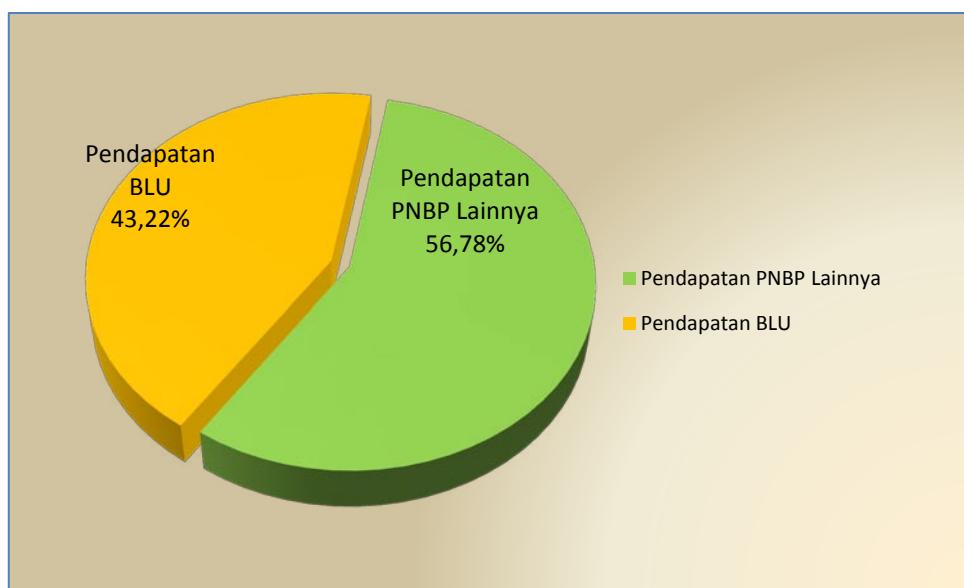
Uraian	TA 2010	TA 2009	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan PNBP Lainnya	560.717.991.208	658.668.114.148	(97.950.122.940)	(14,87)
Pendapatan BLU	426.746.235.470	558.136.854.957	(131.390.619.487)	(23,54)
Jumlah	987.464.226.678	1.216.804.969.105	(229.340.742.427)	(18,85)

**Grafik 7**  
**Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak**  
**TA 2010 dan 2009**



Komposisi realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2010 dapat dilihat pada Grafik 8 berikut.

**Grafik 8**  
**Komposisi Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2010**



#### B.2.1.2.2.1. Pendapatan PNBP Lainnya

Realisasi  
Pendapatan PNBP  
Lainnya  
Rp560.717.991.208,  
00

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2010 adalah sebesar [Rp560.717.991.208,00](#) atau [168,58](#) persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2010 yaitu sebesar [Rp332.606.682.240,00](#). Apabila dibandingkan dengan TA 2009, Pendapatan PNBP Lainnya TA 2010 mengalami penurunan sebesar [Rp97.950.122.940](#) atau [14,87](#) persen dari realisasi TA 2009. Besarnya realisasi Pendapatan PNBP Lainnya dapat dilihat pada Tabel 20 berikut.

**Tabel 20**  
**Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2010**  
(dalam rupiah)

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Pendapatan Penjualan dan Sewa	2.078.113.692	38.885.635.772	1.871,20
Pendapatan Jasa	288.273.130.264	416.383.040.771	144,44
Pendapatan Bunga	0	72.592.848	0,00
Pendapatan Pendidikan	0	194.991.000	0,00
Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	0	59.035.000	0,00
Pendapatan Iuran dan Denda	40.004.931.530	80.427.887.461	201,04
Pendapatan Lain-lain	2.250.506.754	24.694.808.356	1.097,30
Jumlah	332.606.682.240	560.717.991.208	168,58

Perbandingan realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2010 dan 2009 dapat dilihat pada Tabel 21 berikut.

**Tabel 21**  
**Perbandingan Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya**  
**TA 2010 dan 2009**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	TA 2010	TA 2009	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Penjualan dan Sewa	38.885.635.772	24.212.520.036	14.673.115.736	60,60
Pendapatan Jasa	416.383.040.771	558.619.429.613	(142.236.388.842)	(25,46)
Pendapatan Bunga	72.592.848	140.418.393	(67.825.545)	(48,30)
Pendapatan Pendidikan	194.991.000	146.880.000	48.111.000	32,76
Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	59.035.000	195.180.100	(136.145.100)	(69,75)
Pendapatan Iuran dan Denda	80.427.887.461	64.893.829.133	15.534.058.328	23,94
Pendapatan Lain-lain	24.694.808.356	10.459.856.873	14.234.951.483	136,09
Jumlah	560.717.991.208	658.668.114.148	(97.950.122.940)	(14,87)

Jika dibandingkan dengan TA 2009, terjadi penurunan realisasi Pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp97.950.122.940,00 atau 14,87%. Penurunan yang signifikan terutama terjadi pada Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan. Penurunan ini disebabkan oleh penerapan kebijakan atas *Treasury Notional Pooling (TNP)*, dimana pendapatan dari jasa lembaga keuangan (jasa giro) dari rekening bendahara pengeluaran dipotong langsung oleh pihak bank dan disetor ke rekening kas negara sebagai Pendapatan BUN. Selanjutnya pendapatan tersebut dibukukan pada BA 999.99 (BA-BUN Transaksi Khusus).

*Realisasi Pengembalian Pendapatan PNBP Lainnya  
Rp192.926.829,00*

Realisasi Pengembalian Pendapatan PNBP Lainnya TA 2010 adalah sebesar **Rp192.926.829,00**. Perbandingan Realisasi Pengembalian Pendapatan PNBP Lainnya TA 2010 dan 2009 dapat dilihat pada Tabel 22 berikut.

**Tabel 22**  
**Perbandingan Realisasi Pengembalian Pendapatan PNBP Lainnya**  
**TA 2010 dan 2009**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	TA 2010	TA 2009	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Penjualan dan Sewa	3.838.000	159.300	3.678.700	2.309,29
Pendapatan Jasa	184.417.089	14.139.174	170.277.915	1.204,30
Pendapatan Iuran dan Denda	4.426.000	0	4.426.000	0,00
Pendapatan Lain-lain	245.740	2.702.990	(2.457.250)	(90,91)
Jumlah	192.926.829	17.001.464	175.925.365	1.034,77

#### B.2.1.2.2.2. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

*Realisasi Pendapatan BLU  
Rp426.746.235.470,00*

Realisasi Pendapatan BLU TA 2010 adalah sebesar **Rp426.746.235.470,00** atau **166,54** persen dari target yang ditetapkan dalam DIPA TA 2010 yaitu sebesar **Rp256.235.422.000,00**. Apabila dibandingkan dengan TA 2009, Pendapatan BLU TA 2010 mengalami penurunan sebesar **Rp131.390.619.487,00** atau **23,54** persen dari realisasi TA 2009.

Rincian Realisasi Pendapatan BLU yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 23 berikut.

**Tabel 23**  
**Realisasi Pendapatan BLU TA 2010**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Pendapatan Jasa Layanan Umum	249.466.562.000	107.672.070.738	43,16
Pendapatan Hibah BLU	100.000.000	1.825.000	1,83
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	2.500.000.000	2.794.642.023	111,79
Pendapatan BLU Lainnya	4.168.860.000	316.277.697.709	7.586,67
Jumlah	256.235.422.000	426.746.235.470	166,54

Perbandingan realisasi Pendapatan BLU TA 2010 dan 2009 dapat dilihat pada Tabel 24 berikut.

**Tabel 24**  
**Perbandingan Realisasi Pendapatan BLU TA 2010 dan 2009**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	TA 2010	TA 2009	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Jasa Layanan Umum	107.672.070.738	173.932.393.282	(66.260.322.544)	(38,10)
Pendapatan Hibah BLU	1.825.000	300.000	1.525.000	508,33
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	2.794.642.023	5.114.850.125	(2.320.208.102)	(45,36)
Pendapatan BLU Lainnya	316.277.697.709	379.089.311.550	(62.811.613.841)	(16,57)
Jumlah	426.746.235.470	558.136.854.957	(131.390.619.487)	(23,54)

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2010 mencakup 2 (dua) unit satker Badan Layanan Umum (BLU), yaitu Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Realisasi Pendapatan BLU TA 2010, jika dibandingkan dengan TA 2009 mengalami penurunan sebesar Rp131.390.619.487,00 atau 23,54%. Hal ini disebabkan adanya penurunan Pendapatan Jasa Layanan Umum sebesar Rp66.260.322.544,00 atau 38,10% dan Pendapatan BLU Lainnya sebesar Rp62.811.613.841,00 atau 16,57%. Penurunan Pendapatan Jasa Layanan Umum tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pos Pendapatan Investasi. Pada tahun 2009 terdapat penjualan atas kepemilikan saham yang dimiliki PIP. Pendapatan Investasi yang berupa keuntungan penjualan saham sebesar Rp122.148.146.107,00, pendapatan instrumen jangka pendek sebesar Rp849.315.068,00, dan penerimaan dividen sebesar Rp5.030.132.790,00 yang diterima PIP pada tahun 2009 tidak terjadi lagi pada tahun 2010. Sedangkan penurunan Pendapatan BLU Lainnya terutama disebabkan oleh penurunan pos Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang dipicu oleh penurunan suku bunga deposito dari 12 persen menjadi 7 persen. Hal tersebut mempengaruhi penerimaan bunga deposito kurang dari 3 (tiga) bulan pada satker PIP sehingga mengalami penurunan, yaitu dari TA 2009 sebesar Rp375.393.339.757,00 menjadi sebesar Rp313.052.240.421,00 pada TA 2010.

Realisasi Pendapatan BLU berdasarkan satuan kerja dapat dilihat pada Tabel 25 berikut.

**Tabel 25**  
**Realisasi Pendapatan BLU TA 2010 Berdasarkan Satuan Kerja**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	237.370.422.000	404.151.063.215	170,26
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara	18.865.000.000	22.139.397.146	117,36
Jumlah	256.235.422.000	426.290.460.361	166,37

*Realisasi  
Pengembalian  
Pendapatan BLU  
Rp0,00*

Tidak terdapat Realisasi Pengembalian Pendapatan BLU TA 2010 dan 2009.

#### **B.2.1.3. Penerimaan Hibah**

*Realisasi  
Penerimaan Hibah  
Rp0,00*

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah, yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) mewakili Pemerintah dalam pencatatan Penerimaan Hibah adalah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, oleh karena itu dalam Laporan Keuangan Bagian Anggaran 015 ini tidak ada Penerimaan Hibah.

### B.2.2. BELANJA

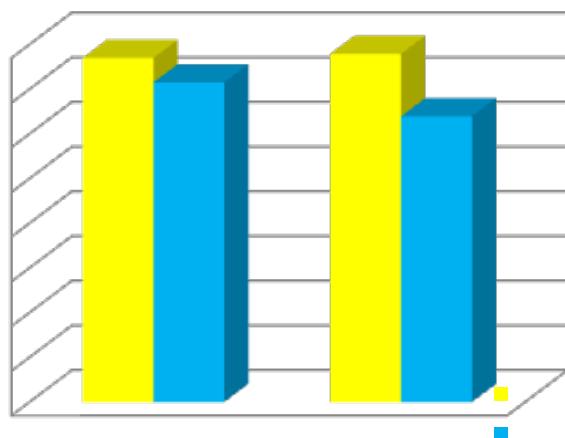
*Realisasi belanja  
Rp14.298.142.294.501,00*

Realisasi belanja Kementerian Keuangan pada TA 2010 adalah sebesar Rp14.298.142.294.501,00 atau 92,89 persen dari pagu belanja dalam DIPA sebesar Rp15.391.864.198.000,00. Dalam jumlah tersebut termasuk pembayaran imbalan bunga sebesar Rp1.321.487.211.977,00, apabila angka ini dikeluarkan maka realisasi belanja Kementerian Keuangan adalah sebesar Rp12.976.655.082.524,00 atau 84,31 persen dari pagu. Realisasi belanja TA 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp1.514.604.243.652,00 atau 11,85 persen dari realisasi belanja TA 2009 sebesar Rp12.783.538.050.849,00.

*Perbandingan  
Realisasi Belanja TA  
2010 dan 2009*

Perbandingan antara realisasi belanja TA 2010 dan 2009 dapat dilihat pada Grafik 9 berikut.

**Grafik 9**  
**Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Kementerian Keuangan**  
**TA 2010 dan 2009**  
**(dalam rupiah)**



URAIAN	TA 2010	TA 2009
PAGU	15.391.864.198.000	15.570.306.142.000
REALISASI	14.298.142.294.501	12.783.538.050.849

#### Realisasi Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Keuangan.

Belanja Kementerian Keuangan diklasifikasikan berdasarkan sumber dana, unit eselon I, fungsi, dan jenis belanja.

### B.2.2.1. Belanja Kementerian Keuangan Menurut Sumber Dana

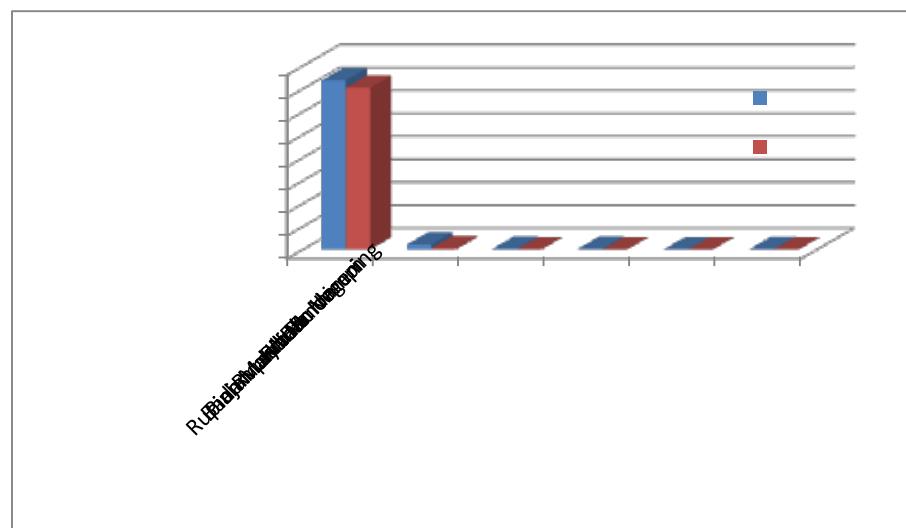
*Realisasi Belanja  
TA 2010 Menurut  
Sumber Dana*

Realisasi belanja Kementerian Keuangan TA 2010 sebesar Rp14.298.142.294.501,00 dapat dirinci menurut sumber dana sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 26 dan Grafik 10 berikut.

**Tabel 26**  
**Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja**  
**Menurut Sumber Dana TA 2010**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Rupiah Murni	14.734.156.035.000	14.103.048.872.509	95,72%
Pinjaman Luar Negeri	443.103.825.000	117.086.574.544	26,42%
Hibah	70.192.316.000	22.048.003.594	31,41%
Rupiah Murni Pendamping	76.612.087.000	15.761.531.660	20,57%
PNBP	23.000.000.000	14.528.041.907	63,17%
Badan Layanan Umum	44.799.935.000	25.669.270.287	57,30%
Jumlah	15.391.864.198.000	14.298.142.294.501	92,89%

**Grafik 10**  
**Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja**  
**Menurut Sumber Dana TA 2010**  
**(dalam rupiah)**



Perbandingan antara realisasi belanja TA 2010 dan 2009 menurut sumber dana dapat dilihat pada Tabel 27 berikut.

**Tabel 27**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana**  
**TA 2010 dan 2009**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	TA 2010	TA 2009	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Rupiah Murni	14.159.007.716.363	12.637.154.165.097	1.521.853.551.266	12,04%
Belanja Pinjaman Luar Negeri	117.086.574.544	103.767.988.877	13.318.585.667	12,83%
Belanja Hibah	22.048.003.594	42.615.896.875	(20.567.893.281)	-48,26%
Jumlah Belanja Bruto	<b>14.298.142.294.501</b>	<b>12.783.538.050.849</b>	<b>1.514.604.243.652</b>	<b>11,85%</b>
Pengembalian Belanja	21.676.612.556	21.166.175.358	510.437.198	2,41%
Jumlah Belanja Neto	<b>14.276.465.681.945</b>	<b>12.762.371.875.491</b>	<b>1.514.093.806.454</b>	<b>11,86%</b>

### B.2.2.2. Belanja Kementerian Keuangan Menurut Unit Eselon I

#### *Realisasi Belanja Per Eselon I*

Realisasi belanja Kementerian Keuangan TA 2010 dapat dirinci menurut unit eselon I sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 28. Tabel tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran terbesar adalah pada Setjen sebesar **Rp5.490.764.396.822,00** atau **38,40** persen dari total realisasi belanja Kementerian Keuangan. Berdasarkan daya serap realisasi TA 2010, penyerapan terbesar pada DJP sebesar **Rp4.319.005.999.039,00** atau **111,37** persen dari pagu belanja DJP. Dalam realisasi belanja DJP termasuk didalamnya pembayaran imbalan bunga sebesar **Rp1.321.487.211.977,00** yang tidak tersedia pagu anggarannya di dalam DIPA. Apabila imbalan bunga ini dikeluarkan maka realisasi belanja DJP adalah sebesar **Rp2.997.518.787.062,00** atau **77,29** persen dari pagu belanja DJP.

Perbandingan pagu dan realisasi belanja menurut unit eselon I dapat dilihat pada Tabel 28 berikut.

**Tabel 28**  
**Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja**  
**Menurut Unit Eselon I TA 2010**  
**(dalam rupiah)**

NO.	UNIT ESELON I	PAGU	REALISASI	%
1	SETJEN	6.113.697.757.000	5.490.764.396.822	89,81%
2	ITJEN	97.064.077.000	90.526.200.496	93,26%
3	DJA	102.518.069.000	95.625.189.671	93,28%
4	DJP	3.878.050.256.000	4.319.005.999.039	111,37%
5	DJBC	2.015.991.738.000	1.627.137.038.020	80,71%
4	DJKPK	125.124.773.000	106.318.595.888	84,97%
5	DJPU	218.191.511.000	184.206.507.790	84,42%
8	DJPB	1.467.351.709.000	1.262.943.812.132	86,07%
9	DJKN	630.610.593.000	498.025.099.926	78,98%
10	BAPEPAM-LK	167.406.721.000	145.798.248.519	87,09%
11	BPPK	447.312.821.000	367.952.325.609	82,26%
12	BKF	128.544.173.000	109.838.880.589	85,45%
	<b>Jumlah</b>	<b>15.391.864.198.000</b>	<b>14.298.142.294.501</b>	<b>92,89%</b>

Perbandingan antara realisasi belanja per unit eselon I TA 2010 dan 2009 dapat dilihat pada Tabel 29 berikut.

**Tabel 29**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Unit Eselon I**  
**TA 2010 dan 2009**  
**(dalam rupiah)**

NO.	UNIT ESELON I	TA 2010	TA 2009	Naik/Turun	%
1	SETJEN	5.490.764.396.822	5.025.497.356.662	465.267.040.160	9,26%
2	ITJEN	90.526.200.496	71.996.237.423	18.529.963.073	25,74%
3	DJA	95.625.189.671	76.754.736.517	18.870.453.154	24,59%
4	DJP	4.319.005.999.039	4.049.869.635.177	269.136.363.862	6,65%
5	DJBC	1.627.137.038.020	1.460.663.550.091	166.473.487.929	11,40%
4	DJPK	106.318.595.888	81.782.622.110	24.535.973.778	30,00%
5	DJPU	184.206.507.790	71.893.535.774	112.312.972.016	156,22%
8	DJPB	1.262.943.812.132	984.639.419.841	278.304.392.291	28,26%
9	DJKN	498.025.099.926	417.000.207.812	81.024.892.114	19,43%
10	BAPEPAM-LK	145.798.248.519	134.210.798.408	11.587.450.111	8,63%
11	BPPK	367.952.325.609	304.207.967.207	63.744.358.402	20,95%
12	BKF	109.838.880.589	105.021.983.827	4.816.896.762	4,59%
<b>Jumlah</b>		<b>14.298.142.294.501</b>	<b>12.783.538.050.849</b>	<b>1.514.604.243.652</b>	<b>11,85%</b>
Pengembalian Belanja		21.676.612.556	21.166.175.358	510.437.198	2,41%
<b>Jumlah Belanja Neto</b>		<b>14.276.465.681.945</b>	<b>12.762.371.875.491</b>	<b>1.514.093.806.454</b>	<b>11,86%</b>

### B.2.2.3. Belanja Kementerian Keuangan Menurut Fungsi

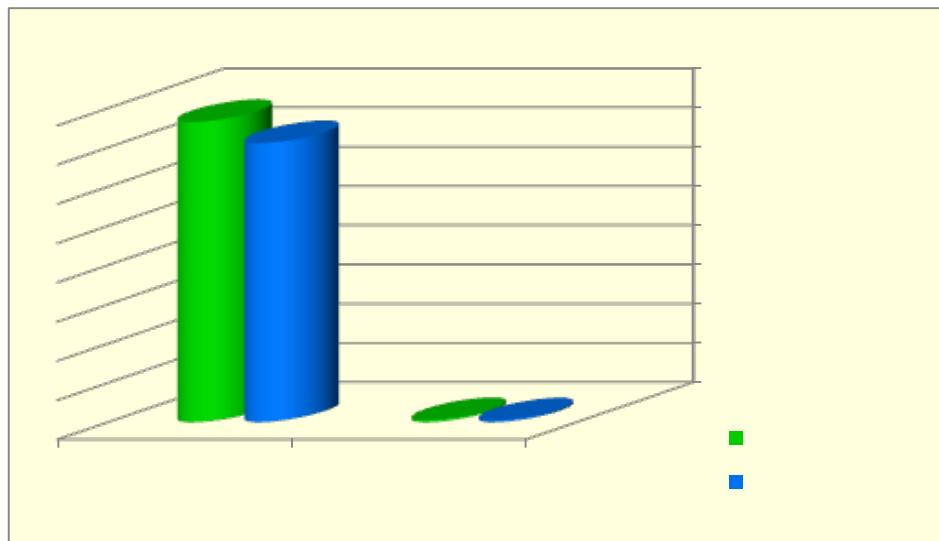
*Realisasi Belanja  
TA 2010 Menurut  
Fungsi*

Belanja Kementerian Keuangan juga dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi. Perbandingan pagu dan realisasi belanja Kementerian Keuangan menurut Fungsi pada TA 2010 dapat dilihat pada Tabel 30 dan Grafik 11 berikut.

**Tabel 30**  
**Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja**  
**Menurut Fungsi TA 2010**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Pelayanan Umum	15.294.272.225.000	14.214.825.645.261	92,94%
Pendidikan	97.591.973.000	83.316.649.240	85,37%
<b>Jumlah</b>	<b>15.391.864.198.000</b>	<b>14.298.142.294.501</b>	<b>92,89%</b>

**Grafik 11**  
**Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja**  
**Menurut Fungsi TA 2010**  
**(dalam rupiah)**



Perkembangan realisasi belanja berdasarkan fungsi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 31 berikut.

**Tabel 31**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Fungsi**  
**TA 2010 dan 2009**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	TA 2010	TA 2009	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pelayanan Umum	14.214.825.645.261	12.733.372.318.525	1.481.453.326.736	11,63%
Pendidikan	83.316.649.240	50.165.732.324	33.150.916.916	66,08%
<b>Jumlah Belanja Bruto</b>	<b>14.298.142.294.501</b>	<b>12.783.538.050.849</b>	<b>1.514.604.243.652</b>	<b>11,85%</b>
Pengembalian Belanja	21.676.612.556	21.166.175.358	510.437.198	2,41%
<b>Jumlah Belanja Neto</b>	<b>14.276.465.681.945</b>	<b>12.762.371.875.491</b>	<b>1.514.093.806.454</b>	<b>11,86%</b>

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi belanja Kementerian Keuangan TA 2010 menurut fungsi yang terbesar digunakan untuk Fungsi Pelayanan Umum yaitu sebesar **Rp14.214.825.645.261,00** atau **92,94** persen dari total realisasi belanja Kementerian Keuangan.

#### B.2.2.4. Belanja Kementerian Keuangan Menurut Jenis Belanja

*Realisasi Belanja  
TA 2010 Menurut  
Jenis Belanja*

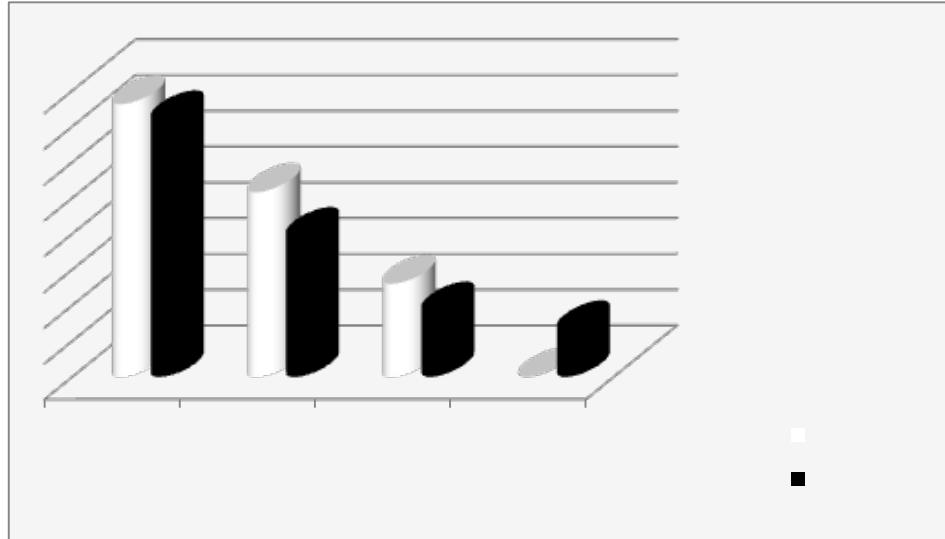
Belanja Kementerian Keuangan menurut jenis belanja terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Pembayaran Bunga Utang. Perbandingan pagu dan realisasi belanja menurut jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 32 dan Grafik 12 berikut.

**Tabel 32**  
**Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja**  
**Menurut Jenis Belanja TA 2010**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	7.626.567.848.000	7.194.523.880.093	94,34%
Belanja Barang	5.161.993.559.000	3.931.936.721.184	76,17%
Belanja Modal	2.603.302.791.000	1.850.194.481.247	71,07%
Pembayaran Bunga Utang (SPM-IB)	0	1.321.487.211.977	0,00%
<b>Jumlah</b>	<b>15.391.864.198.000</b>	<b>14.298.142.294.501</b>	<b>92,89%</b>

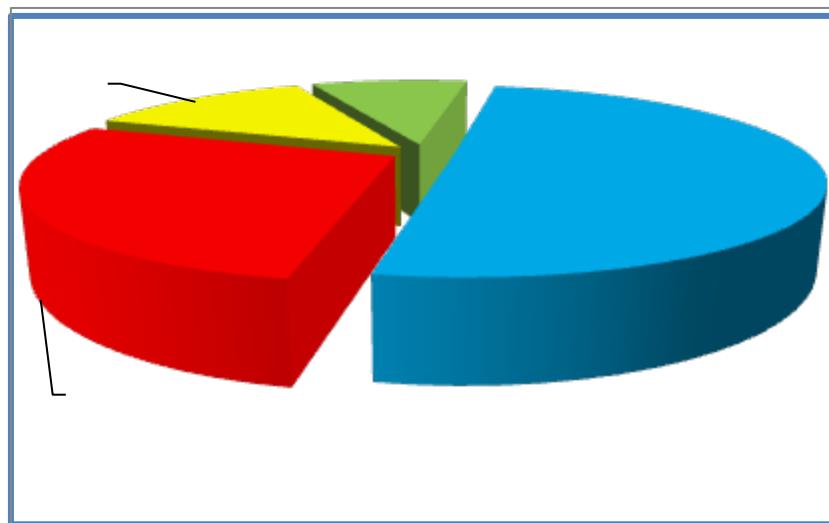
Perbandingan pagu dan realisasi belanja berdasarkan jenis belanja untuk TA 2010 dapat dilihat pada Grafik 12 berikut.

**Grafik 12**  
**Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja**  
**Menurut Jenis Belanja TA 2010**  
**(dalam rupiah)**



Komposisi realisasi belanja berdasarkan jenis belanja untuk TA 2010 juga dapat dilihat pada Grafik 13 berikut.

**Grafik 13  
Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2010**



Perbandingan realisasi belanja Kementerian Keuangan menurut jenis belanja TA 2010 dan 2009 dapat dilihat pada Tabel 33 berikut.

**Tabel 33  
Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2010 dan TA 2009  
(dalam rupiah)**

Uraian	TA 2010	TA 2009	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Pegawai	7.194.523.880.093	6.764.641.048.088	429.882.832.005	6,35%
Belanja Barang	3.931.936.721.184	3.246.817.364.325	685.119.356.859	21,10%
Belanja Modal	1.850.194.481.247	1.714.965.703.253	135.228.777.994	7,89%
Pembayaran Bunga Utang (SPM-IB)	1.321.487.211.977	1.057.113.935.183	264.373.276.794	25,01%
<b>Jumlah Belanja Bruto</b>	<b>14.298.142.294.501</b>	<b>12.783.538.050.849</b>	<b>1.514.604.243.652</b>	<b>11,85%</b>
Pengembalian Belanja	21.676.612.556	21.166.175.358	510.437.198	2,41%
<b>Jumlah Belanja Neto</b>	<b>14.276.465.681.945</b>	<b>12.762.371.875.491</b>	<b>1.514.093.806.454</b>	<b>11,86%</b>

#### B.2.2.4.1. Belanja Pegawai

*Realisasi Belanja Pegawai Rp7.194.523.880.093,00*

Realisasi Belanja Pegawai TA 2010 adalah sebesar **Rp7.194.523.880.093,00** yang berarti **94,34** persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2010 sebesar **Rp7.626.567.848.000,00**. Apabila dibandingkan dengan TA 2009, realisasi Belanja Pegawai TA 2010 mengalami kenaikan sebesar **Rp.429.882.832.005,00** atau **6,35** persen dari TA 2009.

Perbandingan pagu dan realisasi Belanja Pegawai TA 2010 dapat dilihat pada Tabel 34 berikut.

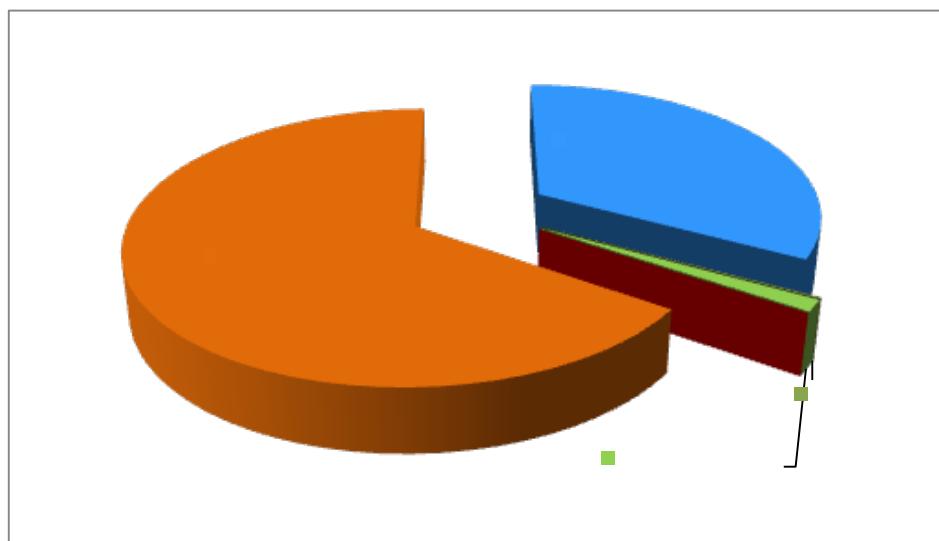
**Tabel 34**  
**Perbandingan Pagu dan Realisasi**  
**Belanja Pegawai TA 2010**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.402.079.315.000	2.373.350.859.684	98,80%
B. Gaji dan Tunj. Peg. Non PNS	0	0	0,00%
Belanja Honorarium	7.786.615.000	7.080.310.000	90,93%
Belanja Lembur	128.317.652.000	97.623.457.150	76,08%
Belanja Vakasi	0	0	0,00%
B. Tunj. Khusus & B. Peg. Transito	5.088.384.266.000	4.716.469.253.259	92,69%
Belanja Pegawai BLU	0	0	0,00%
<b>Jumlah</b>	<b>7.626.567.848.000</b>	<b>7.194.523.880.093</b>	<b>94,34%</b>

Realisasi Belanja Pegawai BLU nihil karena gaji masih dibayar oleh satuan kerja asal pegawai BLU.

Komposisi realisasi Belanja Pegawai TA 2010 dapat dilihat pada Grafik 14 berikut.

**Grafik 14**  
**Komposisi Realisasi Belanja Pegawai TA 2010**



Perbandingan antara realisasi Belanja Pegawai TA 2010 dan 2009 dapat dilihat pada Tabel 35 berikut.

**Tabel 35**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2010 dan 2009**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	TA 2010	TA 2009	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Gaji & Tunjangan PNS	2.373.350.859.684	2.188.220.785.791	185.130.073.893	8,46%
B. Gaji dan Tunj. Peg. Non PNS	0	0	0	0,00%
Belanja Honorarium	7.080.310.000	6.893.650.000	186.660.000	2,71%
Belanja Lembur	97.623.457.150	76.810.459.290	20.812.997.860	27,10%
Belanja Vakasi	0	0	0	0,00%
B. Tunj. Khusus & Peg. Transito	4.716.469.253.259	4.492.716.153.007	223.753.100.252	4,98%
Belanja Pegawai BLU	0	0	0	0,00%
<b>Jumlah Belanja Buro</b>	<b>7.194.523.880.093</b>	<b>6.764.641.048.088</b>	<b>429.882.832.005</b>	<b>6,35%</b>
Pengembalian Belanja	21.676.612.556	21.166.175.358	510.437.198	2,41%
<b>Jumlah Belanja Neto</b>	<b>7.172.847.267.537</b>	<b>6.743.474.872.730</b>	<b>429.372.394.807</b>	<b>6,37%</b>

Perbandingan pagu dan realisasi Belanja Pegawai per unit eselon I dapat dilihat pada Tabel 36 berikut.

**Tabel 36**  
**Perbandingan Pagu dan Realisasi**  
**Belanja Pegawai Per Eselon I TA 2010**  
**(dalam rupiah)**

NO.	UNIT ESELON I	PAGU	REALISASI	%
1	SETJEN	5.151.508.959.000	4.792.240.216.650	93,03%
2	ITJEN	23.000.000.000	21.706.062.406	94,37%
3	DJA	36.057.218.000	35.172.586.568	97,55%
4	DJP	1.230.963.284.000	1.227.818.953.099	99,74%
5	DJBC	459.821.818.000	415.142.724.527	90,28%
4	DJPK	18.084.284.000	15.829.981.932	87,53%
5	DJPU	13.452.491.000	12.860.726.562	95,60%
8	DJPB	442.981.942.000	434.337.315.256	98,05%
9	DJKN	148.283.159.000	144.360.875.363	97,35%
10	BAPEPAM-LK	38.425.735.000	35.075.584.035	91,28%
11	BPPK	45.398.302.000	41.649.914.648	91,74%
12	BKF	18.590.656.000	18.328.939.047	98,59%
<b>Jumlah</b>		<b>7.626.567.848.000</b>	<b>7.194.523.880.093</b>	<b>94,34%</b>

Perbandingan Belanja Pegawai Kementerian Keuangan per unit eselon I menurut jenis belanja TA 2010 dan 2009 dapat dilihat pada Tabel 37 berikut

**Tabel 37**  
**Perbandingan Belanja Pegawai**  
**TA 2010 dan TA 2009**  
**(dalam rupiah)**

NO.	UNIT ESELON I	TA 2010	TA 2009	[Kenaikan/Penurunan]	%
1	SETJEN	4.792.240.216.650	4.560.108.734.231	232.131.482.419	95,16%
2	ITJEN	21.706.062.406	19.851.980.953	1.854.081.453	91,46%
3	DJA	35.172.586.568	33.568.880.206	1.603.706.362	95,44%
4	DJP	1.227.818.953.099	1.116.236.032.958	111.582.920.141	90,91%
5	DJBC	415.142.724.527	382.277.591.263	32.865.133.264	92,08%
4	DJPK	15.829.981.932	14.080.029.185	1.749.952.747	88,95%
5	DJPU	12.860.726.562	11.745.448.778	1.115.277.784	91,33%
8	DJPB	434.337.315.256	409.574.902.266	24.762.412.990	94,30%
9	DJKN	144.360.875.363	131.281.188.687	13.079.686.676	90,94%
10	BAPEPAM DAN LK	35.075.584.035	31.844.866.514	3.230.717.521	90,79%
11	BPPK	41.649.914.648	36.950.774.832	4.699.139.816	88,72%
12	BKF	18.328.939.047	17.120.618.215	1.208.320.832	93,41%
<b>Jumlah Belanja Bruto</b>		<b>7.194.523.880.093</b>	<b>6.764.641.048.088</b>	<b>429.882.832.005</b>	<b>94,02%</b>
Pengembalian		17.054.385.504	16.790.151.573	264.233.931	98,45%
<b>Jumlah Belanja Neto</b>		<b>7.177.469.494.589</b>	<b>6.747.850.896.515</b>	<b>429.618.598.074</b>	<b>94,01%</b>

#### B.2.2.4.2. Belanja Barang

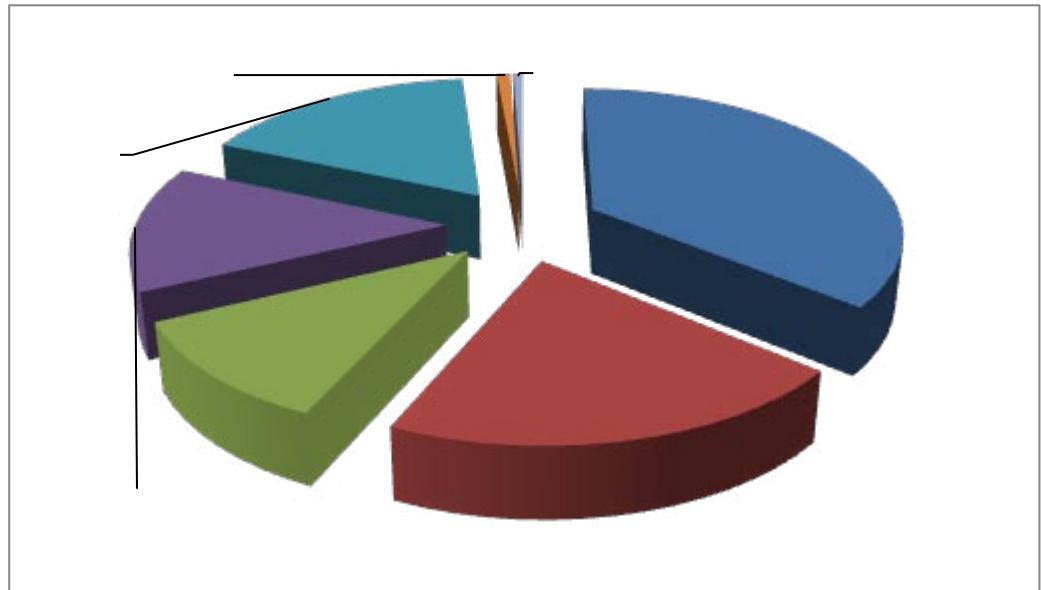
Realisasi Belanja Barang TA 2010 adalah sebesar **Rp3.931.936.721.184,00** yang berarti **76,17** persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2010 sebesar **Rp5.161.993.559.000,00**. Apabila dibandingkan dengan TA 2009, realisasi Belanja Barang TA 2010 mengalami kenaikan sebesar **Rp684.248.791.083,00** atau 21,10 persen dari TA 2009. Perbandingan pagu dan realisasi Belanja Barang TA 2010 dapat dilihat pada Tabel 38 berikut.

**Tabel 38**  
**Perbandingan Pagu dan Realisasi**  
**Belanja Barang TA 2010**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Belanja Barang Operasional	1.741.008.821.000	1.415.715.748.039	81,32%
Belanja Barang Non Operasional	1.009.432.352.000	813.922.970.904	80,63%
Belanja Jasa	745.430.595.000	437.239.445.747	58,66%
Belanja Pemeliharaan	743.092.978.000	541.507.464.640	72,87%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	833.664.470.000	668.347.998.809	80,17%
Belanja Perjalanan Luar Negeri	55.551.278.000	33.245.473.491	59,85%
Belanja Barang BLU	33.813.065.000	21.957.619.554	64,94%
<b>Jumlah</b>	<b>5.161.993.559.000</b>	<b>3.931.936.721.184</b>	<b>76,17%</b>

Komposisi Belanja Barang TA 2010 dapat dilihat dalam Grafik 15.

**Grafik 15**  
**Komposisi Realisasi Belanja Barang TA 2010**



Perbandingan antara realisasi Belanja Barang TA 2010 dan 2009 dapat dilihat pada Tabel 39 berikut.

**Tabel 39**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Barang**  
**TA 2010 dan 2009**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	TA 2010	TA 2009	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Barang Operasional	1.415.715.748.039	1.212.305.453.652	203.410.294.387	16,78%
Bel. Barang Non Operasional	813.922.970.904	544.606.966.336	269.316.004.568	49,45%
Belanja Jasa	437.239.445.747	419.373.223.967	17.866.221.780	4,26%
Belanja Pemeliharaan	541.507.464.640	487.060.281.922	54.447.182.718	11,18%
Bel. Perjalanan Dalam Negeri	668.347.998.809	548.202.971.741	120.145.027.068	21,92%
Belanja Perjalanan Luar Negeri	33.245.473.491	22.404.140.317	10.841.333.174	48,39%
Belanja Barang BLU	21.957.619.554	12.864.326.390	9.093.293.164	70,69%
<b>Jumlah Belanja Bruto</b>	<b>3.931.936.721.184</b>	<b>3.246.817.364.325</b>	<b>685.119.356.859</b>	<b>21,10%</b>
Pengembalian Belanja	4.380.644.502	4.003.279.906	377.364.596	9,43%
<b>Jumlah Belanja Neto</b>	<b>3.927.556.076.682</b>	<b>3.242.814.084.419</b>	<b>684.741.992.263</b>	<b>21,12%</b>

Perbandingan pagu dan realisasi Belanja Barang per unit eselon I dapat dilihat pada Tabel 40 berikut.

**Tabel 40**  
**Perbandingan Pagu dan Realisasi**  
**Belanja Barang Per Eselon I TA 2010**  
**(dalam rupiah)**

NO.	UNIT ESELON I	PAGU	REALISASI	%
1	SETJEN	511.514.455.000	372.424.844.842	72,81%
2	ITJEN	64.691.342.000	59.592.781.498	92,12%
3	DJA	58.789.841.000	53.077.910.349	90,28%
4	DJP	1.958.308.123.000	1.427.432.785.378	72,89%
5	DJBC	968.315.925.000	765.924.496.759	79,10%
4	DJPK	79.170.737.000	70.781.618.981	89,40%
5	DJPU	52.471.910.000	50.082.181.978	95,45%
8	DJPB	673.790.221.000	538.729.613.627	79,96%
9	DJKN	362.937.179.000	252.617.266.817	69,60%
10	BAPEPAM DAN LK	84.379.406.000	69.036.434.626	81,82%
11	BPPK	242.687.628.000	185.483.776.227	76,43%
12	BKF	104.936.792.000	86.753.010.102	82,67%
<b>Jumlah Belanja Bruto</b>		<b>5.161.993.559.000</b>	<b>3.931.936.721.184</b>	<b>76,17%</b>
Pengembalian			4.380.644.502	0
<b>Jumlah Belanja Neto</b>		<b>5.161.993.559.000</b>	<b>3.927.556.076.682</b>	<b>76,09%</b>

Perbandingan realisasi Belanja Barang per unit eselon I TA 2010 dan 2009 dapat dilihat pada Tabel 41 berikut.

**Tabel 41**  
**Perbandingan Belanja Barang Per Eselon I**  
**TA 2010 dan TA 2009**  
**(dalam rupiah)**

NO.	UNIT ESELON I	TA 2010	TA 2009	(Kenaikan/Penurunan)
1	SETJEN	372.424.844.842	294.701.932.377	77.722.912.465
2	ITJEN	59.592.781.498	47.749.584.391	11.843.197.107
3	DJA	53.077.910.349	33.730.909.804	19.347.000.545
4	DJP	1.427.432.785.378	1.228.057.182.349	199.375.603.029
5	DJBC	765.924.496.759	649.999.958.179	115.924.538.580
4	DJPK	70.781.618.981	60.441.170.947	10.340.448.034
5	DJPU	50.082.181.978	52.336.722.366	(2.254.540.388)
8	DJPB	538.729.613.627	398.340.853.385	140.388.760.242
9	DJKN	252.617.266.817	212.954.603.272	39.662.663.545
10	BAPEPAM DAN LK	69.036.434.626	52.625.137.659	16.411.296.967
11	BPPK	185.483.776.227	142.267.974.102	43.215.802.125
12	BKF	86.753.010.102	73.611.335.494	13.141.674.608
<b>Jumlah Belanja Bruto</b>		<b>3.931.936.721.184</b>	<b>3.246.817.364.325</b>	<b>685.119.356.859</b>
Pengembalian		4.380.644.502	4.003.279.906	377.364.596
<b>Jumlah Belanja Neto</b>		<b>3.927.556.076.682</b>	<b>3.242.814.084.419</b>	<b>684.741.992.263</b>

Rendahnya realisasi Belanja Barang disebabkan oleh hal-hal berikut:

1. Kebijakan efisiensi dan efektivitas anggaran terhadap kegiatan perjalanan dinas luar kota dan konsinyering, honorarium, uang lembur, dan langganan daya dan jasa.
2. Pada DJP terdapat realisasi anggaran proyek PINTAR (*Project for Indonesia Tax Administration Reform*) yang bersumber dari Belanja Barang sebesar Rp58,870,068,000,00 tidak dapat direalisasikan kegiatannya pada TA 2010 karena proses pengadaan masih berjalan dan kontrak-kontraknya baru akan ditandatangani pada triwulan pertama tahun 2011.
3. Realisasi peserta pada beberapa diklat di BPPK tidak sesuai dengan yang direncanakan.
4. Terdapat kesulitan mencari negara/instansi di luar negeri untuk *internship*.

#### B.2.2.4.3. Belanja Modal

*Realisasi Belanja  
Modal  
Rp1.850.194.481.247,00  
7,00*

Realisasi Belanja Modal TA 2010 adalah sebesar **Rp1.850.194.481.247,00** yang berarti **71,07%** persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2010 sebesar **Rp2.603.302.791.000,00**. Apabila dibandingkan dengan TA 2009, realisasi Belanja Modal TA 2010 mengalami kenaikan sebesar **Rp135.228.777.994,00** atau **7,31** persen dari TA 2009. Perbandingan pagu dan realisasi Belanja Modal TA 2010 dapat dilihat pada Tabel 42 berikut.

**Tabel 42**  
**Perbandingan Pagu dan Realisasi**  
**Belanja Modal TA 2010**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Belanja Modal Tanah	187.227.282.000	169.692.884.966	90,63%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	866.802.543.000	660.104.667.975	76,15%
Belanja Modal Gedung & Bangunan	1.246.320.040.000	955.185.541.282	76,64%
Belanja Pemeliharaan yg Dikapitalisasi	224.489.000.000	18.933.840.493	8,43%
Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan	0	0	0,00%
Belanja Modal Fisik Lainnya	67.477.056.000	42.565.895.798	63,08%
Belanja Modal BLU	10.986.870.000	3.711.650.733	33,78%
<b>Jumlah belanja Bruto</b>	<b>2.603.302.791.000</b>	<b>1.850.194.481.247</b>	<b>71,07%</b>
Pengembalian Belanja		241.582.550	0,00%
<b>Jumlah belanja Neto</b>	<b>2.603.302.791.000</b>	<b>1.849.952.898.697</b>	<b>71,06%</b>

Komposisi Belanja Modal TA 2010 dapat dilihat pada Grafik 16 berikut.

**Grafik 16**  
**Komposisi Realisasi Belanja Modal TA 2010**

Perbandingan antara realisasi Belanja Modal TA 2010 dan 2009 dapat dilihat pada Tabel 43 berikut.

**Tabel 43**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Modal**  
**TA 2010 dan 2009**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	TA 2010	TA 2009	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Modal Tanah	169.692.884.966	97.713.869.230	71.979.015.736	42,42%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	660.104.667.975	626.735.687.548	33.368.980.427	5,06%
Belanja Modal Gedung & Bangunan	955.185.541.282	864.209.228.809	90.976.312.473	9,52%
Belanja Pemeliharaan yg Dikapitalisasi	18.933.840.493	23.128.847.565	(4.195.007.072)	-22,16%
Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan	0	0	0	0,00%
Belanja Modal Fisik Lainnya	42.565.895.798	96.253.891.422	(53.687.995.624)	-126,13%
Belanja Modal BLU	3.711.650.733	6.924.178.679	(3.212.527.946)	-86,55%
<b>Jumlah belanja Bruto</b>	<b>1.850.194.481.247</b>	<b>1.714.965.703.253</b>	<b>135.228.777.994</b>	<b>7,31%</b>
Pengembalian Belanja	241.582.550	86.645.000	154.937.550	64,13%
<b>Jumlah belanja Neto</b>	<b>1.849.952.898.697</b>	<b>1.714.879.058.253</b>	<b>135.073.840.444</b>	<b>7,30%</b>

Perbandingan pagu dan realisasi Belanja Modal per unit eselon I dapat dilihat pada Tabel 44 berikut.

**Tabel 44**  
**Realisasi Belanja Modal Per Eselon I TA 2010**  
**(dalam rupiah)**

NO.	UNIT ESELON I	PAGU	REALISASI	%
1	SETJEN	450.674.343.000	326.099.335.330	72,36%
2	ITJEN	9.372.735.000	9.227.356.592	98,45%
3	DJA	7.671.010.000	7.374.692.754	96,14%
4	DJP	688.778.849.000	342.267.048.585	49,69%
5	DJBC	587.853.995.000	446.069.816.734	75,88%
4	DJPK	27.869.752.000	19.706.994.975	70,71%
5	DJPU	152.267.110.000	121.263.599.250	79,64%
8	DJPB	350.579.546.000	289.876.883.249	82,69%
9	DJKN	119.390.255.000	101.046.957.746	84,64%
10	BAPEPAM DAN LK	44.601.580.000	41.686.229.858	93,46%
11	BPPK	159.226.891.000	140.818.634.734	88,44%
12	BKF	5.016.725.000	4.756.931.440	94,82%
<b>Jumlah Belanja Bruto</b>		<b>2.603.302.791.000</b>	<b>1.850.194.481.247</b>	<b>71,07%</b>
Pengembalian			241.582.550	0,00%
<b>Jumlah Belanja Neto</b>		<b>2.603.302.791.000</b>	<b>1.849.952.898.697</b>	<b>71,06%</b>

Perbandingan Belanja Modal per unit eselon I Kementerian Keuangan TA 2010 dan TA 2009 dapat dilihat pada Tabel 45 berikut.

**Tabel 45**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Modal**  
**TA 2010 dan 2009**  
**(dalam rupiah)**

NO.	UNIT ESELON I	TA 2010	TA 2009	Kenaikan/Penurunan	%
1	SETJEN	326.099.335.330	170.686.690.054	155.412.645.276	91,05%
2	ITJEN	9.227.356.592	4.394.672.079	4.832.684.513	109,97%
3	DJA	7.374.692.754	9.454.946.507	(2.080.253.753)	-22,00%
4	DJP	342.267.048.585	648.482.990.590	(306.215.942.005)	-47,22%
5	DJBC	446.069.816.734	428.365.494.746	17.704.321.988	4,13%
4	DJPK	19.706.994.975	7.261.421.978	12.445.572.997	171,39%
5	DJPU	121.263.599.250	7.811.364.630	113.452.234.620	1452,40%
8	DJPB	289.876.883.249	176.723.664.190	113.153.219.059	64,03%
9	DJKN	101.046.957.746	72.764.415.853	28.282.541.893	38,87%
10	BAPEPAM DAN LK	41.686.229.858	49.740.794.235	(8.054.564.377)	-16,19%
11	BPPK	140.818.634.734	124.989.218.273	15.829.416.461	12,66%
12	BKF	4.756.931.440	14.290.030.118	(9.533.098.678)	-66,71%
<b>Jumlah Belanja Bruto</b>		<b>1.850.194.481.247</b>	<b>1.714.965.703.253</b>	<b>135.228.777.994</b>	<b>7,89%</b>
Pengembalian		241.582.550	86.645.000	154.937.550	178,82%
<b>Jumlah Belanja Neto</b>		<b>1.849.952.898.697</b>	<b>1.714.879.058.253</b>	<b>135.073.840.444</b>	<b>7,88%</b>

Rendahnya realisasi Belanja Modal disebabkan oleh hal-hal berikut:

1. Pada Setjen terdapat proyek pengadaan lift Gedung Keuangan Negara (GKN) Bandung yang batal dilaksanakan karena mengalami gagal lelang dengan pagu sebesar Rp2.649.000.000,00. Demikian pula untuk renovasi beberapa gedung di Kementerian Keuangan juga mengalami gagal lelang.
2. Pada GKN Jayapura terdapat proyek rehabilitasi dengan pagu sebesar Rp37.452.020.000,00. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dilakukan baru sebatas Perencanaan Konstruksi dan Manajemen Konstruksi. Pembangunan fisik belum dapat dilakukan karena bangunan lama yang ada belum laku dijual.
3. Pada DJP terdapat realisasi anggaran proyek PINTAR yang bersumber dari Belanja Modal sebesar Rp202.424.575.000,00 tidak dapat direalisasikan kegiatannya pada TA 2010 karena proses pengadaan masih berjalan dan kontrak-kontraknya baru akan ditandatangani pada triwulan pertama tahun 2011 serta adanya keterlambatan *No Objection Letter (NOL)* untuk beberapa kegiatan yang didanai dari PHLN.
4. Efisiensi harga pengadaan hasil lelang belanja modal yang dilaksanakan dengan lelang umum maupun secara *e-procurement*.
5. Adanya keterlambatan dukungan dari instansi terkait, untuk perijinan dan rekomendasi pembangunan.

#### B.2.2.4.4. Pembayaran Kewajiban Utang

*Realisasi pembayaran kewajiban utang Rp1.321.487.211.977,00*

Realisasi Belanja Pembayaran Kewajiban Utang TA 2010 adalah sebesar **Rp1.321.487.211.977,00** yang merupakan imbalan bunga atas keterlambatan pembayaran pengembalian kelebihan pajak. Realisasi Pembayaran Kewajiban Utang TA 2010 mengalami kenaikan sebesar **Rp264.393.782.697,00** atau **25,01** persen apabila dibandingkan dengan pengeluaran yang sama untuk TA 2009.

Komposisi realisasi Pembayaran Kewajiban Utang tersebut dapat dilihat pada Tabel 46 berikut.

**Tabel 46**  
**Realisasi Pembayaran Kewajiban Utang**  
**TA 2010 dan 2009**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	TA 2010	TA 2009	Kenaikan/(Penurunan)	%
B. Pembayaran Imb. Bunga Pajak	1,321,487,211,977	1,057,093,429,280	264,393,782,697	25.01%
Pembyrn Imb. Bunga Bea & Cukai	0	20,505,903	(20,505,903)	-100.00%
<b>Jumlah</b>	<b>1,321,487,211,977</b>	<b>1,057,113,935,183</b>	<b>264,373,276,794</b>	<b>25.01%</b>

### B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

#### 1. Rekonsiliasi Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak

Dalam rangka menjaga validitas data realisasi pendapatan, khususnya untuk data penerimaan pajak telah dilakukan rekonsiliasi antara DJP selaku pengguna anggaran dengan DJPB selaku Bendahara Umum Negara. Rekonsiliasi dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji bahwa jumlah penerimaan pajak yang disajikan sebesar

Rp707,726,992,111,992,00 telah didukung uang (kas) yang masuk ke negara dengan jumlah yang sama.

DJPB dan DJP pada tanggal 28 Februari 2011 telah menyelenggarakan Rekosiliasi Pendapatan Perpajakan dengan hasil Berita Acara Rekonsiliasi Nomor: BAR-130/SM II/PB.64/2011. Dari rekonsiliasi tersebut diperoleh data penerimaan yang *unmatch* sebesar Rp274.879.021.777,00. Terhadap selisih penerimaan SAI dan SAU *unmatch* tersebut telah ditelusuri lebih lanjut sehingga semua selisih penerimaan dapat dijelaskan dan dapat diterima. Dengan demikian tidak ada selisih lagi antara SAI dan SAU. Terhadap angka penerimaan telah dilakukan koreksi pada SAI *audited*, karena berdasarkan penelitian jumlah tersebut telah diterima di Kas Umum Negara (KUN) dengan MAP Pajak.

## **2. Program PINTAR Direktorat Jenderal Pajak**

Tim Pendampingan PINTAR telah dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KM.1/2010 tentang Pembentukan Tim Pendampingan *Project For Indonesian Tax Administration Reform* (PINTAR). Dalam pelaksanaan proyek PINTAR tersebut selama tahun 2010, DJP telah mengusulkan revisi anggaran berupa penarikan dana PINTAR untuk TA 2010 dan TA 2011. Penarikan dana tersebut dilakukan karena terjadi pergeseran penandatanganan kontrak dari sebelumnya pada Januari 2010 menjadi awal Maret 2010. Nilai penarikan dana yang telah diusulkan sebesar **Rp362.291.728.000,00** dengan tetap memperhitungkan kemungkinan terjadinya perubahan dan/atau penyesuaian penarikan dana di masa datang yang sangat tergantung dengan saat dimulainya pekerjaan atau adanya perubahan *term of payment* pada *draft bidding document* yang digunakan sebagai dasar perhitungan dari kontraktor. Dikarenakan perubahan dalam penandatanganan kontrak tersebut, terjadi pergeseran waktu pelaksanaan program PINTAR yang semula dari 2010 – 2015 menjadi 2011 – 2016.

## **3. Rekonsiliasi Penerimaan Dan Pengembalian Penerimaan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai**

DJBC telah mencatat penerimaan berdasarkan bukti setor SSPCP/SSBP secara berjenjang (*bottom-up*) dari tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan telah dilakukan rekonsiliasi secara berjenjang sesuai tingkat unit akuntansinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor:171/PMK.05/2007.

Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengembalian Penerimaan Perpajakan tingkat Eselon I. DJBC sebagai Pengguna Anggaran dan DJPB sebagai Bendahara Umum Negara telah melaksanakan rekonsiliasi pada tanggal 16 Februari 2011 dengan hasil Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Nomor : BAR-51/SM II/PB.64/2011 tanggal 16 Februari 2011 sebagaimana terakhir dilakukan rekonsiliasi pada tanggal 20 Mei 2011 dengan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Nomor : BAR-166/SM.II/PB.6.4/2011.

Terhadap transaksi penerimaan SAI dan SAU *unmatch* tersebut, DJBC dengan surat Direktur PPKC Nomor S-129/BC.8/2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang Tindak Lanjut Rekonsiliasi Penerimaan Perpajakan atas BAR-51/SM II/PB.64/2011 tanggal 16 Februari 2011, Piutang Perpajakan dan SP3DRI DJBC Tahun anggaran 2010 melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Menginstruksikan kepada KPPBC/KPU yang memiliki transaksi penerimaan *unmatch* Tahun 2010 untuk melakukan penelusuran dan memberikan jawaban konfirmasi pada kesempatan pertama;
- b. Melakukan asistensi kepada Satuan Kerja dengan volume *unmatch* yang relative besar;
- c. Meneliti data SAI dan SAU *unmatch* dengan membandingkannya dengan data MPN .

Berdasarkan hasil penelitian diatas dan pembahasan dengan Tim BPK dan Setjen Kementerian Keuangan maka:

- a. Nilai *Unmatch* Penerimaan SAI DJBC dengan SAU yang masih harus ditindaklanjuti oleh DJBC yaitu:

ELEMENT	SAI		SAU	
	nilai	trx	nilai	trx
<b><i>Unmatch IV</i></b>	136.607.996.091	28.285	467.461.395.125	102.725
<b>Hasil rekon yang masih harus dijelaskan</b>	26.092.110.008	1.346	26.446.180.660	1.346
<b><i>Unmatch</i></b>	<b>162.700.106.099</b>	<b>29.631</b>	<b>493.907.575.785</b>	<b>104.071</b>

- b. Atas hasil rekonsiliasi SAI DJBC dengan SAU dan dengan pertimbangan bahwa penerimaan diakui berdasarkan uang yang masuk ke kas Negara maka akun penerimaan dikoreksi sebagai berikut:
  - Terhadap data *partial match* yang elemen MAP antara SAI dan SAU berbeda namun nilai keduanya sama, akan dilakukan reklasifikasi akun sesuai MAP SAU;
  - Terhadap data *partial match* yang elemen nilai antara SAI dan SAU berbeda maka dilakukan koreksi atas nilai SAI tersebut;
  - Terhadap sisa data SAI *unmatch* yang belum ditelusuri maka akan dikurangkan sedangkan terhadap data SAU *unmatch* akan ditambahkan dalam LRA DJBC sesuai kode satker hasil pemetaan dengan data MPN. Dalam hal kode satker tidak diketahui maka akan dicatat sebagai penerimaan Satker Kantor Pusat;
- c. Hasil rekonsiliasi tanggal 20 Mei 2011 dengan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Nomor : BAR-166/SM.II/PB.6.4/2011 masih terdapat selisih sebesar Rp279.763.975 dengan rincian sebagai berikut:

MAP	SAI		SAU	
	nilai	trx	nilai	trx
411511	-	-	4.772.975	2
412111	-	-	56.650.031	15
412211	348.052.716	2	6.865.735	1
<b><i>Unmatch</i></b>	<b>348.052.716</b>	<b>2</b>	<b>68.288.741</b>	<b>18</b>

- Terdapat dua transaksi sebesar Rp348.052.716,00 yang tercatat di SAI sebagai pendapatan bea keluar (412211) namun di SAU dibukukan sebagai pendapatan anggaran lain-lain. Atas perbedaan MAP tersebut, DJBC telah mengajukan reklasifikasi kepada Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sesuai Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor S-128/BC.13/2011 tanggal 10 Mei 2011 hal Permohonan Perubahan Akun Penerimaan Bea Keluar;
- Terdapat transaksi sebesar Rp68.288.741,00 tidak tercatat di SAI karena penerimaan ini sebenarnya adalah potongan SPM (penerimaan pajak) namun dicatat sebagai penerimaan DJBC.

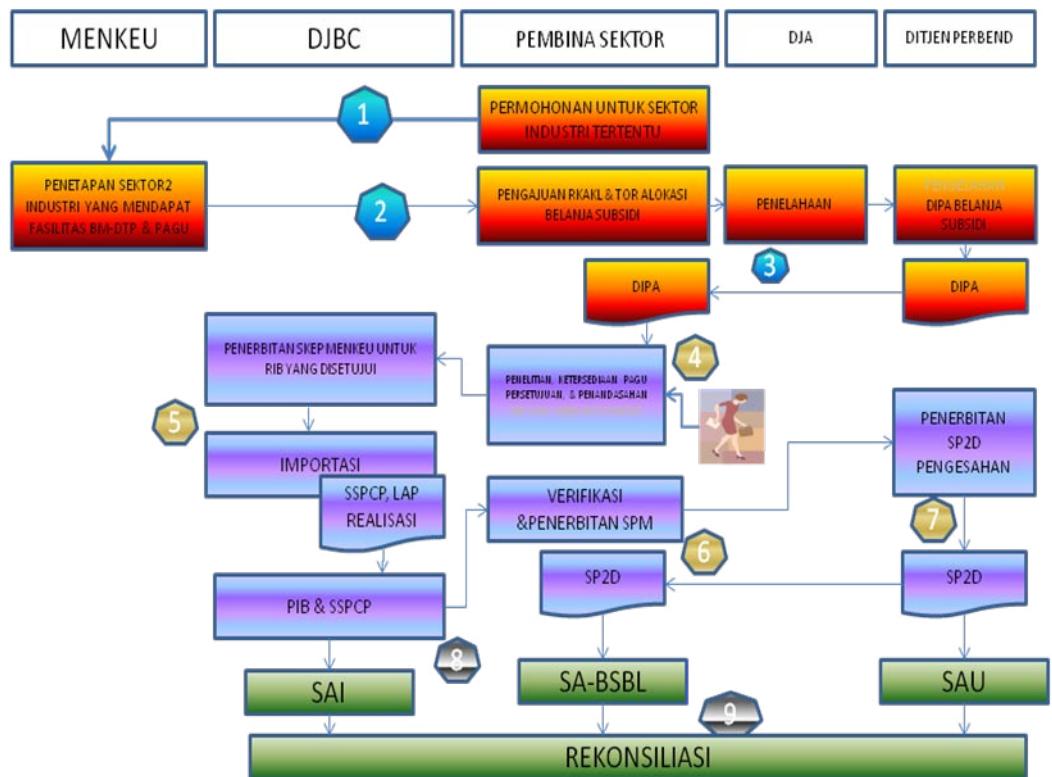
#### **4. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP)**

Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas BM DTP sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 63/PMK.05/2010 secara umum yaitu:

- 1) Proses *Planning* (Perencanaan) yaitu berdasarkan permohonan dari Instansi Pembina Sektor, Menteri Keuangan setiap tahunnya menetapkan sektor-sektor industri yang mendapat insentif fiskal berupa BM-DTP sesuai kriteria penilaian tertentu;
- 2) Proses *Budgeting* (Penganggaran) yaitu berdasarkan penetapan insentif fiskal per sektor, masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran Instansi Pembina Sektor mengajukan RKAKL alokasi belanja subsidi insentif BM DTP yang akan diberikan kepada perusahaan penerima kepada Ditjen Anggaran untuk selanjutnya diterbitkan DIPA Belanja Subsidi BM DTP;
- 3) Proses *Execution* (Pelaksanaan) yaitu:
  - a. Perusahaan calon penerima insentif BM DTP mengajukan penandasanahan RIB (Rencana Impor Barang) kepada Instansi Pembina Sektor (IPS). Selanjutnya RIB yang telah ditandasahkan oleh perusahaan diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p Direktur Fasilitas Kepabeanan;
  - b. Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan memberikan insentif fiskal BM-DTP kepada perusahaan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan pemberian BM DTP.
  - c. Berdasarkan SKMK pemberian BM DTP tersebut, perusahaan melaksanakan importasi barang dan menyelesaikan formalitas kepabeanan di KPPBC pelabuhan bongkar;
  - d. KPPBC pelabuhan bongkar melakukan pemotongan kuota BM DTP dan menatausahakan dokumen PIB+SSPCP BMDTP serta mengirimkan laporan realisasi BM DTP beserta dokumen terkait kepada Kantor Pusat DJBC;
  - e. Selanjutnya Laporan realisasi BM DTP beserta dokumen SSPBC+PIB ditatausahakan dan disampaikan kepada Satker Belanja Subsidi BM-DTP dalam hal ini Instansi Pembina Sektor sebagai dasar penerbitan SPM.
- 4) Proses *Accountability & Reporting* (Pertanggungjawaban dan Pelaporan):
  - a. Berdasarkan dokumen PIB+SSPCP BM DTP dari DJBC, Kuasa PA Belanja Subsidi BM-DTP menerbitkan SPM kepada Kuasa BUN dalam hal ini KPPN Jakarta II untuk diterbitkan SP2D Pengesahan;
  - b. SSPCP BM DTP sebagaimana dimaksud huruf c digunakan sebagai dasar untuk mencatat Laporan Realisasi Penerimaan BM DTP yang dicatat oleh Satker Kantor Pusat DJBC;
  - c. SPM dan SP2D Pengesahan sebagai tersebut huruf d digunakan sebagai dasar pencatatan realisasi belanja subsidi BM DTP yang dicatat oleh Satker Belanja Subsidi BM DTP melalui Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain;

Setiap Triwulan dilakukan rekonsiliasi antara realisasi penerimaan BM DTP Satker Kantor Pusat DJBC, realisasi belanja subsidi BM DTP Satker Belanja Subsidi Instansi Pembina Sektor, dan Kuasa BUN.

## ALUR PROSES BISNIS BM DTP



### 5) Permasalahan

Secara umum pelaksanaan BM DTP melibatkan beberapa instansi yaitu:

- Instansi Teknis Pembina Sektor dalam hal ini berfungsi sebagai pemberian penandasahan RIB (Rencana Impor Barang) dari Perusahaan yang dapat diberikan subsidi BM DTP; Direktorat Fasilitas Kepabeanan dalam hal ini berfungsi dalam pemberian SKMK fasilitas BM DTP dan penyampaian dokumen PIB+SSPCP BM DTP kepada KPA Instansi Pembina Sektor;
- KPPBC/KPU Bea dan Cukai dalam hal ini berfungsi dalam pelayanan importasi BM DTP termasuk pemotongan kuota BM DTP dan penatausahaan BM DTP serta pengiriman dokumen PIB+SSPCP;
- Direktorat PPKC dalam hal ini berfungsi dalam penatausahaan realisasi penerimaan BM DTP untuk selanjutnya disampaikan kepada Bagian Keuangan KP DJBC;
- Bagian Keuangan KP DJBC dalam hal berfungsi dalam akuntansi realisasi penerimaan BM DTP dan rekonsiliasi dengan realisasi belanja subsidi BM DTP;
- KPA Belanja Subsidi Instansi Pembina Sektor dalam hal ini berfungsi dalam penerbitan SPM belanja subsidi BM DTP, akuntansi realisasi belanja subsidi BM DTP, dan rekonsiliasi dengan BUN dan DJBC;
- Kuasa BUN dalam hal ini KPPN Jakarta II yang berfungsi dalam penerbitan SP2D Pengesahan Belanja Subsidi BM DTP.

Dalam pelaksanaan BM DTP Tahun 2010 ini masih ditemukan kendala-kendala terutama dalam proses pertanggungjawaban BM DTP yaitu:

- Proses Pengajuan SPM Belanja Subsidi BM DTP di KPPN Jakarta II baru dapat dilaksanakan pada bulan Desember 2010 karena petunjuk pelaksanaan yang mengatur mengenai penerbitan SPP, SPM, dan Penerbitan SP2D Pengesahan BM DTP baru diterbitkan pada bulan November 2010 melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 44/PB/2010;

- b. DIPA Belanja Subsidi Instansi Pembina Sektor (Badan POM) Tahun 2010 masih dalam proses pengesahan sampai dengan bulan Desember 2010;
- c. Belum adanya penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Subsidi Tahun 2010 di Ditjen Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka;
- d. Belum pahamnya Instansi Pembina Sektor mengenai alur bisnis BM DTP khususnya dalam hal pertanggungjawabannya sehingga sering timbul permasalahan bahwa dokumen SSPCP dan PI;
- e. Masih terdapat data realisasi impor BM DTP yang perlu diklarifikasi oleh DJBC dan Instansi Pembina Sektor.
- f. Realisasi importasi dengan menggunakan fasilitas BM DTP masih dimungkinkan terjadi sampai dengan akhir tahun 2010 mengingat batas waktu penggunaan fasilitas tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2010 adalah sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, sedangkan batas waktu pengajuan SPM ke KPPN paling lambat tanggal 31 Desember 2010.

#### 6) Upaya Yang Telah Dilakukan DJBC

Untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul sebagaimana tersebut diatas, Selama tahun 2010 ini DJBC melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi antara DJBC, Instansi Pembina Sektor dan KPPN Jakarta II untuk mendapatkan persepsi yang sama mengenai alur proses BM DTP dan fungsi masing-masing pihak dalam proses BM DTP;
- b. Mendorong DJPB untuk dapat segera menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai proses penerbitan SP2D BM DTP di KPPN sehingga realisasi penerimaan BM DTP dapat diajukan SP2D Belanja Subsidi oleh Instansi Pembina Sektor;
- c. Mengajukan permohonan dispensasi kepada Direktur Jenderal agar masih dapat memproses SPM belanja subsidi BM DTP tahun 2010 yang diajukan setelah tanggal 20 Desember 2010 sampai dengan tanggal 15 Januari 2011 mengingat batas waktu penggunaan fasilitas BM DTP Tahun 2010 adalah tanggal 31 Desember 2010 untuk memberikan waktu bagi DJBC maupun Instansi Pembina Sektor untuk pengajuan SPM Belanja Subsidi BM DTP;
- d. Melakukan klarifikasi data realisasi penerimaan BM DTP Tahun 2010 antara Kantor Pusat, KPPBC/KPU BC, dan Para Instansi Pembina Sektor untuk menyakini realisasi BM DTP yang akan dipertanggungjawabkan baik oleh DJBC maupun oleh Instansi Pembina Sektor;
- e. Menyelenggarakan pertemuan mediasi berdasarkan rekomendasi Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan antara Ditjen Perbendaharaan, KPPN Jakarta II, dan Para Instansi Pembina Sektor pada tanggal 19 Januari 2011 untuk menyelesaikan angka realisasi BM DTP Tahun 2010 yang belum dikeluarkan SP2Dnya.

#### 7) Capaian DJBC

Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan DJBC, diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Terkait dengan koordinasi antara DJBC dengan Instansi Pembina Sektor diperoleh kejelasan penanggung jawab dari masing-masing Instansi Pembina Sektor yang berfungsi dalam penerbitan dan pengajuan SPM BM DTP kepada KPPN Jakarta II sehingga DJBC dalam hal ini Direktorat Fasilitas Kepabeanan dapat langsung mengirimkan dokumen PIB+SSPCP BM DTP kepada PIC tersebut;
- b. Terkait dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan yang mengatur mengenai

proses penerbitan SP2D BM DTP di KPPN, Ditjen Perbendaharaan telah mengeluarkan peraturan dimaksud dan mulai efektif dilaksanakan pada pertengahan Desember 2010;

- c. Terkait dengan penyelesaian angka realisasi BM DTP yang belum dapat di SP2Dkan sampai dengan awal Januari 2011, berdasarkan hasil pertemuan mediasi yang telah dilakukan diketahui bahwa dari empat Instansi Pembina Sektor yang masih terdapat angka realisasi BM DTP tahun 2010 yang belum di SP2Dkan yaitu Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia (Ditjen IAK), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Direktorat Kelaikan dan Pengoperasian Pesawat Udara, dan Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur (Ditjen BIM (d/h Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka (Ditjen ILMTA) Kementerian Perindustrian) hanya satu yang tidak menindaklanjuti yaitu Ditjen BIM. Menurut keterangan dari Direktorat terkait, terdapat masalah internal karena adanya mutasi pejabat sehingga proses penerbitan SPM BM DTP tidak dapat dilakukan.

## C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.1 PENJELASAN UMUM NERACA

Posisi Neraca Kementerian Keuangan pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut: Aset sebesar Rp109.432.138.938.078,00; Kewajiban sebesar Rp761.816.067.975,00; dan Ekuitas Dana sebesar Rp108.670.322.870.103,00.

Nilai Aset per 31 Desember 2010 sebesar Rp109.432.138.938.078,00 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp72.387.991.856.046,00; Investasi Jangka Panjang sebesar RpNihil; Aset Tetap sebesar Rp36.058.407.872.153,00; dan Aset Lainnya sebesar Rp985.739.209.879,00.

Nilai Kewajiban per 31 Desember 2010 sebesar Rp761.816.067.975,00 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp611.878.292.975,00 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp149.937.775.000,00.

Nilai Ekuitas Dana per 31 Desember 2010 sebesar Rp108.670.322.870.103,00 terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp71.846.529.727.455,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp36.823.793.142.648,00.

Komposisi Neraca per 31 Desember 2010 dan 2009 dapat dilihat pada Tabel 47 berikut.

**Tabel 47**  
**Komposisi Neraca Per 31 Desember 2010 dan 2009**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Aset	109,432,138,938,078	103,708,465,479,002	5,723,673,459,076	5.52
Kewajiban	761,816,067,975	359,251,417,318	402,564,650,657	112.06
Ekuitas Dana	108,670,322,870,103	103,349,214,061,684	5,321,108,808,419	5.15

Komposisi Neraca per 31 Desember 2010 dan 2009 dapat dilihat pada Grafik 17 berikut.

## C.2 PENJELASAN PER POS NERACA

### C.2.1 Aset Lancar

#### C.2.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara  
Pengeluaran Rp  
Rp2.253.757.563,  
00,00

Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar **Rp2.253.757.563,00** dan **Rp4.021.141.586,00**. Saldo tersebut merupakan saldo Uang Persediaan yang belum disetor dan bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan Bendahara Pengeluaran ke Kas Negara pada tanggal neraca.

Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran pada unit Eselon I lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2010 dan 2009 dapat dilihat pada Tabel 48 berikut.

**Tabel 48**  
**Kas di Bendahara Pengeluaran Per Eselon I**  
**Per 31 Desember 2010 dan 2009**  
**(dalam rupiah)**

ESELON I	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Kenaikan/ (Penurunan)	%
SETJEN	44,294,149	44,268,354	25,795	0.06
ITJEN	0	117,954	(117,954)	(100.00)
DJA	0	489,543,584	(489,543,584)	(100.00)
DJP	1,277,176,465	932,612,895	344,563,570	36.95
DJBC	413,703,068	707,708,058	(294,004,990)	(41.54)
DJPK	0	443,996,726	(443,996,726)	(100.00)
DJPB	211,371,045	205,436,838	5,934,207	2.89
DJKN	262,704,258	470,614,265	(207,910,007)	(44.18)
BPPK	44,508,578	726,842,912	(682,334,334)	(93.88)
<b>Jumlah</b>	<b>2,253,757,563</b>	<b>4,021,141,586</b>	<b>(1,767,384,023)</b>	<b>(43.95)</b>

Sedangkan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2010 yang telah disetorkan ke Kas Negara pada TA 2011 sebesar Rp2.223.117.550,00 dan sisanya masih berada di rekening Bendahara Pengeluaran DJPB sebesar Rp30.640.013,00.

Penyetoran saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per Eselon I sampai dengan tanggal neraca dapat dilihat pada Tabel 50 berikut.

**Tabel 50**  
**Penyetoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2010**  
**(dalam rupiah)**

No	Uraian Eselon I	Saldo Kas	Penyetoran ke Kas Negara TA 2011	Sisa kas yang belum disetor ke Kas Negara
1	SETJEN	44,294,149	44,294,149	0
2	DJP	1,277,176,465	1,277,176,465	0
3	DJBC	413,703,068	413,703,068	0
4	DJPB	211,371,045	180,731,032	30,640,013
5	DJKN	262,704,258	262,704,258	0
6	BPPK	44,508,578	44,508,578	0
<b>Jumlah</b>		<b>2,253,757,563</b>	<b>2,223,117,550</b>	<b>30,640,013</b>

Sisa Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp30.640.013,00 terdapat pada Kanwil DJPB Propinsi Kalimantan Timur karena telah terjadi pencurian uang di brankas. Penetapan kerugian negara masih menunggu hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Penyetoran saldo Kas di Bendahara Penerimaan setelah tanggal neraca dapat dilihat pada Tabel 52 dan 53 berikut.

**Tabel 52**  
**Penyetoran Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2009**  
**(dalam rupiah)**

No	Kode Perkiraan	Uraian Eselon I	Saldo Kas	Penyetoran ke Kas Negara TA 2010	Sisa kas yang belum disetor ke Kas Negara
1	111711	DJBC	1.477.033.883	1.477.033.883	0
2	117111	DJKN	10.103.881.446	10.103.881.446	0
<b>Jumlah</b>			<b>11.580.915.329</b>	<b>11.580.915.329</b>	<b>0</b>

Seluruh saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2009 telah disetorkan ke Kas Negara pada TA 2010.

**Tabel 53**  
**Penyetoran Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2010**  
**(dalam rupiah)**

No	Kode Perkiraan	Uraian Eselon I	Saldo Kas	Penyetoran ke Kas Negara TA 2011	Sisa kas yang belum disetor ke Kas Negara
1	111711	DJBC	315,258,156	315,258,156	0
2	117111	DJKN	3,741,330,879	3,741,330,879	0
3	117111	BPPK	11,760,000	11,760,000	0
<b>Jumlah</b>			<b>4,068,349,035</b>	<b>4,068,349,035</b>	<b>0</b>

Seluruh saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2010 telah disetorkan ke Kas Negara pada TA 2011.

**Tabel 54**  
**Kas Lainnya dan Setara Kas Per Eselon I**  
**Per 31 Desember 2010 dan 2009**  
**(dalam rupiah)**

ESELON I	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Kenaikan/ (Penurunan)	%
SETJEN	0	1,022,845	(1,022,845)	(100.00)
ITJEN	347,313,001	0	347,313,001	0.00
DJA	933,012,949	0	933,012,949	0.00
DJP	40,184,358	6,546,697	33,637,661	513.81
DJBC	132,481,338	44,658,445	87,822,893	196.65
DJPB	179,296,340	298,201,557	(118,905,217)	(39.87)
DJKN	33,114,133	142,551,848	(109,437,715)	(76.77)
BAPEPAM-LK	418,436,050	0	418,436,050	0.00
BPPK	65,841,779	994,229,670	(928,387,891)	(93.38)
BKF	29,300	0	29,300	0.00
<b>Jumlah</b>	<b>2,149,709,248</b>	<b>1,487,211,062</b>	<b>662,498,186</b>	<b>44.55</b>

Saldo Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2009 sebesar Rp1.487.211.062,00. Saldo tersebut telah seluruhnya disetor ke kas negara dan diserahkan kepada pihak lain pada Tahun Anggaran 2010.

Saldo Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2010 sebesar Rp2.149.709.248,00. Saldo tersebut telah seluruhnya disetor ke kas negara dan diserahkan kepada pihak lain pada Tahun Anggaran 2011.

Penyetoran saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran ke Kas Negara dan Pembayaran Kepada Pihak Lain per 31 Desember 2009 dapat dilihat pada Tabel 55 dan Tabel 56 berikut.

**Tabel 55**  
**Penyetoran Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran**  
**Ke Kas Negara Per 31 Desember 2009**  
**(dalam rupiah)**

Kode Akun Debit	Kode Akun Kredit	Uraian Eselon 1	Saldo Kas Per 31 Desember 2009	Penyetoran ke Kas Negara dalam TA 2010	Sisa Kas yang belum disetor ke kas negara
111821	212411	SETJEN	1.022.845	1.022.845	0
111821	212411	DJP	6.546.697	6.546.697	0
111821	212411	DJBC	22.643.070	22.643.070	0
111821	212411	DJPB	97.913.377	97.913.377	0
111821	212411	DJKN	50.331.848	50.331.848	0
111821	212411	BPPK	241.920.170	241.920.170	0
<b>Jumlah</b>			<b>420.378.007</b>	<b>420.378.007</b>	<b>0</b>

**Tabel 56**  
**Pembayaran Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran**  
**Kepada Pihak Lain Per 31 Desember 2009**  
**(dalam rupiah)**

No	Kode Akun Debit	Kode Akun Kredit	Uraian Eselon 1	Saldo Kas Per 31 Desember 2009	Pembayaran Kepada Pihak Lain dalam TA 2010	Sisa Pembayaran Kepada Pihak Lain
1	111821	211291	DJBC	22.015.375	22.015.375	0
2	111821	211291	DJPB	200.288.180	200.288.180	0
3	111821	211291	DJKN	92.220.000	92.220.000	0
4	111821	211291	BPPK	752.309.500	752.309.500	0
Jumlah				1.066.833.055	1.066.833.055	0

Penyetoran saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran ke Kas Negara dan Pembayaran Kepada Pihak Lain per 31 Desember 2010 pada TA 2011 dapat dilihat pada Tabel 57 dan Tabel 58 berikut.

**Tabel 57**  
**Penyetoran Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran**  
**Ke Kas Negara Per 31 Desember 2010**  
**(dalam rupiah)**

Kode Akun Debit	Kode Akun Kredit	Uraian Eselon 1	Saldo Kas Per 31 Desember 2010	Penyetoran ke Kas Negara dalam TA 2011	Sisa Kas yang belum disetor ke kas negara
111821	212411	ITJEN	316,795,001	316,795,001	0
111821	212411	DJA	933,012,949	933,012,949	
111821	212411	DJP	12,649,358	12,649,358	0
111821	212411	DJBC	43,585	43,585	0
111821	212411	DJPB	124,470,693	124,470,693	0
111821	212411	BAPEPAMLK	418,436,050	418,436,050	0
111821	212411	BPPK	49,967,779	49,967,779	0
111821	212411	BKF	29,300	29,300	0
JUMLAH			1,855,404,715	1,855,404,715	0

**Tabel 58**  
**Pembayaran Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran**  
**Kepada Pihak Lain Per 31 Desember 2010**  
**(dalam rupiah)**

No	Kode Akun Debit	Kode Akun Kredit	Uraian Eselon 1	Saldo Kas Per 31 Desember 2010	Pembayaran Kepada Pihak Lain dalam TA 2011	Sisa Pembayaran Kepada Pihak Lain
1	111821	211291	ITJEN	30.518.000	30.518.000	0
2	111821	211291	DJP	27.535.000	27.535.000	0
3	111821	211291	DJBC	132.437.753	132.437.753	0
4	111821	211291	DJPB	54.825.647	54.825.647	0
5	111821	211291	DJKN	33.114.133	33.114.133	0
6	111821	211291	BPPK	15.874.000	15.874.000	0
Jumlah				294.304.533	294.304.533	0

Terdapat saldo Dana Operasional Taktis Pengamanan Penerimaan Negara (DOTPPN) sebesar Rp597.366.124,00 yang merupakan dana untuk membiayai kegiatan Kementerian Keuangan dalam rangka mengamankan keuangan negara.

### C.2.1.4 Kas pada BLU

Kas pada BLU  
Rp1.085.722.227.076,00

Nilai Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp1.085.722.227.076,00 dan Rp684.555.535.893,00.

Posisi Kas pada Badan Layanan Umum pada unit Eselon I lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2010 dan 2009 dapat dilihat pada Tabel 59 berikut.

**Tabel 59**  
**Kas pada Badan Layanan Umum Per Eselon I**  
**Per 31 Desember 2010 dan 2009**  
**(dalam rupiah)**

ESELON I	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Kenaikan/ (Penurunan)	%
SETJEN	1.070.744.238.147	674.729.771.975	396.014.466.172	58,69
BPPK	14.977.988.929	9.825.763.918	5.152.225.011	52,44
Jumlah	<b>1.085.722.227.076</b>	<b>684.555.535.893</b>	<b>401.166.691.183</b>	<b>58,60</b>

#### Penjelasan Kas pada Badan Layanan Umum

- Nilai sebesar Rp1.070.744.238.147,00 di Setjen merupakan besaran kas di bank milik PIP (baik dalam bentuk giro maupun deposito dengan masa sampai dengan tiga bulan), Kas Di Bendahara Penerimaan selain kewajiban setor Kas Negara dan Kas di Bendahara Pengeluaran.

Rincian saldo Kas pada BLU PIP sebagai berikut:

Nomor	Nama Bank	Jumlah Rupiah
1	2	3
1.	Deposito BRI	115.000.000.000
2.	Deposito Bank Mandiri	140.000.000.000
3.	Deposito BNI	256.000.000.000
4.	Deposito BTN	50.000.000.000
5.	Deposito Bank Bukopin	15.000.000.000
6.	Deposito Bank bjb	108.500.000.000
7.	Deposito BTPN	20.000.000.000
8.	Deposito Bank DKI	22.000.000.000
9.	Deposito BRI Syariah	35.000.000.000
10.	Deposito Bank Muamalat	193.500.000.000
11.	Deposito Bank Syariah Mandiri	40.000.000.000
12.	Deposito Bank bjb Syariah	37.500.000.000
13.	Deposito Bank Bukopin Syariah	10.500.000.000
14.	Kas di Bendahara pengeluaran	183.360.340
15.	Kas di Bendahara penerimaan	25.945.207.375
16.	Kas BLU yang dibukukan pada RIDI	1.615.670.332
17.	Kas di Rekening IGIF	-
18.	Kas di Bank Kustodian	-
19.	Kas yang berada pada pihak ketiga	-
20.	Pembulatan	100
<b>Jumlah</b>		<b>1.070.744.238.147</b>

2. Nilai sebesar Rp14.977.988.929,00 di BPPK merupakan Saldo Kas pada BLU STAN. Rincian Saldo Kas pada BLU STAN sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
<b>1.</b>	<b>Saldo Rekening Koran</b>	<b>14.858.586.995</b>
	- Saldo Rekening Koran	15.510.240.420
	- Cek Beredar	(651.653.425)
<b>2.</b>	<b>Kas Tunai</b>	<b>119.401.934</b>
	- Kas di Brankas	91.448.834
	- Kas di LPMAK	43.453.100
	- Honor yang belum dibayar	(15.500.000)
<b>JUMLAH (1+2)</b>		<b>14.977.988.929</b>

**Tabel 61**  
**Rincian Piutang Pajak Per Jenis Pajak**  
**Per 31 Desember 2010 dan 2009**  
**(dalam rupiah)**

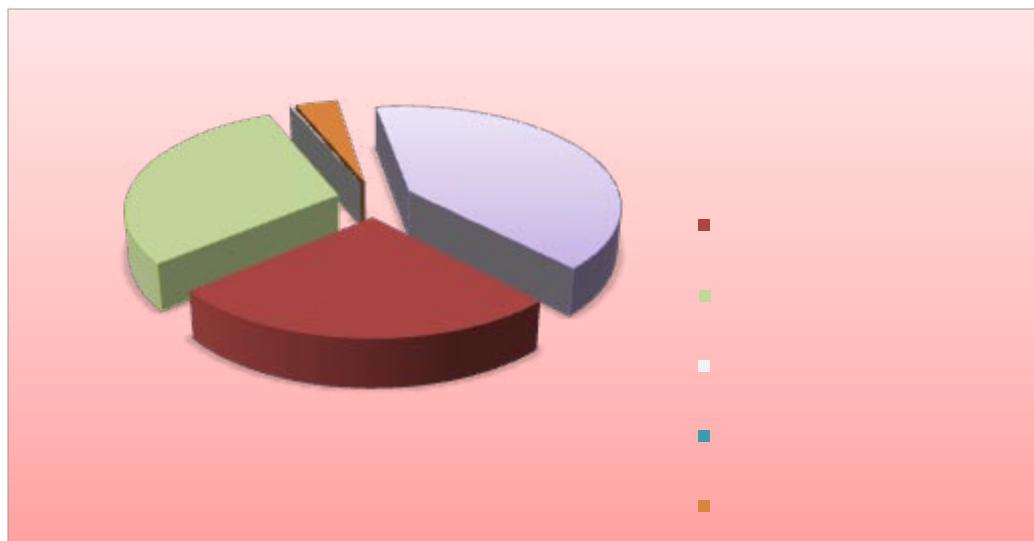
Jenis Piutang	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang PPh Pasal 21	1.266.406.447.889	951.534.554.486	314.871.893.403	33,09
Piutang PPh Pasal 22	483.960.766.219	489.840.716.690	(5.879.950.471)	(1,20)
Piutang PPh Pasal 23	2.203.941.784.322	1.688.528.889.756	515.412.894.566	30,52
Piutang PPh Pasal 25 OP	1.011.934.207.339	1.053.689.834.133	(41.755.626.794)	(3,96)
Piutang PPh Pasal 25 Badan	14.375.139.273.281	16.424.024.121.140	(2.048.884.847.859)	(12,47)
Piutang PPh Pasal 26	1.707.425.467.877	1.586.493.805.101	120.931.662.776	7,62
Piutang PPh Final dan Fiskal LN	756.662.431.444	535.862.689.996	220.799.741.448	41,20
Piutang PPN Dalam Negeri	13.758.554.551.125	14.533.638.585.793	(775.084.034.668)	(5,33)
Piutang PPNBM Dalam Negeri	279.736.078.186	280.485.129.787	(749.051.601)	(0,27)
Piutang PBB Pedesaan	1.617.432.556.023	1.327.539.551.495	289.893.004.528	21,84
Piutang PBB Perkotaan	9.391.433.663.020	7.542.885.445.040	1.848.548.217.980	24,51
Piutang PBB Perkebunan	388.198.560.617	474.394.030.911	(86.195.470.294)	(18,17)
Piutang PBB Kehutanan	617.951.905.189	492.606.633.014	125.345.272.175	25,45
Piutang PBB Pertambangan	4.029.788.497.473	158.566.341.854	3.871.222.155.619	2.441,39
Piutang BPHTB	101.220.473.265	179.947.361.649	(78.726.888.384)	(43,75)
Piutang PTLL	2.240.673.790	16.386.067.497	(14.145.393.707)	(86,33)
Piutang Bunga Penagihan PPh	2.016.033.203.366	2.263.304.065.654	(247.270.862.288)	(10,93)
<b>Jumlah</b>	<b>54.008.060.540.425</b>	<b>49.999.727.823.996</b>	<b>4.008.332.716.429</b>	<b>8,02</b>

Rincian Piutang Pajak Berdasarkan Umur Piutang per 31 Desember 2010 dapat dilihat pada Tabel 62 berikut.

**Tabel 62**  
**Rincian Piutang Pajak Berdasarkan Umur Piutang**  
**Per 31 Desember 2010**  
**(dalam rupiah)**

Umur Piutang	Jumlah
Sampai dengan 1 Tahun	17.268.606.805.698
Lebih dari 1 Tahun sampai dengan 2 Tahun	6.637.701.931.300
Lebih dari 2 Tahun sampai dengan 3 Tahun	4.452.057.145.021
Lebih dari 3 Tahun sampai dengan 4 Tahun	3.905.814.617.472
Lebih dari 4 Tahun sampai dengan 5 Tahun	3.519.530.401.484
Lebih dari 5 Tahun	18.224.349.638.997
<b>Jumlah</b>	<b>54.008.060.539.972</b>

**Grafik 18**  
**Komposisi Piutang Pajak Per Jenis Pajak**  
**Per 31 Desember 2010**



*SP3DRI*

Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI) merupakan pemberitahuan dari DJBC yaitu KPPBC kepada DJP melalui KPP terkait. Dalam SP3DRI tersebut antara lain disampaikan bahwa importir (Wajib Pajak) telah melakukan transaksi impor tetapi terdapat kewajiban PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 dalam rangka Impor yang belum dan/atau kurang dipenuhi.

Tindak lanjut SP3DRI mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-78/PJ./2008 tanggal 18 Desember 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Lanjut Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI). Surat edaran tersebut antara lain mengatur bahwa KPP dapat melakukan himbauan, penelitian/pemeriksaan dan menerbitkan SKPKB atas pajak-pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam SP3DRI tersebut. SKPKB sebagai tindak lanjut SP3DRI tersebut digunakan sebagai penambahan piutang pajak dalam Laporan Perkembangan Piutang dari masing-masing KPP.

Data SP3DRI dari DJBC yang diterima Kantor Pelayanan Pajak selama Tahun Anggaran 2010 senilai Rp125.165.240.663,00. Dari nilai tersebut yang bisa ditindaklanjuti oleh DJP sebesar Rp122.107.722.255,00. Terdapat selisih antara nilai yang diserahkan dengan nilai yang bisa ditindaklanjuti sebesar R3.057.518.408,00. Selisih tersebut berasal dari:

1. SP3DRI yang sudah dilunasi oleh Wajib Pajak sebesar Rp1.650.238.624,00
2. Setelah dilakukan cek fisik atas SP3DRI diketahui bahwa terdapat selisih antara rekapitulasi SP3DRI dengan dokumen fisiknya sebesar Rp1.407.279.784,00. Hasil rekapitulasi lebih besar daripada dokumen fisiknya.

Sesuai dengan SE-78/PJ./2008 atas data SP3DRI yang diterima telah ditindaklanjuti dengan hasil sebagai berikut:

1. SP3DRI yang telah dibayar oleh Wajib Pajak senilai Rp8.294.425.974,00.
  2. SP3DRI yang menjadi piutang pajak melalui penerbitan SKP/STP sebesar Rp53.380.971,00
  3. SP3DRI yang dilakukan klarifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak Importir dan belum diterbitkan SKPKB senilai Rp22.101.094.817,00.
  4. Sedangkan sisanya masih dalam proses penyelesaian.
- 
2. Nilai Piutang Pajak pada DJBC per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp16.937.210.906.195,00 dan Rp13.659.045.063.184,00. Piutang pajak merupakan tagihan pajak yang telah mempunyai surat ketetapan yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

Rincian Piutang Pajak per Jenis Pajak per 31 Desember 2010 dapat dilihat pada Tabel 63 berikut.

**Tabel 63**  
**Rincian Piutang Pajak Per Jenis Pajak**  
**Per 31 Desember 2010**  
**(dalam rupiah)**

Akun	Nama Perkiraan	Rupiah
113123	Piutang PPh Pasal 22 Impor	57.174.673.159
113131	Piutang PPN Dalam Negeri	2.609.131.603.212
113132	Piutang PPN Impor	264.640.361.368
113139	Piutang PPN Lainnya	24.934.000
113142	Piutang PPnBM Impor	20.402.870.685
113161	Piutang Cukai Hasil Tembakau	12.646.209.694.700
113163	Piutang Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	2.969.589.180
113164	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Cukai	2.899.526.340
113169	Piutang Pendapatan Cukai Lainnya	1.100.946.557
113174	Piutang Bunga Penagihan PPN	5.821.060.805
113181	Piutang Bea masuk	700.809.407.559
113183	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean	445.108.152.433
113184	Piutang Pendapatan Pabean Lainnya	179.085.323.897
113185	Piutang Pajak/Pungutan Ekspor	1.623.559.853
113186	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	33.897.172
113187	Piutang Pendapatan Bunga Bea Keluar	175.305.275
<b>Jumlah</b>		<b>16.937.210.906.195</b>

Rincian Piutang Pajak Berdasarkan Umur Piutang per 31 Desember 2010 dapat dilihat pada Tabel 64 berikut.

**Tabel 64**  
**Rincian Piutang Pajak Berdasarkan Umur Piutang**  
**Per 31 Desember 2010**  
**(dalam rupiah)**

Uraian Akun	0 s.d. 1 Thn	1 s.d. 2 Thn	2 s.d. 3 Thn	>3 Tahun	JUMLAH
Bea Masuk	113.448.347.408	41.052.323.405	125.293.301.896	421.015.434.851	700.809.407.559
Bea Keluar	426.378.321	-	-	1.197.181.532	1.623.559.853
Cukai Hasil Tembakau	12.645.989.341.100	11.553.600	-	208.800.000	12.646.209.694.700
Cukai MMEA	64.274.580	294.869.600	-	2.610.445.000	2.969.589.180
Pabean Lainnya	16.534.737.201	8.157.293.358	20.854.478.133	133.538.815.205	179.085.323.897
Cukai Lainnya	645.802.848	454.819.709	324.000	-	1.100.946.557
Denda Administrasi Pabean	60.000.112.101	76.180.168.698	154.883.437.257	154.044.434.378	445.108.152.433
Denda Administrasi Bea Keluar	33.897.172	-	-	-	33.897.172
Denda Administrasi Cukai	1.723.070.040	62.496.000	1.113.960.300	-	2.899.526.340
Bunga Bea Keluar	175.305.275	-	-	-	175.305.275
PPN Impor	76.557.431.321	17.051.549.076	86.492.642.279	84.538.738.693	264.640.361.368
PPN Lain	24.934.000	-	-	-	24.934.000
PPN Dalam Negeri	2.608.922.933.219	-	-	208.669.993	2.609.131.603.212
PPN-BM	5.245.104.294	4.738.060.808	1.139.437.980	9.280.267.603	20.402.870.685
PPh Pasal 22 Impor	17.929.465.232	4.277.597.491	19.649.272.095	15.318.338.342	57.174.673.159
Piutang Bunga Penagihan PPN	1.616.657.534	4.204.403.271	-	-	5.821.060.805
	<b>15.549.337.791.645</b>	<b>156.485.135.015</b>	<b>409.426.853.939</b>	<b>821.961.125.596</b>	<b>16.937.210.906.195</b>

Sesuai dengan Peraturan DJBC Nomor P-47/BC/2010 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di DJBC pasal 11 ayat (5), kualitas piutang ditetapkan menjadi 4 golongan, yaitu:

1. Lancar, ditetapkan apabila umur piutang belum lebih dari 1 tahun;
2. Kurang lancar, ditetapkan apabila umur piutang lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
3. Diragukan, ditetapkan apabila umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun;
4. Macet, ditetapkan apabila umur piutang lebih dari 3 tahun.

Penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan sebesar:

- a. 5% (lima permil) dari piutang dengan kualitas lancar;
- b. 10% (sepuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
- d. 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada DJBC per 31 Desember 2010 dapat dilihat pada Tabel 65 berikut.

**Tabel 65  
Penyisihan Piutang Tak Tertagih  
Per 31 Desember 2010  
(dalam rupiah)**

	0 s.d. 1 Thn	1 s.d. 2 Thn	2 s.d. 3 Thn	> 3 Tahun	JUMLAH
Bea Masuk	567.241.737	4.105.232.341	62.646.650.948	421.015.434.851	488.334.559.876
Bea Keluar	2.131.892	-	-	1.197.181.532	1.199.313.424
Cukai Hasil Tembakau	63.229.946.706	1.155.360	-	208.800.000	63.439.902.066
Cukai MMEA	321.373	29.486.960	-	2.610.445.000	2.640.253.333
Pabean Lainnya	82.673.686	815.729.336	10.427.239.066	133.538.815.205	144.864.457.294
Cukai Lainnya	3.229.014	45.481.971	162.000	-	48.872.985
Denda Administrasi Pabean	300.000.561	7.618.016.870	77.441.718.629	154.044.434.378	239.404.170.437
Denda Administrasi Bea Keluar	169.486	-	-	-	169.486
Denda Administrasi Cukai	8.615.350	6.249.600	556.980.150	-	571.845.100
Bunga Bea Keluar	876.526	-	-	-	876.526
PPN Impor	382.787.157	1.705.154.908	43.246.321.140	84.538.738.693	129.873.001.896
PPN Lain	124.670	-	-	-	124.670
PPN Dalam Negeri	13.044.614.666	-	-	208.669.993	13.253.284.659
PPN-BM	26.225.521	473.806.081	569.718.990	9.280.267.603	10.350.018.195
PPh Pasal 22 Impor	89.647.326	427.759.749	9.824.636.048	15.318.338.342	25.660.381.464
Piutang Bunga Penagihan PPN	8.083.288	420.440.327	-	-	428.523.615
	<b>77.746.688.958</b>	<b>15.648.513.501</b>	<b>204.713.426.970</b>	<b>821.961.125.596</b>	<b>1.120.069.755.026</b>

### C.2.1.6 Piutang Bukan Pajak

*Piutang Bukan  
Pajak  
Rp59.128.826.922  
.00*

Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp59.128.826.922,00 dan Rp87.368.486.446,00. Piutang Bukan Pajak merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran dan diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

Posisi Piutang Bukan Pajak per unit Eselon I per 31 Desember 2010 dan 2009 dapat dilihat pada Tabel 66 berikut.

**Tabel 66**  
**Piutang PNBP Per Unit Eselon I**  
**Per 31 Desember 2010 dan 2009**  
**(dalam rupiah)**

ESELON I	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Kenaikan/ (Penurunan)	%
SETJEN	4.862.500	0	4.862.500	0,00
DJA	7.832.412	0	7.832.412	0,00
DJP	0	132.694.979	(132.694.979)	(100,00)
DJBC	34.273.610.000	69.799.468.362	(35.525.858.362)	(50,90)
DJPB	278.740.115	23.301.852	255.438.263	1.096,21
DJKN	1.862.000	0	1.862.000	0,00
BAPEPAM-LK	24.212.798.767	17.405.801.313	6.806.997.454	39,11
BPPK	349.121.128	7.219.940	341.901.188	4.735,51
<b>Jumlah</b>	<b>59.128.826.922</b>	<b>87.368.486.446</b>	<b>(28.239.659.524)</b>	<b>(32,32)</b>

Saldo Piutang Bukan Pajak per Eselon I per 31 Desember 2010 sebesar Rp59.128.826.922,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	KETERANGAN	JUMLAH
1	Kelebihan uang makan, lembur, dan tunjangan	19,212,638
2	Kelebihan belanja barang	56,991,500
3	Sewa rumah dinas	1,935,075
4	Sewa Kantin	3,300,000
5	Sewa Koperasi	4,620,000
6	Sewa Mess	192,680,902
JUMLAH		278,740,115

Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Kenaikan/(Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	Rp	%
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6 = 5/4 X 100
1	<b>Piutang atas Denda di Bidang Pasar Modal</b>	<b>1.956.200.000</b>	<b>456.348.000</b>	<b>1.499.852.000</b>	<b>328,66</b>
	- Piutang atas denda yang belum jatuh tempo	1.956.200.000	322.600.000	1.633.600.000	506,39
	- Piutang atas denda yang telah jatuh tempo tetapi belum terbayar	-	128.000.000	(128.000.000)	(100,00)
	- Piutang atas bunga belum terbayar	-	5.748.000	(5.748.000)	(100,00)
2	<b>Piutang atas Denda di Bidang Perasuransian</b>	<b>284.580.000</b>	<b>714.210.000</b>	<b>(429.630.000)</b>	<b>(60,15)</b>
	- Piutang atas denda yang telah jatuh tempo tetapi belum terbayar	279.000.000	714.210.000	(435.210.000)	(60,94)
	- Piutang atas bunga belum terbayar	5.580.000	-	5.580.000	-
2	<b>Piutang atas Denda di Bidang Dana Pensiun</b>	<b>104.562.000</b>	<b>1.136.000.000</b>	<b>(1.031.438.000)</b>	<b>(90,80)</b>
	- Piutang atas denda yang belum jatuh tempo	84.000.000	-	84.000.000	-
	- Piutang atas denda yang telah jatuh tempo tetapi belum terbayar	20.394.000	1.136.000.000	(1.115.606.000)	(98,20)
	- Piutang atas bunga belum terbayar	168.000	-	168.000	-
3	<b>Piutang dari iuran badan usaha di bidang pasar modal dan lembaga keuangan</b>	<b>21.867.456.767</b>	<b>14.694.243.313</b>	<b>7.173.213.454</b>	<b>48,82</b>
4	<b>Piutang dari denda karena wanprestasi dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah</b>	-	<b>405.000.000</b>	<b>(405.000.000)</b>	<b>(100,00)</b>
<b>Jumlah (1+2)</b>		<b>24.212.798.767</b>	<b>17.405.801.313</b>	<b>6.806.997.454</b>	<b>39,10</b>

Berdasarkan tabel di atas, maka Piutang Bukan Pajak Bapepam-LK per 31 Desember 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp6.806.997.454,00 atau 39,10 persen apabila dibandingkan dengan posisi saldo awal per 31 Desember 2009.

Adapun perubahan/mutasi tersebut berasal dari :

- a. Bidang Pasar Modal mengalami kenaikan sebesar Rp1.499.852.000,00 atau 328,66 persen;
- b. Bidang Perasuransian mengalami penurunan sebesar Rp429.630.000,00 atau 60,15 persen;
- c. Bidang Dana Pensiun mengalami penurunan sebesar Rp1.031.438.000,00 atau 90,80 persen;
- d. Piutang dari iuran Badan Usaha di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan mengalami kenaikan sebesar Rp7.173.213.454,00 atau 48,82 persen.
- e. Piutang dari denda karena wanprestasi dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah mengalami penurunan sebesar Rp405.000.000,00 (pada tahun 2010 tidak terdapat piutang atas denda tersebut).

Perubahan/mutasi tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bidang Pasar Modal

<b>1.</b>	<b>Saldo Awal (1 Januari 2010)</b>	<b>456.348.000</b>
<b>2.</b>	<b>Penambahan (a+b)</b>	<b>14.316.903.000</b>
a.	Tambahan Piutang Bidang Pasar Modal	14.272.249.000
b.	Penyesuaian	44.654.000
<b>3.</b>	<b>Pengurangan (a+b)</b>	<b>12.817.051.000</b>
a.	Pembayaran Piutang Bidang Pasar Modal	10.753.385.000
b.	Pelimpahan Piutang Bidang Pasar Modal ke DJKN (tidak termasuk pelimpahan dari kasus pailit)	2.063.666.000
<b>Saldo Akhir 31 Desember 2010 (1+2-3)</b>		<b>1.956.200.000</b>

Adapun rincian atas penyesuaian tersebut sebesar Rp44.654.000,00 adalah sebagai berikut:

<b>A. Penambahan</b>	<b>77.536.000</b>
1 Kelebihan Pembayaran	508.000
- a.n. Basri Hardjosumarto	8.000
- KAP DRS. A. Salam Rauf & Rekan	200.000
- a.n. PT Mandiri Sekuritas	300.000
2 Pembayaran dilakukan sebelum dikenakan sanksi :	77.000.000
- a.n. Setiawan, MAPPI	300.000
- a.n. Syukrial	300.000
- a.n. a.n. Luki Hentriawan	1.000.000
- a.n. Richard K. Utomo	400.000
- a.n. PT. Apac Citra Centertex	30.000.000
- a.n. PT. Apac Citra Centertex	45.000.000
3 Penambahan bunga karena telah lewat 2 bulan sejak tanggal	28.000
- a.n. EM. Widianingsih	4.000
- a.n. Sogeng Pamuji	14.000
4 Penyesuaian Bunga Piutang a.n PT Eficorp Securities, dikarenakan kelebihan pembayaran	10.000
<b>B. Pengurangan</b>	<b>32.882.000</b>
5 Koreksi pencatatan pembayaran (seharusnya pembayaran tahun 2009 a.n. KAP Tjahjadi)	700.000
6 Ralat jumlah sanksi denda a.n PT Agrodana Securities	1.140.000
7 Penyesuaian pencatatan atas pembayaran a.n. Richard K	400.000
8 Bunga diabaikan, dikarenakan telah melunasi pokok piutang sebelum jatuh tempo	642.000
- a.n. Setiawan, MAPPI	8.000
- a.n. PT. Kertas Basuki Rahmat	60.000
- a.n. PT. Grha Satu Enam Lima	540.000
- a.n. PT. Mandiri Sekuritas	4.000
- a.n. PT. Sara Lee Body Care Indonesia	10.000
- a.n. PT. Sumber Alfaria	20.000
9. Penyesuaian Pokok Piutang a.n PT Apac Citra Centertex	30.000.000
<b>Total (A-B)</b>	<b>44.654.000</b>

b. Bidang Perasuransian

<b>1. Saldo Awal (1 Januari 2010)</b>	<b>714.210.000</b>
<b>2. Tambahan Piutang Bidang Perasuransian</b>	<b>5.774.360.000</b>
<b>3. Pengurangan (a+b)</b>	<b>6.203.990.000</b>
a. Pembayaran Piutang	430.330.000
b. Pelimpahan Piutang ke DJKN	5.614.660.000
c. Reklasifikasi ke aset lainnya (dicabut izin usaha)	142.000.000
d. Pembatalan sanksi denda	17.000.000
<b>Saldo Akhir 31 Desember 2010 (1+2-3)</b>	<b>284.580.000</b>

c. Bidang Dana Pensiun

<b>1. Saldo Awal (1 Januari 2010)</b>	<b>1.136.000.000</b>
<b>2. Penambahan (a)</b>	<b>235.362.000</b>
a. Tambahan Piutang Bidang Dana Pensiun	235.362.000
<b>3. Pengurangan (a+b+c)</b>	<b>1.266.800.000</b>
a. Pembayaran Piutang Bidang Dana Pensiun	129.300.000
b. Reklasifikasi piutang sebelum tahun 2010	1.136.000.000
c. Penyesuaian (ralat 2 surat sanksi)	1.500.000
<b>Saldo Akhir 31 Desember (1+2-3)</b>	<b>104.562.000</b>

Penyesuaian bidang dana pensiun berupa ralat atas 2 (dua) buah sanksi administratif yaitu:

- 1) Ralat surat sanksi a.n. DP Persekutuan Gereja Indonesia dengan S-6100/BL/2010 tanggal 2 Juli 2010 dari Rp600.000,00 menjadi nihil;
- 2) Ralat surat sanksi a.n. Yayasan LPPPK Sinode dengan S-6099/BL/2010 tanggal 6 Juli 2010 dari Rp4.200.000,00 menjadi Rp3.300.000,00;

Rincian dan penyisihan Piutang Bukan Pajak Bapepam-LK per 31 Desember 2010 terlampir.

Posisi Bagian Lancar TGR per unit Eselon I lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2010 dan 2009 dapat dilihat pada Tabel 68 berikut.

**Tabel 68**  
**Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Per Eselon I**  
**Per 31 Desember 2010 dan 2009**  
**(dalam rupiah)**

ESELON I	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Kenaikan/ (Penurunan)	%
SETJEN	35.250.000	6.000.000	29.250.000	487,50
DJP	44.721.008	53.764.428	(9.043.420)	(16,82)
DJBC	43.099.650	91.438.844	(48.339.194)	(52,87)
DJPK	36.000.000	0	36.000.000	0,00
DJPB	125.659.200	59.734.150	65.925.050	110,36
DJKN	2.999.997	17.124.996	(14.124.999)	(82,48)
BPPK	39.475.000	0	39.475.000	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>327.204.855</b>	<b>228.062.418</b>	<b>99.142.437</b>	<b>43,47</b>

### C.2.1.9 Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

Piutang dari  
Kegiatan  
Operasional BLU  
Rp1.800.000,00

Nilai Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp1.800.000,00 dan Rp24.255.654.147,00.

Posisi Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per unit Eselon I lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2010 dan 2009 dapat dilihat pada Tabel 70 berikut.

**Tabel 70**  
**Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Per Eselon I**  
**Per 31 Desember 2010 dan 2009**  
**(dalam rupiah)**

ESELON I	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Kenaikan/ (Penurunan)	%
SETJEN	0	24,105,879,147	(24,105,879,147)	(100.00)
BPPK	1,800,000	149,775,000	(147,975,000)	(98.80)
<b>Jumlah</b>	<b>1,800,000</b>	<b>24,255,654,147</b>	<b>(24,253,854,147)</b>	<b>(99.99)</b>

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU pada Unit Eselon I Setjen per 31 Desember 2010 merupakan piutang penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari Kegiatan Operasional BLU PIP yaitu dari kegiatan investasi jangka panjang baik investasi langsung yang belum diselesaikan pada tanggal neraca dan diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Nilai sebesar RpNihil merupakan piutang yang dihitung secara akrual pada tanggal 31 Desember 2010.

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU pada Unit Eselon I BPPK per 31 Desember 2010 merupakan piutang penerimaan bukan pajak dari Kegiatan Operasional BLU STAN yang berasal dari Piutang Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya sebesar Rp1.800.000,00.

Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU di SETJEN-PIP per 31 Desember 2010 dapat dilihat pada Tabel 72 dan Tabel 73 berikut.

**Tabel 72**  
**Rincian Piutang Kekurangan Jasa Giro**  
**Per 31 Desember 2010**  
**(dalam rupiah)**

Kode Akun 1	Uraian 2	Jumlah Rupiah 3
113831	Bunga deposito Bank Mandiri	Rp 7.005.819
	Kekurangan jasa giro Rek Pendapatan	Rp 316.781
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 7.322.600</b>

**Tabel 73**  
**Rincian Piutang Dari Kegiatan Non Operasional BLU**  
**Per 31 Desember 2010**  
**(dalam rupiah)**

Kode Perkiraan 1	Uraian Piutang 2	Jumlah Rupiah 3
113831	Bunga deposito Bank BRI	Rp 1.467.123.288
	Bunga deposito Bank Mandiri	Rp 1.439.890.411
	Bunga deposito Bank BNI	Rp 557.698.630
	Bunga deposito Bank BTN	Rp 517.808.219
	Bunga deposito Bank Jabar Banten	Rp 264.575.342
	Bunga deposito Bank Bukopin	Rp 675.541.096
	Bunga deposito Bank BTPN	Rp 10.136.986
	Bunga deposito Bank DKI	Rp 306.684.932
	Bunga deposito Bank BRI Syariah	Rp 41.917.808
	Bunga deposito Bank Mu'amalat	Rp 148.958.904
	Bunga deposito Bank Syariah Bukopin	Rp 5.350.685
	Bunga deposito Syariah Mandiri	Rp 239.342.466
	Bunga deposito Syariah Jabar	Rp 18.616.438
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 5.693.645.205</b>

Piutang dari Kegiatan Non Operasional pada Eselon I BPPK per 31 Desember 2010 merupakan Piutang Bukan Pajak yang berasal dari Kegiatan Non Operasional BLU STAN sebesar Rp445.269.263,00. Piutang tersebut berasal dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

#### C.2.1.11 Persediaan

Persediaan  
Rp251.167.008.1  
02,00

Nilai Persediaan per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp251.167.008.102,00 dan Rp184.780.228.921,00. Nilai tersebut merupakan hasil stock opname per 31 Desember yang dinilai berdasarkan harga pembelian/perolehan terakhir. Satuan kerja lingkup Kementerian Keuangan telah menyelenggarakan Akuntansi Persediaan melalui aplikasi yang merupakan bagian dari SIMAK BMN.

Posisi Persediaan per unit Eselon I lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2010 dan 2009 dapat dilihat pada Tabel 74 berikut.

**Tabel 74**  
**Persediaan Per Eselon I**  
**Per 31 Desember 2010 dan 2009**  
**(dalam rupiah)**

Eselon I	31 Des 2010	31 Des 2009	Kenaikan/ (Penurunan)	%
SETJEN	3,367,068,642	2,909,267,656	457,800,986	15.74
ITJEN	554,033,606	450,635,697	103,397,909	22.94
DJA	1,312,867,811	785,928,012	526,939,799	67.05
DJP	157,533,976,337	113,685,538,106	43,848,438,231	38.57
DJBC	55,740,538,953	40,342,824,191	15,397,714,762	38.17
DJKP	255,842,589	130,864,681	124,977,908	95.50
DJPU	481,327,222	649,120,771	(167,793,549)	(25.85)
DJPB	21,547,320,090	17,097,752,335	4,449,567,755	26.02
DJKN	5,877,270,480	5,347,221,760	530,048,720	9.91
BAPEPAM-LK	1,616,574,329	1,680,941,000	(64,366,671)	(3.83)
BPPK	2,142,752,819	1,097,382,044	1,045,370,775	95.26
BKF	737,435,224	602,752,668	134,682,556	22.34
<b>Jumlah</b>	<b>251,167,008,102</b>	<b>184,780,228,921</b>	<b>66,386,779,181</b>	<b>35.93</b>

Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2010 per jenis persediaan dapat dilihat pada Tabel 75 berikut.

**Tabel 75**  
**Persediaan Per Jenis**  
**Per 31 Desember 2010**  
**(dalam rupiah)**

Akun	Jenis Persediaan	31 Desember 2010
115111	Barang Konsumsi	159,070,946,313
115112	Amunisi	1,588,091,644
115113	Bahan Untuk Pemeliharaan	10,106,545,674
115114	Suku Cadang	8,181,933,478
115121	Pita Cukai, Materai dan Leges	47,200,534,110
115124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	636,039,505
115127	Aset Lain-lain untuk diserahkan kepada masyarakat	20,638,580,083
115131	Bahan Baku	1,340,610,664
115191	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	13,934,120
115199	Persediaan Lainnya	2,389,792,511
<b>Jumlah</b>		<b>251,167,008,102</b>

**Tabel 76**  
**Persediaan BLU Per Eselon I**  
**Per 31 Desember 2010 dan 2009**  
**(dalam rupiah)**

Eselon I	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Kenaikan/ (Penurunan)	%
SETJEN	74,536,850	34,226,800	40,310,050	117.77
BPPK	1,479,386,974	1,142,596,967	336,790,007	29.48
<b>Jumlah</b>	<b>1,553,923,824</b>	<b>1,176,823,767</b>	<b>377,100,057</b>	<b>32.04</b>

Perjanjian Investasi antara PIP dengan PT Wijaya Karya Nomor 101 tanggal 29 Juli 2010 dalam rangka Pemberian Pinjaman Modal Kerja untuk Pembangunan Terminal *LPG Pressurized* di Tanjung Sekong Banten dengan nilai pinjaman sebesar Rp50.000.000.000,00. Pinjaman telah disalurkan sebesar Rp20.000.000.000,00 pada tanggal 29 Desember 2010.

Investasi yang dilaksanakan PIP sejak berdiri sampai TA 2009 disajikan di BA 015, namun mulai TA 2010 dipertanggungjawabkan melalui BA 999.03.

**ASET TETAP****C.2.3 Aset Tetap**

*Aset Tetap  
Rp36.058.407.872.153,00*

Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar **Rp36.058.407.872.153,00** dan **Rp33.779.034.063.296,00**. Nilai tersebut termasuk Koreksi Nilai dari Tim Penertiban Aset Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) pada tahun 2010 sebesar **Rp10.304.597.953,00**.

Dalam rangka penyajian nilai wajar aset tetap milik pemerintah, DJKN telah melaksanakan inventarisasi dan penilaian terhadap aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2004, termasuk yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Penjelasan mengenai hasil koreksi nilai aset tetap selengkapnya sesuai dengan hasil penilaian Tim Penilaian Aset DJKN dijelaskan dalam pengungkapan lainnya.

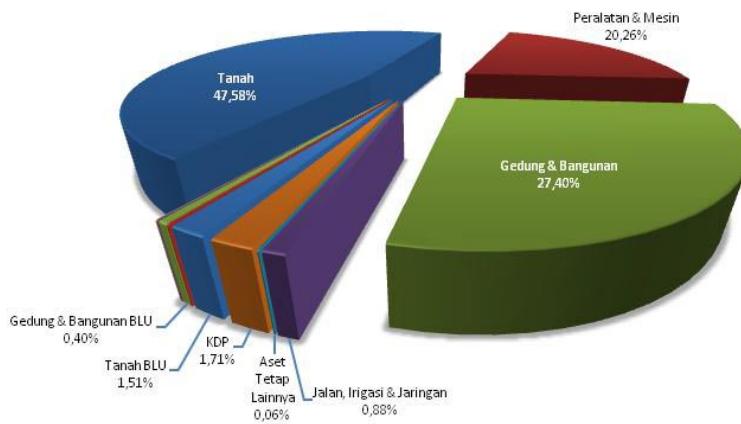
Rincian Aset Tetap menurut jenis Aset Tetap dapat dilihat pada Tabel 78 berikut.

**Tabel 78**  
**Perbandingan Komposisi Aset Tetap Per Jenis Aset**  
**Per 31 Desember 2010 dan 2009**  
**(dalam rupiah)**

Perk	Uraian	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Naik / (Turun)	%
1311	Tanah	17.154.828.794.908	16.447.664.813.816	707.163.981.092	4,30%
1313	Peralatan dan Mesin	7.306.062.037.508	6.424.420.868.487	881.641.169.021	13,72%
1315	Gedung dan Bangunan	9.880.476.902.813	9.173.928.261.053	706.548.641.760	7,70%
1317	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	316.775.657.845	194.929.862.012	121.845.795.833	62,51%
1319	Aset Tetap Lainnya	20.496.576.201	259.015.726.496	(238.519.150.295)	-92,09%
1321	Konstruksi Dalam Pengerjaan	615.651.377.375	629.408.676.151	(13.757.298.776)	-2,19%
1351	Tanah BLU	545.192.062.827	543.228.844.000	1.963.218.827	0,36%
1352	Peralatan dan Mesin BLU	31.697.703.142	17.514.762.483	14.182.940.659	80,98%
1353	Gedung dan Bangunan BLU	144.672.506.225	62.505.104.506	82.167.401.719	131,46%
1354	Jalan, Irigasi & Jaringan BLU	16.745.701.264	3.702.124.784	13.043.576.480	352,33%
1355	Aset Tetap Lainnya BLU	7.486.585.860	5.621.511.860	1.865.074.000	33,18%
1356	KDP BLU	18.321.966.185	17.093.507.648	1.228.458.537	7,19%
	<b>Jumlah</b>	<b>36.058.407.872.153</b>	<b>33.779.034.063.296</b>	<b>2.279.373.808.857</b>	<b>6,75%</b>

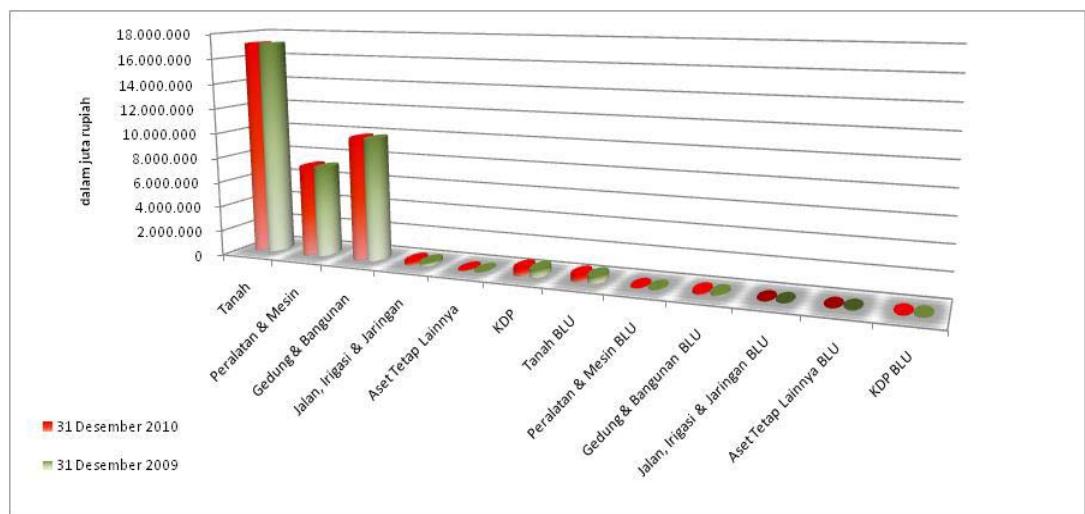
Komposisi Aset Tetap menurut Jenis Aset per 31 Desember 2010 dapat dilihat pada Grafik 19 berikut.

**Grafik 19**  
**Komposisi Aset Tetap Per Jenis Aset**  
**Per 31 Desember 2010**



Perkembangan Aset Tetap per jenis Aset Tetap dapat dilihat pada Grafik 20 berikut.

**Grafik 20**  
**Perkembangan Aset Tetap per Jenis Aset Tetap**



Mutasi Aset Tetap Kementerian Keuangan selama periode TA 2010 dapat dilihat pada Tabel 79 berikut.

**Tabel 79**  
**Mutasi/Perubahan Aset Tetap**

Kode	Uraian transaksi	Jumlah
	<b>SALDO AWAL</b>	<b>33.779.034.063.296</b>
	Reklasifikasi saldo awal	8.572.568.402
	Reklasifikasi menjadi ATR	22.519.457.067
100	Penambahan Saldo Awal	214.481.961.236
101	Pembelian	1.078.008.088.759
102	Transfer Masuk	744.703.754.891
103	Hibah (Masuk)	5.131.991.395
104	Rampasan	1.967.600.000
105	Penyelesaian Pembangunan	713.742.976.696
106	Pembatalan Penghapusan	551.184.726
107	Reklasifikasi Masuk	1.273.026.656.822
111	Pertukaran	5.071.552.364
112	Perolehan Lainnya	815.481.982
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	38.574.803.202
199	Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	6.268.320.842
202	Pengembangan Nilai Aset	66.032.509.797
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	38.474.936.287
205	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	105.553.854.755
206	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	142.247.642.751
208	Pengembangan melalui KDP	298.518.667.134
501	Mutasi Saldo Awal KDP	35.129.351.250
502	Perolehan KDP	71.931.472.074
503	Pengembangan KDP	955.795.389.658
506	Transfer Masuk KDP	27.203.182.828
	<b>Mutasi Tambah</b>	<b>5.854.323.404.918</b>
	Pembulatan saldo awal	-54.000
	Write off Aset yang hilang	-127.799.000
	Reklasifikasi saldo awal	-56.935.483.580
201	Pengurangan Nilai Aset	-19.398.341.605
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	-102.211.728.836
205	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	-95.249.256.802
301	Penghapusan	-128.262.185.420
302	Transfer Keluar	-576.295.304.049
303	Hibah (Keluar)	-34.019.240.320
304	Reklasifikasi Keluar	-1.273.586.989.115
305	Koreksi Pencatatan	-88.131.647.696
399	Penghapusan semu karena reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya	-13.179.465
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	-98.130.150.124
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaannya	0
504	Koreksi Nilai KDP	-35.411.554.868
505	Penghapusan/Penghentian KDP	-21.159.411.386
507	Trnasfer Keluar KDP	-27.823.257.078
599	Reklasifikasi KDP menjadi Aset Jadi	-1.018.194.012.717
	<b>Mutasi Kurang</b>	<b>-3.574.949.596.061</b>
	<b>SALDO AKHIR</b>	<b>36.058.407.872.153</b>
		<b>36.058.407.872.153</b>

Rincian mutasi aset terkait belanja modal dapat dilihat pada Tabel 80 berikut.

**Tabel 80**  
**Rincian Mutasi Aset terkait Belanja Modal**  
**Per 31 Desember 2010**

Uraian	Jumlah
<b>Jenis Belanja :</b>	
Belanja Modal Tanah	169.692.884.966
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	660.099.387.975
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	954.949.238.732
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	18.933.840.493
Belanja Modal Fisik Lainnya	42.565.895.798
Belanja Modal BLU	3.711.650.733
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>1.849.952.898.697</b>
<b>Transaksi :</b>	
Pembelian	1.078.008.088.759
Pengembangan Langsung	66.032.509.797
Koreksi Pencatatan	3.521.828.476
Perolehan dan Pengembangan KDP	1.016.843.395.272
Penyesuaian nilai KDP terkait belanja modal	(50.713.546.334)
Penambahan Aset Tetap Renovasi	49.629.797.930
<b>Jumlah Mutasi</b>	<b>2.163.322.073.900</b>
<b>Selisih</b>	<b>313.369.175.203</b>
<b>Penjelasan Selisih :</b>	
Pembelian tanah dengan Utang	(307.935.385.000)
Belanja Barang yang Dikapitalisasi	(9.808.493.673)
Belanja yang belum disahkan dengan dana BLU	(210.651.600)
Koreksi Nilai karena Pengembalian Belanja Modal	(187.390.630)
Pembulatan	(55.147)
Belanja Modal Tidak Dikapitalisasi	4.772.800.847
<b>Jumlah</b>	<b>(313.369.175.203)</b>
<b>Selisih setelah penyesuaian</b>	<b>-</b>

Posisi saldo awal aset tetap pada neraca SAK dibandingkan dengan posisi aset tetap pada SIMAK-BMN per 31 Desember 2009 dapat dilihat pada Tabel 81 berikut.

**Tabel 81**  
**Perbandingan Saldo Awal Aset Tetap**  
**Neraca dan SIMAK BMN per 31 Desember 2009**

No.	Uraian	Aset Tetap dalam Neraca	Aset Tetap dalam SIMAK-BMN	Selisih
01	Tanah	16.447.664.813.816	16.990.893.657.816	(543.228.844.000)
02	Peralatan dan Mesin	6.424.420.868.487	6.443.486.779.712	(19.065.911.225)
03	Gedung dan Bangunan	9.173.928.261.053	9.243.454.731.219	(69.526.470.166)
04	Jalan dan Jembatan	89.035.066.634	91.814.793.058	(2.779.726.424)
05	Irigasi	29.587.159.751	29.604.359.751	(17.200.000)
06	Jaringan	76.307.635.627	77.212.833.987	(905.198.360)
07	Aset Tetap Lainnya	259.015.726.496	207.701.754.776	51.313.971.720
08	Konstruksi Dalam Pengerjaan	629.408.676.151	639.480.764.139	(10.072.087.988)
09	Tanah BLU	543.228.844.000	0	543.228.844.000
10	Peralatan dan Mesin BLU	17.514.762.483	0	17.514.762.483
11	Gedung dan Bangunan BLU	62.505.104.506	0	62.505.104.506
12	Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU	3.702.124.784	0	3.702.124.784
13	Aset Tetap Lainnya BLU	5.621.511.860	0	5.621.511.860
14	KDP BLU	17.093.507.648	0	17.093.507.648
	<b>Jumlah</b>	<b>33.779.034.063.296</b>	<b>33.723.649.674.458</b>	<b>55.384.388.838</b>

Penjelasan selisih aset tetap dalam neraca SAK dengan laporan posisi BMN di neraca SIMAK-BMN per 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

1. Selisih kurang Tanah sebesar **Rp543.228.844.000,00** merupakan nilai Tanah BLU. Akun Tanah pada SIMAK-BMN tidak diklasifikasikan berdasarkan BLU dan Non BLU, sementara pada Neraca SAK Tanah diklasifikasikan sebagai Tanah (kode akun 131111) dan Tanah BLU (kode akun 135111).
2. Selisih kurang Peralatan dan Mesin sebesar **Rp19.065.911.225,00** terdiri dari:
  - Sebesar **Rp17.514.762.483,00** merupakan nilai Peralatan dan Mesin BLU. Akun Peralatan dan Mesin pada SIMAK-BMN tidak diklasifikasikan berdasarkan BLU dan Non BLU, sementara pada Neraca SAK Peralatan dan Mesin diklasifikasikan sebagai Peralatan dan Mesin (kode akun 131311) dan Peralatan dan Mesin BLU (kode akun 135211).
  - Sebesar **Rp1.416.293.938,00** merupakan reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya melalui jurnal SAK pada BPPK.
  - Sebesar **Rp134.854.804,00** merupakan reklasifikasi aset yang hilang pada DJP dan DJPK, dimana dalam neraca berdasarkan SAK, nilai tersebut telah dikeluarkan namun dalam laporan SIMAK-BMN belum dihapuskan.
3. Selisih kurang Gedung dan Bangunan sebesar **Rp69.526.470.166,00** terdiri dari:
  - Sebesar **Rp62.505.104.506,00** merupakan nilai Gedung dan Bangunan BLU. Akun Gedung dan Bangunan pada SIMAK-BMN tidak diklasifikasikan berdasarkan BLU dan Non BLU, sementara pada Neraca SAK Gedung dan Bangunan diklasifikasikan sebagai Gedung dan Bangunan dan Gedung dan Bangunan BLU.
  - Sebesar **Rp7.021.365.660,00** merupakan perbedaan saldo awal laporan neraca pada SAK dengan laporan posisi BMN di Neraca pada SIMAK-BMN dengan rincian sebagai berikut:

Eselon I	SAK	Posisi BMN di Neraca	Selisih
DJP *)	4.011.871.869.277	4.011.871.815.277	54.000
BPPK **)	226.574.810.971	233.596.230.631	(7.021.419.660)
<b>Jumlah</b>	<b>4.238.446.680.248</b>	<b>4.245.468.045.908</b>	<b>(7.021.365.660)</b>

Keterangan:

- \*) Selisih pada DJP merupakan pembulatan dalam aplikasi SIMAK-BMN pada saat melakukan koreksi atas penilaian Tim Penertiban DJKN Tahun 2009.
- \*\*) Selisih pada BPPK merupakan perbedaan saldo awal laporan neraca pada SAK dengan laporan posisi BMN di Neraca pada SIMAK-BMN sebesar **Rp7.021.419.660,00**. Jumlah tersebut adalah koreksi reklasifikasi pada aplikasi SAK atas Gedung dan Bangunan sampai tanggal neraca 31 Desember 2009 yang belum dipergunakan dalam operasi pemerintah menjadi Konstruksi Dalam Penggerjaan.

4. Selisih lebih Aset Tetap Lainnya sebesar **Rp51.313.971.720,00** terdiri dari:
  - Selisih lebih sebesar **Rp56.935.483.580,00** merupakan nilai Aset Tetap Renovasi pada Itjen, DJA, DJBC, DJPK, DJPU, DJPB, DJKN, BAPEPAM-LK, BPPK, dan BKF.
  - Selisih kurang sebesar **Rp5.621.511.860,00** merupakan nilai Aset Tetap Lainnya BLU. Akun Aset Tetap Lainnya pada SIMAK-BMN tidak diklasifikasikan berdasarkan BLU dan Non BLU, sementara pada Neraca SAK Tanah diklasifikasikan sebagai Aset Tetap Lainnya (kode akun 131921) dan Aset Tetap Lainnya BLU (kode akun 135511).
5. Selisih kurang Konstruksi Dalam Penggerjaan sebesar **Rp10.072.087.988,00** terdiri dari :
  - Selisih lebih sebesar **Rp7.021.419.660,00** merupakan koreksi reklasifikasi pada aplikasi SAK atas Gedung dan Bangunan pada BPPK yang sampai tanggal neraca 31 Desember 2009 belum dipergunakan dalam operasi pemerintah menjadi Konstruksi Dalam Penggerjaan.
  - Selisih kurang sebesar **Rp17.093.507.648,00** merupakan nilai Konstruksi Dalam Penggerjaan BLU. Akun Konstruksi Dalam Penggerjaan pada SIMAK-BMN tidak diklasifikasikan berdasarkan BLU dan Non BLU, sementara pada Neraca SAK Konstruksi Dalam Penggerjaan diklasifikasikan sebagai Konstruksi Dalam Penggerjaan (kode akun 132111) dan Konstruksi Dalam Penggerjaan BLU (kode akun 135611).

Posisi aset tetap pada neraca SAK dibandingkan dengan posisi aset tetap pada SIMAK BMN per 31 Desember 2010 dapat dilihat pada Tabel 82 berikut.

**Tabel 82**  
**Perbandingan Posisi Aset Tetap**  
**Neraca dan SIMAK BMN per 31 Desember 2010**

No.	Uraian	Aset Tetap dalam Neraca	Aset Tetap dalam SIMAK-BMN	Selisih
01	Tanah	17.154.828.794.908	17.700.020.857.735	(545.192.062.827)
02	Peralatan dan Mesin	7.306.062.037.508	7.337.887.539.650	(31.825.502.142)
03	Gedung dan Bangunan	9.880.476.902.813	10.002.629.951.971	(122.153.049.158)
04	Jalan dan Jembatan	184.315.488.769	194.724.242.880	(10.408.754.111)
05	Irigasi	41.143.676.004	42.515.862.684	(1.372.186.680)
06	Jaringan	91.316.493.072	96.281.253.545	(4.964.760.473)
07	Aset Tetap Lainnya	20.496.576.201	27.983.162.061	(7.486.585.860)
08	Konstruksi Dalam Pengerjaan	615.651.377.375	633.973.343.560	(18.321.966.185)
09	Tanah BLU	545.192.062.827	0	545.192.062.827
10	Peralatan dan Mesin BLU	31.697.703.142	0	31.697.703.142
11	Gedung dan Bangunan BLU	144.672.506.225	0	144.672.506.225
12	Jalan, Irigasi & Jaringan BLU	16.745.701.264	0	16.745.701.264
13	Aset Tetap Lainnya BLU	7.486.585.860	0	7.486.585.860
14	KDP BLU	18.321.966.185	0	18.321.966.185
	<b>Jumlah</b>	<b>36.058.407.872.153</b>	<b>36.036.016.214.086</b>	<b>22.391.658.067</b>

Penjelasan selisih aset tetap dalam neraca SAK dengan laporan posisi BMN di neraca SIMAK-BMN per 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

1. Selisih kurang Tanah sebesar **Rp545.192.062.827,00** merupakan nilai Tanah BLU. Akun Tanah pada SIMAK-BMN tidak diklasifikasikan berdasarkan BLU dan Non BLU, sementara pada Neraca SAK, Tanah diklasifikasikan sebagai Tanah (kode akun 131111) dan Tanah BLU (kode akun 135111).
2. Selisih kurang Peralatan dan Mesin sebesar **Rp31.825.502.142,00** terdiri dari:
  - Selisih kurang sebesar **Rp31.697.703.142,00** merupakan nilai Peralatan dan Mesin BLU. Akun Peralatan dan Mesin pada SIMAK-BMN tidak diklasifikasikan berdasarkan BLU dan Non BLU, sementara pada Neraca SAK Peralatan dan Mesin diklasifikasikan sebagai Peralatan dan Mesin (kode akun 131311) dan Peralatan dan Mesin BLU (kode akun 135211).
  - Selisih kurang sebesar **Rp127.799.000,00** merupakan reklasifikasi aset yang hilang pada DJPK, dimana dalam neraca berdasarkan SAK, nilai tersebut telah dikeluarkan namun dalam laporan SIMAK-BMN belum dihapuskan.
3. Selisih kurang Gedung dan Bangunan sebesar Rp122.153.049.158,00 terdiri dari:
  - Selisih kurang sebesar **Rp144.672.506.225**, merupakan nilai Gedung dan Bangunan BLU. Akun Gedung dan Bangunan pada SIMAK-BMN tidak diklasifikasikan berdasarkan BLU dan Non BLU, sementara pada Neraca SAK Gedung dan Bangunan diklasifikasikan sebagai Gedung dan Bangunan (kode akun 131511) dan Gedung dan Bangunan BLU (kode akun 135311).
  - Selisih lebih sebesar **Rp22.519.457.067**, merupakan nilai Aset Tetap Renovasi pada DJPB, DJPK, dan DJA.
4. Selisih kurang Jalan dan Jembatan, Irigasi, dan Jaringan sebesar **Rp16.745.701.264,00** merupakan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU. Akun Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada SIMAK-BMN tidak diklasifikasikan berdasarkan BLU dan Non BLU, sementara pada Neraca SAK Jalan, Irigasi, dan Jaringan diklasifikasikan sebagai Jalan, Irigasi, dan Jaringan (kelompok akun 1317) dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU (kode akun 135411).
5. Selisih kurang Aset Tetap Lainnya sebesar **Rp7.486.585.860,00** merupakan nilai Aset Tetap Lainnya BLU. Akun Aset Tetap Lainnya pada SIMAK-BMN tidak diklasifikasikan berdasarkan BLU dan Non BLU, sementara pada Neraca SAK Tanah diklasifikasikan

sebagai Aset Tetap Lainnya (kode akun 131921) dan Aset Tetap Lainnya BLU (kode akun 135511).

6. Selisih kurang Konstruksi Dalam Penggerjaan sebesar **Rp18.321.966.185,00** merupakan nilai Konstruksi Dalam Penggerjaan BLU. Akun Konstruksi Dalam Penggerjaan pada SIMAK-BMN tidak diklasifikasikan berdasarkan BLU dan Non BLU, sementara pada Neraca SAK Konstruksi Dalam Penggerjaan diklasifikasikan sebagai Konstruksi Dalam Penggerjaan (kode akun 132111) dan Konstruksi Dalam Penggerjaan BLU (kode akun 135611). Atas hal tersebut menyebabkan selisih lebih Konstruksi Dalam Penggerjaan Badan Layanan Umum (135611) dengan nilai yang sama.

### C.2.3.1 Tanah

*Tanah*  
*Rp17.154.828.798.908,00*

Nilai Tanah per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar **Rp17.154.828.794.908,00** dan **Rp16.447.664.813.816,00**. Nilai tersebut termasuk Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset DJKN pada tahun 2010 sebesar **Rp27.364.288.730,00**.

Rincian nilai Tanah yang dimiliki UAPPA-E I lingkup Kementerian Keuangan dapat dilihat pada Tabel 83 berikut.

**Tabel 83**  
**Tanah Per Unit Eselon I**  
**Per 31 Desember 2010 dan 2009**  
**(dalam rupiah)**

No.	Uraian	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Naik / (Turun)	%
01	SETJEN	5.370.135.229.206	4.941.106.690.621	429.028.538.585	8,68
02	ITJEN	4.052.985.448	4.052.985.448	0	0,00
03	DJP	5.930.351.833.426	5.868.476.257.110	61.875.576.316	1,05
04	DJBC	2.879.897.054.588	2.849.035.252.111	30.861.802.477	1,08
05	DJPU	89.500.950.000	0	89.500.950.000	0,00
06	DJPB	2.094.050.332.663	2.027.213.804.608	66.836.528.055	3,30
07	DJKN	210.161.294.614	190.227.305.182	19.933.989.432	10,48
08	BAPEPAM-LK	99.984.999.247	99.811.567.750	173.431.497	0,17
09	BPPK	475.570.115.716	466.616.950.986	8.953.164.730	1,92
10	BKF	1.124.000.000	1.124.000.000	0	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>17.154.828.794.908</b>	<b>16.447.664.813.816</b>	<b>707.163.981.092</b>	<b>4,30</b>

Mutasi/perubahan Tanah dapat dapat dilihat pada Tabel 84 berikut.

**Tabel 84**  
**Mutasi/Perubahan Tanah**

Kode	Uraian transaksi	Tanah
	<b>SALDO AWAL</b>	<b>16.447.664.813.816</b>
	Reklasifikasi saldo awal	
	Reklasifikasi menjadi ATR	
100	Penambahan Saldo Awal	164.915.324.147
101	Pembelian	547.720.530.000
102	Transfer Masuk	80.783.504.600
103	Hibah (Masuk)	2.333.000.000
104	Rampasan	0
105	Penyelesaian Pembangunan	13.776.562.501
106	Pembatalan Penghapusan	0
107	Reklasifikasi Masuk	159.353.458.241
111	Pertukaran	320.800.000
112	Perolehan Lainnya	0
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	0
199	Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	0
201	Pengurangan Nilai Aset	0
202	Pengembangan Nilai Aset	837.742.074
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	8.166.118.409
205	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	64.159.359.796
206	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	115.106.150
208	Pengembangan melalui KDP	9.194.139.549
	<b>Mutasi Tambah</b>	<b>1.051.675.645.467</b>
	Pembulatan saldo awal	0
	Write off Aset yang hilang	0
	Reklasifikasi saldo awal	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	-25.598.578.143
205	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	-36.795.071.066
301	Penghapusan	-74.734.860.000
302	Transfer Keluar	-36.559.768.300
303	Hibah (Keluar)	-7.646.375.000
304	Reklasifikasi Keluar	-158.688.983.866
305	Koreksi Pencatatan	-4.488.028.000
399	Penghapusan semu karena reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya	0
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	0
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaannya	0
	<b>Mutasi Kurang</b>	<b>-344.511.664.375</b>
	<b>SALDO AKHIR</b>	<b>17.154.828.794.908</b>

### C.2.3.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin  
Rp7.306.062.037.508,  
00

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp7.306.062.037.508,00 dan Rp6.424.420.868.487,00. Nilai tersebut termasuk koreksi nilai dari Tim Penertiban Aset DJKN pada tahun 2010 sebesar minus Rp46.400.255.291,00.

Rincian nilai Peralatan dan Mesin yang dimiliki UAPPA-E I lingkup Kementerian Keuangan dapat dilihat pada Tabel 85 berikut.

**Tabel 85**  
**Peralatan dan Mesin Per Unit Eselon I**  
**Per 31 Desember 2010 dan 2009**  
**(dalam rupiah)**

No.	Uraian	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Naik / (Turun)	%
01	SETJEN	433.966.398.418	375.340.824.719	58.625.573.699	15,62
02	ITJEN	28.998.210.220	28.111.321.137	886.889.083	3,15
03	DJA	52.094.748.391	36.942.090.756	15.152.657.635	41,02
04	DJP	3.637.649.330.564	3.365.861.808.418	271.787.522.146	8,07
05	DJBC	2.003.888.446.799	1.708.700.550.267	295.187.896.532	17,28
06	DJPK	24.622.151.027	20.218.381.582	4.403.769.445	21,78
07	DJPU	24.384.815.244	22.215.465.844	2.169.349.400	9,77
08	DJPB	631.114.308.309	510.550.600.670	120.563.707.639	23,61
09	DJKN	237.213.859.220	182.028.577.147	55.185.282.073	30,32
10	BAPEPAM-LK	79.511.603.103	56.860.926.002	22.650.677.101	39,84
11	BPPK	114.566.710.899	81.881.279.560	32.685.431.339	39,92
12	BKF	38.051.455.314	35.709.042.385	2.342.412.929	6,56
	Jumlah	<b>7.306.062.037.508</b>	<b>6.424.420.868.487</b>	<b>881.641.169.021</b>	<b>13,72</b>

Mutasi/perubahan Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada Tabel 86 berikut.

**Tabel 86**  
**Mutasi / Perubahan Peralatan dan Mesin**

Kode	Uraian transaksi	Peralatan dan Mesin
	<b>SALDO AWAL</b>	<b>6.424.420.868.487</b>
	Reklasifikasi saldo awal	134.854.804
	Reklasifikasi menjadi ATR	
100	Penambahan Saldo Awal	27.025.685.374
101	Pembelian	500.617.715.828
102	Transfer Masuk	540.901.262.007
103	Hibah (Masuk)	2.307.539.280
104	Rampasan	1.967.600.000
105	Penyelesaian Pembangunan	252.195.085.698
106	Pembatalan Penghapusan	551.184.726
107	Reklasifikasi Masuk	268.663.725.342
111	Pertukaran	0
112	Perolehan Lainnya	289.396.132
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	37.994.280.536
199	Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	1.241.346.037
201	Pengurangan Nilai Aset	-18.872.113.568
202	Pengembangan Nilai Aset	5.994.748.095
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	16.959.391.917
205	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	3.634.782.431
206	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	776.466.856
208	Pengembangan melalui KDP	16.709.830.073
	<b>Mutasi Tambah</b>	<b>1.659.092.781.568</b>
	Pembulatan saldo awal	0
	Write off Aset yang hilang	-127.799.000
	Reklasifikasi saldo awal	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	-28.591.130.532
205	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	-50.035.037.722
301	Penghapusan	-7.071.732.648
302	Transfer Keluar	-483.550.544.263
303	Hibah (Keluar)	0
304	Reklasifikasi Keluar	-54.984.047.333
305	Koreksi Pencatatan	-74.133.738.875
399	Penghapusan semu karena reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya	-13.179.465
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	-78.944.402.709
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaannya	0
	<b>Mutasi Kurang</b>	<b>-777.451.612.547</b>
	<b>SALDO AKHIR</b>	<b>7.306.062.037.508</b>

**Tabel 87**  
**Gedung dan Bangunan Per Unit Eselon I**  
**Per 31 Desember 2010 dan 2009**  
**(dalam rupiah)**

No.	Uraian	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Naik / (Turun)	%
01	SETJEN	2.754.253.762.038	2.544.285.897.876	209.967.864.162	8,25
02	ITJEN	2.225.975.715	1.600.241.610	625.734.105	39,10
03	DJA	1.114.400.000	1.114.400.000	0	0,00
04	DJP	4.070.559.428.972	4.011.871.869.277	58.687.559.695	1,46
05	DJBC	1.358.444.523.703	1.186.621.948.925	171.822.574.778	14,48
06	DJPU	27.152.885.000	0	27.152.885.000	0,00
07	DJPB	1.137.799.762.257	1.023.122.506.772	114.677.255.485	11,21
08	DJKN	234.600.887.252	177.972.012.072	56.628.875.180	31,82
09	BAPEPAM-LK	395.843.550	395.843.550	0	0,00
10	BPPK	293.560.704.326	226.574.810.971	66.985.893.355	29,56
11	BKF	368.730.000	368.730.000	0	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>9.880.476.902.813</b>	<b>9.173.928.261.053</b>	<b>706.548.641.760</b>	<b>7,70</b>

Mutasi/perubahan Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada Tabel 88 berikut.

**Tabel 88**  
**Mutasi/Perubahan Gedung dan Bangunan**

Kode	Uraian transaksi	Gedung dan Bangunan
	<b>SALDO AWAL</b>	<b>9.173.928.261.053</b>
	Reklasifikasi saldo awal	7.021.419.660
	Reklasifikasi menjadi ATR	22.519.457.067
100	Penambahan Saldo Awal	22.019.218.054
101	Pembelian	7.980.023.764
102	Transfer Masuk	93.105.980.074
103	Hibah (Masuk)	436.823.015
104	Rampasan	0
105	Penyelesaian Pembangunan	392.269.453.464
106	Pembatalan Penghapusan	0
107	Reklasifikasi Masuk	842.316.082.570
111	Pertukaran	4.750.752.364
112	Perolehan Lainnya	0
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	580.507.666
199	Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	5.026.974.805
201	Pengurangan Nilai Aset	-518.668.430
202	Pengembangan Nilai Aset	52.942.224.850
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	12.911.205.827
205	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	36.689.779.382
206	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	96.548.091.519
208	Pengembangan melalui KDP	191.309.503.428
	<b>Mutasi Tambah</b>	<b>1.787.908.829.079</b>
	Pembulatan saldo awal	-54.000
	Write off Aset yang hilang	0
	Reklasifikasi saldo awal	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	-44.132.020.161
205	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	-8.254.610.525
301	Penghapusan	-46.441.632.272
302	Transfer Keluar	-55.281.372.314
303	Hibah (Keluar)	-26.372.865.320
304	Reklasifikasi Keluar	-872.809.841.001
305	Koreksi Pencatatan	-9.411.920.821
399	Penghapusan semu karena reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya	0
401	Penghitungan Aset Dari Penggunaan	-18.655.870.905
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaannya	0
	<b>Mutasi Kurang</b>	<b>-1.081.360.187.319</b>
	<b>SALDO AKHIR</b>	<b>9.880.476.902.813</b>

#### C.2.3.4 Jalan dan Jembatan

Jalan dan Jembatan  
Rp184.315.488.769,  
00

Nilai Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp184.315.488.769,00 dan Rp89.035.066.634,00. Nilai tersebut termasuk koreksi nilai dari Tim Penertiban Aset DJKN pada tahun 2010 sebesar Rp942.360.925,00.

Rincian nilai Jalan dan Jembatan yang dimiliki UAPPA-E I lingkup Kementerian Keuangan dapat dilihat pada Tabel 89 berikut.

**Tabel 89**  
**Jalan dan Jembatan Per Unit Eselon I**  
**Per 31 Desember 2010 dan 2009**  
**(dalam rupiah)**

No.	Uraian	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Naik / (Turun)	%
01	SETJEN	3.423.843.237	2.943.043.237	480.800.000	16,34
02	DJP	7.710.141.573	6.527.464.813	1.182.676.760	18,12
03	DJBC	162.430.842.788	73.736.910.839	88.693.931.949	120,28
04	DJPB	4.998.888.099	2.961.990.229	2.036.897.870	68,77
05	DJKN	655.009.219	85.576.853	569.432.366	665,40
06	BPPK	5.096.763.853	2.780.080.663	2.316.683.190	83,33
<b>Jumlah</b>		<b>184.315.488.769</b>	<b>89.035.066.634</b>	<b>95.280.422.135</b>	<b>107,01</b>

Mutasi/perubahan Jalan dan Jembatan dapat dapat dilihat pada Tabel 90 berikut.

**Tabel 90**  
**Mutasi/Perubahan Jalan dan Jembatan**

Kode	Uraian transaksi	Jalan dan Jembatan
	<b>SALDO AWAL</b>	<b>89.035.066.634</b>
	Reklasifikasi saldo awal	
	Reklasifikasi menjadi ATR	
100	Penambahan Saldo Awal	41.161.443
101	Pembelian	167.731.800
102	Transfer Masuk	749.479.666
103	Hibah (Masuk)	0
104	Rampasan	0
105	Penyelesaian Pembangunan	12.222.893.647
106	Pembatalan Penghapusan	0
107	Reklasifikasi Masuk	93.320.000
111	Pertukaran	0
112	Perolehan Lainnya	0
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	
199	Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	0
201	Pengurangan Nilai Aset	0
202	Pengembangan Nilai Aset	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	168.570
205	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	942.360.925
206	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0
208	Pengembangan melalui KDP	81.071.328.084
	<b>Mutasi Tambah</b>	<b>95.288.444.135</b>
	Pembulatan saldo awal	0
	Write off Aset yang hilang	
	Reklasifikasi saldo awal	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	0
205	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	0
301	Penghapusan	0
302	Transfer Keluar	-4.600.000
303	Hibah (Keluar)	0
304	Reklasifikasi Keluar	0
305	Koreksi Pencatatan	-3.422.000
399	Penghapusan semu karena reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya	0
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	0
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaannya	0
	<b>Mutasi Kurang</b>	<b>-8.022.000</b>
	<b>SALDO AKHIR</b>	<b>184.315.488.769</b>

### C.2.3.5 Irigasi

Irigasi  
Rp41.143.676.004,0  
Nilai Irigasi per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp41.143.676.004,00 dan Rp29.587.159.751,00. Nilai tersebut termasuk koreksi nilai dari Tim Penertiban Aset DJKN pada tahun 2010 sebesar Rp125.909.021,00.

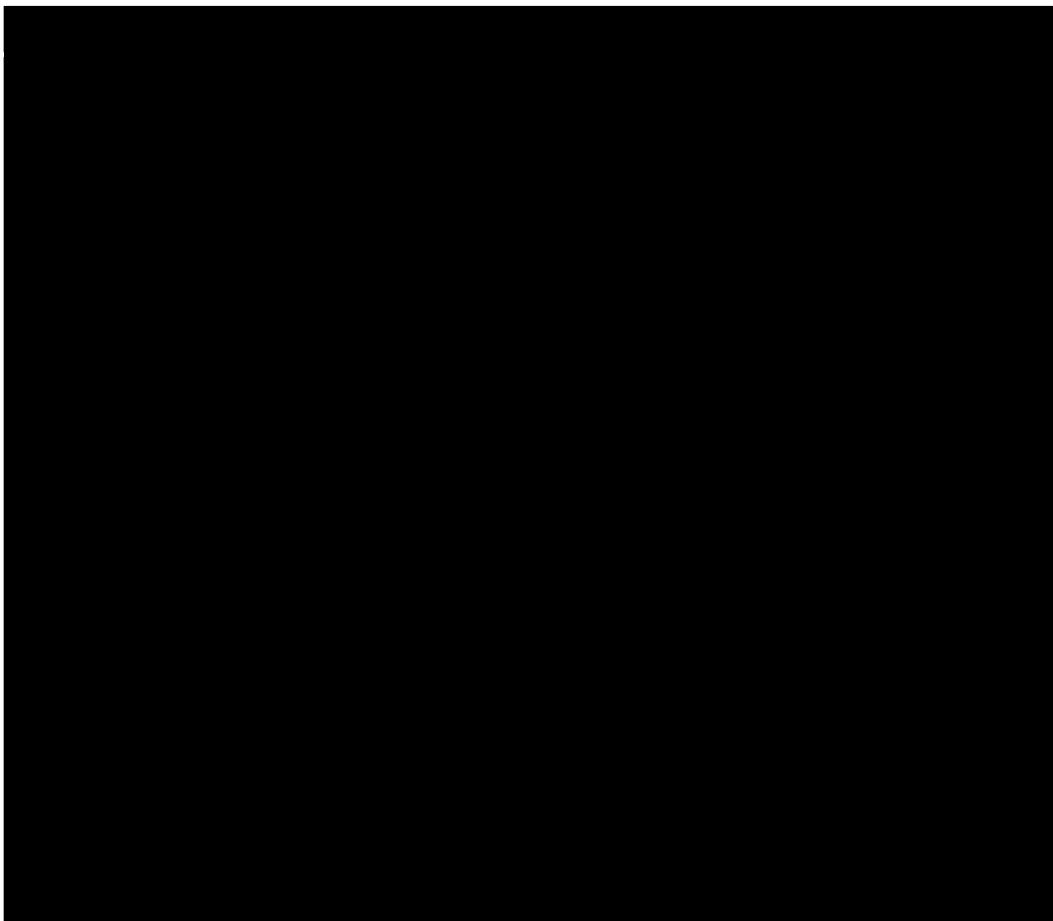
Rincian nilai Irigasi yang dimiliki UAPPA-E I lingkup Kementerian Keuangan dapat dilihat pada Tabel 91 berikut.

**Tabel 91**  
**Irigasi Per Unit Eselon I**  
**Per 31 Desember 2010 dan 2009**  
**(dalam rupiah)**

No.	Uraian	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Naik / (Turun)	%
01	SETJEN	3.670.305.320	4.162.331.990	(492.026.670)	-11,82
02	DJP	1.679.694.274	1.594.013.846	85.680.428	5,38
03	DJBC	29.765.874.934	18.917.924.674	10.847.950.260	57,34
04	DJPB	4.000.074.795	3.000.062.560	1.000.012.235	33,33
05	DJKN	625.393.488	625.393.488	0	0,00
06	BPPK	1.402.333.193	1.287.433.193	114.900.000	8,92
	<b>Jumlah</b>	<b>41.143.676.004</b>	<b>29.587.159.751</b>	<b>11.556.516.253</b>	<b>39,06</b>

Mutasi/perubahan Irigasi dapat dilihat pada Tabel 92 berikut.

**Tabel 92**  
**Mutasi/Perubahan Irigasi**

A large black rectangular box redacting the content of Table 92, which would normally show the changes in irrigation assets from 2009 to 2010.

### C.2.3.6 Jaringan

Jaringan  
Rp91.316.493.072,0

Nilai Jaringan per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp91.316.493.072,00 dan Rp76.307.635.627,00. Nilai tersebut termasuk koreksi nilai dari Tim Penertiban Aset DJKN pada tahun 2010 sebesar minus Rp55.813.026,00.

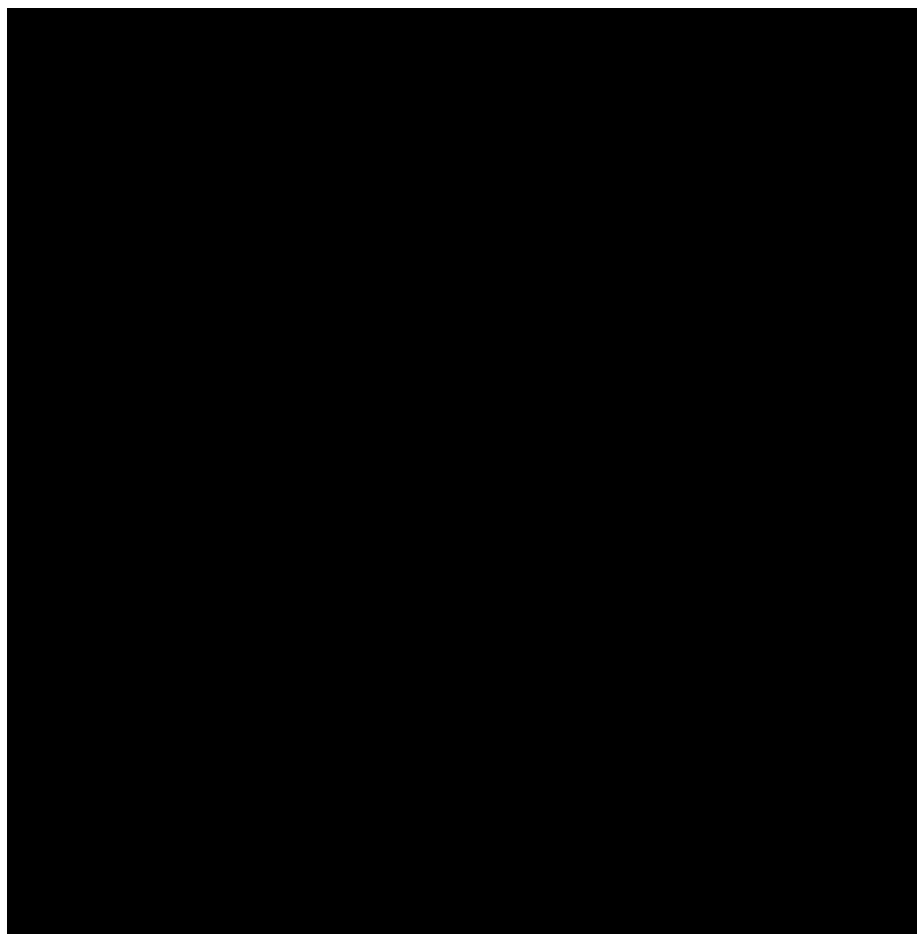
Rincian nilai Jaringan yang dimiliki UAPPA-E I lingkup Kementerian Keuangan dapat dilihat pada Tabel 93 berikut.

**Tabel 93**  
**Jaringan Per Unit Eselon I**  
**Per 31 Desember 2010 dan 2009**  
**(dalam rupiah)**

No.	Uraian	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Naik / (Turun)	%
01	SETJEN	32.729.978.750	23.882.812.213	8.847.166.537	37,04
02	DJP	29.508.643.053	31.275.059.990	(1.766.416.937)	-5,65
03	DJBC	18.558.100.193	14.077.290.800	4.480.809.393	31,83
04	DJPB	4.777.697.560	4.048.982.040	728.715.520	18,00
05	DJKN	1.467.338.600	1.065.719.700	401.618.900	37,69
06	BPPK	4.205.091.471	1.957.770.884	2.247.320.587	114,79
07	BKF	69.643.445	0	69.643.445	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>91.316.493.072</b>	<b>76.307.635.627</b>	<b>15.008.857.445</b>	<b>19,67</b>

Mutasi/perubahan Jaringan dapat dilihat pada Tabel 94 berikut.

**Tabel 94**  
**Mutasi/Perubahan Jaringan**



### C.2.3.7 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya  
Rp20.496.576.201,0  
0

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp20.496.576.201,00 dan Rp259.015.726.496,00. Nilai tersebut termasuk koreksi nilai oleh Tim Penertiban Aset DJKN sebesar minus Rp1.308.263,00.

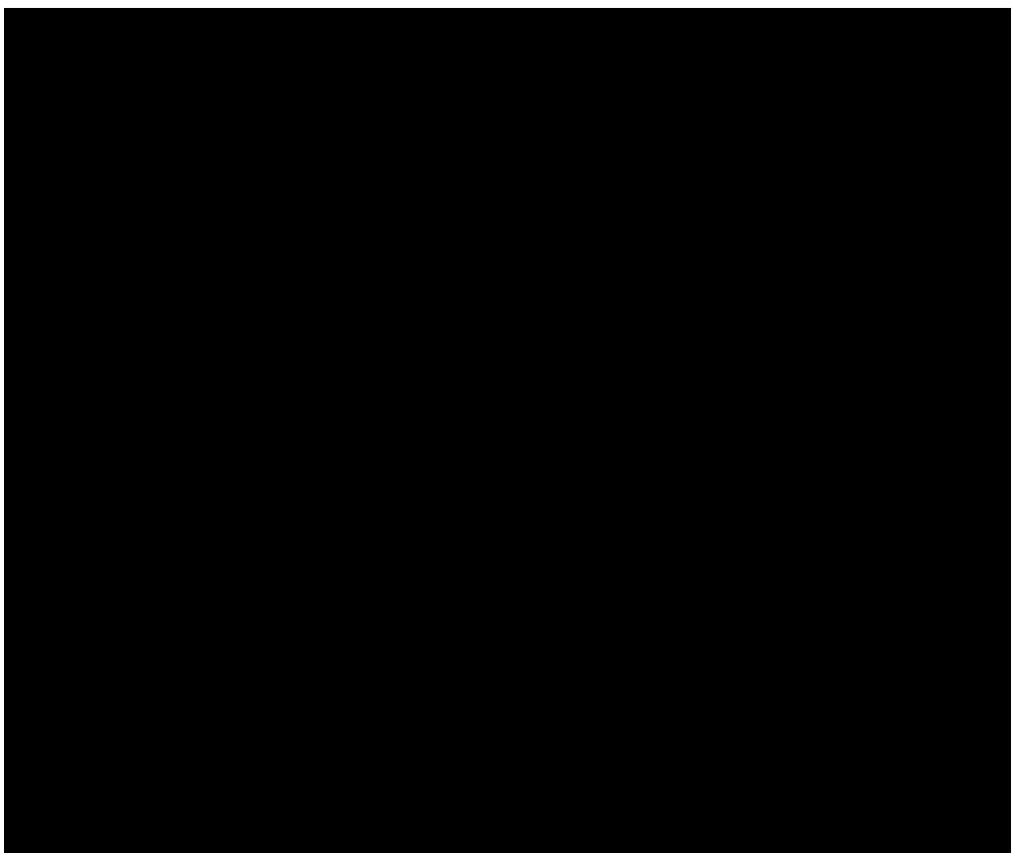
Rincian nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki UAPPA-E I lingkup Kementerian Keuangan dapat dilihat pada Tabel 95 berikut.

**Tabel 95**  
**Aset Tetap Lainnya Per Unit Eselon I**  
**Per 31 Desember 2010 dan 2009**  
**(dalam rupiah)**

No.	Uraian	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Naik / (Turun)	%
01	SETJEN	1.197.404.467	3.335.303.842	(2.137.899.375)	-64,10
02	ITJEN	629.215.992	839.843.508	(210.627.516)	-25,08
03	DJA	427.387.769	2.295.448.000	(1.868.060.231)	-81,38
04	DJP	4.845.377.060	188.941.009.001	(184.095.631.941)	-97,44
05	DJBC	4.536.177.203	4.995.899.120	(459.721.917)	-9,20
06	DJPK	347.760.137	4.755.352.563	(4.407.592.426)	-92,69
07	DJPU	345.778.426	470.322.576	(124.544.150)	-26,48
08	DJPB	1.064.322.183	2.337.258.020	(1.272.935.837)	-54,46
09	DJKN	696.151.257	2.862.590.746	(2.166.439.489)	-75,68
10	BAPEPAM-LK	116.075.425	29.702.119.028	(29.586.043.603)	-99,61
11	BPPK	5.918.952.277	15.223.754.446	(9.304.802.169)	-61,12
12	BKF	371.974.005	3.256.825.646	(2.884.851.641)	-88,58
	<b>Jumlah</b>	<b>20.496.576.201</b>	<b>259.015.726.496</b>	<b>(238.519.150.295)</b>	<b>-92,09</b>

Mutasi/perubahan Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada Tabel 96 berikut.

**Tabel 96**  
**Mutasi/Perubahan Aset Tetap Lainnya**



### C.2.3.8 Konstruksi Dalam Penggerjaan

Konstruksi Dalam Penggerjaan  
Rp615.651.377.375,00

Nilai Konstruksi Dalam Penggerjaan per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar **Rp615.651.377.375,00** dan **Rp629.408.676.151,00**. Rincian nilai Konstruksi Dalam Penggerjaan yang dimiliki UAPPA-E I lingkup Kementerian Keuangan dapat dilihat pada Tabel 97 berikut.

**Tabel 97**  
**Konstruksi Dalam Penggerjaan Per Unit Eselon I**  
**Per 31 Desember 2010 dan 2009**  
**(dalam rupiah)**

No.	Uraian	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Naik / (Turun)	%
01	SETJEN	83.776.333.161	102.262.677.724	(18.486.344.563)	-18,08
02	DJP	370.523.105.948	257.182.867.791	113.340.238.157	44,07
03	DJBC	82.350.824.488	187.566.049.394	(105.215.224.906)	-56,10
04	DJPB	37.035.568.254	39.433.513.492	(2.397.945.238)	-6,08
05	DJKN	28.318.786.779	8.372.746.705	19.946.040.074	238,23
06	BPPK	13.646.758.745	34.590.821.045	(20.944.062.300)	-60,55
<b>Jumlah</b>		<b>615.651.377.375</b>	<b>629.408.676.151</b>	<b>(13.757.298.776)</b>	<b>-2,19</b>

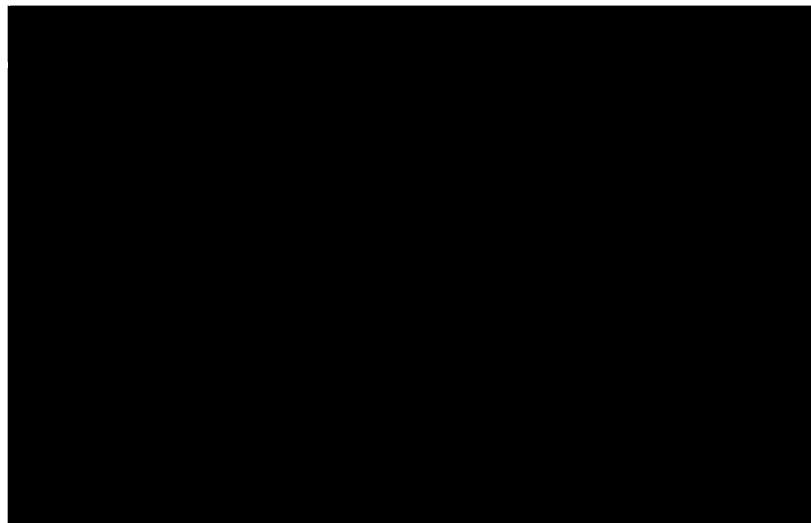
Mutasi/perubahan Konstruksi Dalam Penggerjaan dapat dilihat pada Tabel 98 berikut.

**Tabel 98**  
**Mutasi/Perubahan Konstruksi Dalam Penggerjaan**

Kode	Uraian	KDP
	<b>SALDO AWAL 2010</b>	<b>629.408.676.151</b>
501	Mutasi Saldo Awal KDP	35.129.351.250
502	Perolehan KDP	69.668.946.991
503	Pengembangan KDP	926.052.995.196
504	Koreksi Nilai KDP	-70.710.276.334
505	Penghapusan/Penghentian KDP	-21.159.411.386
506	Transfer Masuk KDP	27.203.182.828
507	Transfer Keluar KDP	15.720.693.358
599	Reklasifikasi KDP menjadi Aset Jadi	-995.662.780.679
	<b>SALDO AKHIR</b>	<b>615.651.377.375</b>

Mutasi/perubahan Tanah BLU dapat dilihat pada Tabel 100 berikut.

**Tabel 100**  
**Mutasi/Perubahan Tanah BLU**



#### C.2.3.10 Peralatan dan Mesin BLU

Peralatan dan  
Mesin BLU  
Rp31.697.703.142,0  
0

Nilai Peralatan dan Mesin BLU per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar **Rp31.697.703.142,00** dan **Rp17.514.762.483,00**. Nilai tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin BLU pada PIP Setjen dan STAN BPPK. Nilai tersebut termasuk koreksi nilai dari Tim Penertiban Aset DJKN pada tahun 2010 sebesar minus Rp105.753.000,00.

Rincian nilai Peralatan dan Mesin BLU per Eselon I dapat dilihat pada Tabel 101 berikut.

**Tabel 101**  
**Peralatan dan Mesin BLU Per Unit Eselon I**  
**Per 31 Desember 2010 dan 2009**  
**(dalam rupiah)**

No.	Uraian	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Naik / (Turun)	%
01	SETJEN	5.916.375.808	4.721.395.108	1.194.980.700	25,31
02	BPPK	25.781.327.334	12.793.367.375	12.987.959.959	101,52
	Jumlah	<b>31.697.703.142</b>	<b>17.514.762.483</b>	<b>14.182.940.659</b>	80,98

Mutasi/perubahan Peralatan dan Mesin BLU dapat dilihat pada Tabel 102 berikut.

**Tabel 102**  
**Mutasi/Perubahan Peralatan dan Mesin BLU**

Kode	Uraian Transaksi	Jumlah
	<b>SALDO AWAL</b>	<b>17.514.762.483</b>
	Reklasifikasi Saldo Awal	1.416.293.938
101	Pembelian	10.833.701.946
102	Transfer Masuk	775.064.875
105	Penyelesaian Pembangunan	729.557.900
112	Perolehan lainnya	525.000.000
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lai	
202	Pengembangan Nilai Aset	9.075.000
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	
206	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	
	<b>Mutasi Tambah</b>	<b>14.288.693.659</b>
201	Pengurangan Nilai Aset	
205	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	-105.753.000
301	Penghapusan	
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	
	<b>Mutasi Kurang</b>	<b>-105.753.000</b>
	<b>SALDO AKHIR</b>	<b>31.697.703.142</b>

#### C.2.3.11 Gedung dan Bangunan BLU

Gedung BLU  
Rp144.672.506.225,  
00

Nilai Gedung dan Bangunan BLU per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar **Rp144.672.506.225,00** dan **Rp62.505.104.506,00**. Nilai tersebut merupakan nilai Gedung dan Bangunan BLU STAN pada BPPK.

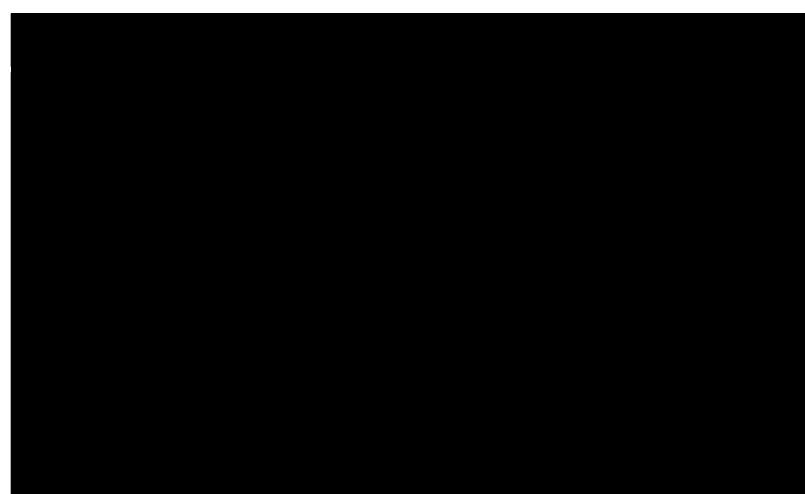
Rincian Peralatan dan Mesin BLU per eselon I dapat dilihat pada Tabel 103 berikut.

**Tabel 103**  
**Gedung dan Bangunan BLU Per Unit Eselon I**  
**Per 31 Desember 2010 dan 2009**  
**(dalam rupiah)**

No.	Uraian	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Naik / (Turun)	%
01	BPPK	144.672.506.225	62.505.104.506	82.167.401.719	131,46

Mutasi/perubahan Peralatan dan Mesin BLU dapat dilihat pada Tabel 104 berikut.

**Tabel 104**  
**Mutasi/Perubahan Gedung dan Bangunan BLU**



#### C.2.3.12 Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU

Jalan, irigasi, dan  
jaringan BLU  
Rp16.745.701.264,0  
0

Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar **Rp16.745.701.264,00** dan **Rp3.702.124.784,00**. Nilai tersebut merupakan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU pada PIP Setjen dan STAN BPPK.

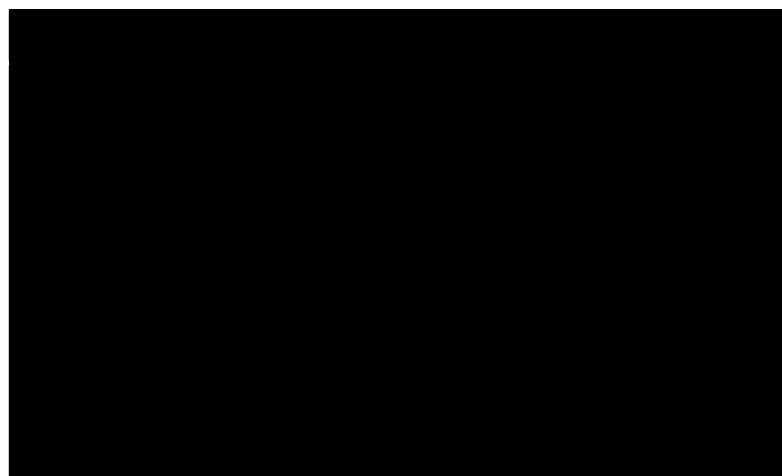
Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU per eselon I dapat dilihat pada Tabel 105 berikut.

**Tabel 105**  
**Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU Per Unit Eselon I**  
**Per 31 Desember 2010 dan 2009**

No.	Uraian	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Naik / (Turun)	%
01	SETJEN	218.174.500	218.174.500	0	0,00
02	BPPK	16.527.526.764	3.483.950.284	13.043.576.480	374,39
	<b>Jumlah</b>	<b>16.745.701.264</b>	<b>3.702.124.784</b>	<b>13.043.576.480</b>	<b>352,33</b>

Mutasi/perubahan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat dilihat pada tabel 106 berikut.

**Tabel 106**  
**Mutasi/Perubahan Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU**

A large black rectangular box redacting the content of Table 106.

Mutasi/perubahan Aset Tetap Lainnya BLU dapat dilihat pada Tabel 108 berikut.

**Tabel 108**  
**Mutasi/Perubahan Aset Tetap Lainnya BLU**

#### C.2.3.14 Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU

*Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU Rp18.321.966.185,00* Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar **Rp18.321.966.185,00** dan **Rp17.093.507.648,00**. Nilai tersebut merupakan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU pada STAN BPPK.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU per eselon I dapat dilihat pada Tabel 109 berikut.

**Tabel 109**  
**Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU Per Unit Eselon I**  
**Per 31 Desember 2010 dan 2009**  
**(dalam rupiah)**

No.	Uraian	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Naik / (Turun)	%
01	BPPK	18.321.966.185	17.093.507.648	1.228.458.537	7,19%

Mutasi/perubahan Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU dapat dilihat pada Tabel 110 berikut.

**Tabel 110**  
**Mutasi/Perubahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU**

Uraian	KDP BLU
<b>SALDO AWAL 2010</b>	<b>17.093.507.648</b>
Mutasi Saldo Awal KDP	0
Perolehan KDP	162.282.400
Pengembangan KDP	20.959.170.685
Koreksi Nilai KDP	-3.270.000
Penghapusan/Penghentian KDP	0
Transfer Masuk KDP	0
Transfer Keluar KDP	0
Reklasifikasi KDP menjadi Aset Jadi	-19.889.724.548
<b>SALDO AKHIR</b>	<b>18.321.966.185</b>

#### C.2.4 Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp985.739.209.879,00 dan Rp4.023.295.568.388,00, merupakan saldo Tagihan TP/TGR, Aset Tak Berwujud, Aset Tak Berwujud BLU, Aset Lain-lain, Aset Lain-lain BLU, dan Dana Kelolaan BLU.

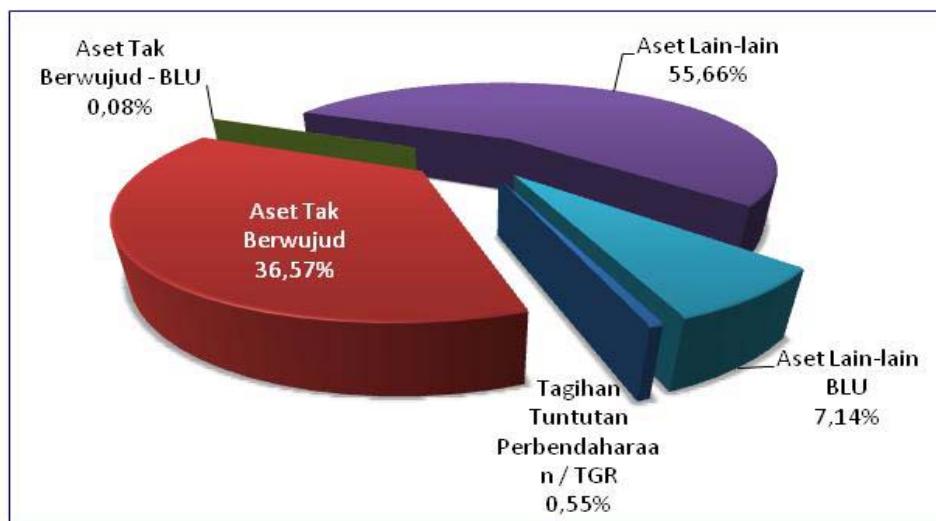
Rincian Aset Lainnya Per Jenis Aset dapat dilihat pada Tabel 111 berikut.

**Tabel 111**  
**Komposisi Aset Lainnya Per Jenis Aset**  
**Per 31 Desember 2010 dan 2009**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Tagihan Tuntutan Perpendaharaan / TGR	5,402,005,376	5,422,524,798	(20,519,422)	(0.38)
Aset Tak Berwujud	360,495,002,682	312,417,249,310	48,077,753,372	15.39
Aset Tak Berwujud - BLU	808,658,790	534,108,790	274,550,000	51.40
Aset Lain-lain	548,617,378,647	386,815,398,044	161,801,980,603	41.83
Aset Lain-lain BLU	70,416,164,384	2,706,287,446	67,709,876,938	2501.95
Dana Kelolaan BLU	0	3,315,400,000,000	(3,315,400,000,000)	(100.00)
	<b>985,739,209,879</b>	<b>4,023,295,568,388</b>	<b>(3,037,556,358,509)</b>	<b>(75.50)</b>

Komposisi Aset Lainnya Per Jenis Aset dapat dilihat pada Grafik 21 berikut.

**Grafik 21**  
**Komposisi Aset Lainnya Per Jenis Aset**  
**Per 31 Desember 2010**



### C.2.4.1 Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

*Tuntutan  
Perbendaharaan/  
Tuntutan Ganti  
Rugi  
Rp5.402.005.376,00*

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi yang ada pada Kementerian Keuangan hanya berupa Tagihan Tuntutan Ganti Rugi. Nilai Tagihan Tuntutan Ganti Rugi/TGR merupakan tagihan yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan mendatang.

Nilai Tagihan Tuntutan Ganti Rugi/TGR Kementerian Keuangan per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar **Rp5.402.005.376,00** dan **Rp5.422.524.798,00**. Berkurangnya nilai Tagihan Tuntutan Ganti Rugi/TGR tersebut dikarenakan reklasifikasi akun Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi menjadi akun Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dan reklasifikasi menjadi akun Aset lain-lain karena penagihannya dialihkan kepada DJKN.

Rincian Tuntutan Perbendaharaan/ TGR dapat dilihat pada Tabel 112 berikut.

**Tabel 112**  
**Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR Per Unit Eselon I**  
**Per 31 Desember 2010 dan 2009**  
**(dalam rupiah)**

Kode	Eselon I	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Kenaikan/ (Penurunan)	%
015.01	SETJEN	120,384,000	928,511,671	(808,127,671)	(87.03)
015.04	DJP	89,375,000	222,122,700	(132,747,700)	(59.76)
015.05	DJBC	3,908,812,411	3,868,374,218	40,438,193	1.05
015.06	DJPK	21,000,000	0	21,000,000	0.00
015.08	DJPB	427,441,896	400,849,546	26,592,350	6.63
015.09	DJKN	0	2,666,664	(2,666,664)	(100.00)
015.11	BPPK	834,992,069	0	834,992,069	0.00
<b>Jumlah</b>		<b>5,402,005,376</b>	<b>5,422,524,799</b>	<b>(20,519,423)</b>	<b>(0.38)</b>

Adapun rincian Tuntutan Perbendaharaan/TGR dapat dilihat pada lampiran daftar Tagihan TGR Kementerian Keuangan TA 2010.

**Tabel 113**  
**Aset Tak Berwujud Per Unit Eselon I**  
**Per 31 Desember 2010 dan 2009**  
**(dalam rupiah)**

Kode	Eselon I	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Kenaikan/(Penurunan)	%
015.01	SETJEN	60,612,151,421	50,068,217,823	10,543,933,598	21.06
015.02	ITJEN	4,954,284,840	526,634,840	4,427,650,000	840.74
015.03	DJA	3,330,470,133	41,659,200	3,288,810,933	7,894.56
015.04	DJP	188,707,143,719	182,006,260,959	6,700,882,760	3.68
015.05	DJBC	54,681,241,434	43,524,993,761	11,156,247,673	25.63
015.06	DJPK	155,430,000	47,960,000	107,470,000	224.08
015.07	DJPU	7,159,518,315	5,902,610,315	1,256,908,000	21.29
015.08	DJPB	8,112,685,830	6,661,303,280	1,451,382,550	21.79
015.09	DJKN	14,520,832,726	14,124,567,726	396,265,000	2.81
015.10	BAPEPAM LK	6,115,169,010	4,862,926,160	1,252,242,850	25.75
015.11	BPPK	8,116,425,122	999,814,750	7,116,610,372	711.79
015.12	BKF	4,029,650,132	3,650,300,496	379,349,636	10.39
<b>Jumlah</b>		<b>360,495,002,682</b>	<b>312,417,249,310</b>	<b>48,077,753,372</b>	<b>15.39</b>

Mutasi/perubahan Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada Tabel 114 berikut.

**Tabel 114**  
**Mutasi/Perubahan Aset Tak Berwujud**

<b>SALDO AWAL</b>	<b>312,417,249,310</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	<b>50,767,971,072</b>
Pembelian	36,872,277,157
Transfer Masuk	7,438,293,116
Penyelesaian Pembangunan	1,921,811,600
Reklasifikasi Masuk	3,073,578,600
Pengembangan Nilai Aset	660,370,350
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	18,288,910
Pengembangan Melalui KDP	734,401,339
Penambahan Saldo Awal	48,950,000
<b>Mutasi Kurang</b>	<b>(2,690,217,700)</b>
Penghapusan	(2,390,000,000)
Reklasifikasi Keluar	(34,177,000)
Transfer Keluar	(266,040,700)
<b>SALDO AKHIR</b>	<b>360,495,002,682</b>

Rincian Aset Tak Berwujud BLU dapat dilihat pada Tabel 115 berikut.

**Tabel 115**  
**Aset Tak Berwujud BLU Per Unit Eselon I**  
**Per 31 Desember 2010 dan 2009**  
**(dalam rupiah)**

Kode	Eselon I	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Kenaikan/ (Penurunan)	%
015.01	SETJEN	808,658,790	534,108,790	274,550,000	51.40

Mutasi/perubahan Aset Tak Berwujud BLU dapat dilihat pada Tabel 116 berikut.

**Tabel 116**  
**Mutasi/Perubahan Aset Tak Berwujud BLU**

<b>SALDO AWAL</b>	<b>534,108,790</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	<b>274,550,000</b>
Pembelian	226,550,000
Pengembangan Nilai Aset	48,000,000
<b>Mutasi Kurang</b>	<b>0</b>
Penghapusan	0
Transfer Keluar	0
<b>SALDO AKHIR</b>	<b>808,658,790</b>

Aset Tak Berwujud PIP per 31 Desember 2010 berupa perangkat sistem informasi manajemen PIP; aplikasi *cash management* dan investasi jangka pendek PIP; *website* dan *webmail* PIP serta sistem pengelolaan kinerja (pendekatan *balanced scorecard*) dan kompetensi berbasis *web* dengan rincian yang dapat dilihat pada Tabel 117 berikut.

**Tabel 117**  
**Aset Tak Berwujud BLU Per Jenis**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	Nilai
Perangkat sistem informasi manajemen PIP	49,900,000
Aplikasi <i>cash management</i> dan invenstasi jangka pendek PIP	532,208,790
<i>Website</i> dan <i>webmail</i> PIP	35,200,000
Sistem pengelolaan kinerja (pendekatan <i>balanced scorecard</i> ) dan kompetensi berbasis <i>web</i>	191,350,000
<b>Jumlah</b>	<b>808,658,790</b>

**Tabel 118**  
**Aset Lain-lain Per Unit Eselon I**  
**Per 31 Desember 2010 dan 2009**  
**(dalam rupiah)**

Kode	Eselon I	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Kenaikan/ (Penurunan)	%
015.01	SETJEN	5,987,531,387	6,710,892,059	(723,360,672)	(10.78)
015.02	ITJEN	2,910,697,898	209,721,316	2,700,976,582	1,287.89
015.03	DJA	-	142,956,000	(142,956,000)	(100.00)
015.04	DJP	99,136,744,568	75,856,127,457	23,280,617,111	30.69
015.05	DJBC	347,513,329,197	211,032,113,292	136,481,215,905	64.67
015.06	DJPK	153,297,279	153,297,279	-	-
015.08	DJPB	44,302,826,574	53,462,739,085	(9,159,912,511)	(17.13)
015.09	DJKN	7,316,517,079	5,902,862,380	1,413,654,699	23.95
015.10	BAPEPAM LK	35,945,249,907	29,799,716,147	6,145,533,760	20.62
015.11	BPPK	5,351,184,758	3,324,114,256	2,027,070,502	60.98
015.12	BKF	-	220,858,773	(220,858,773)	(100.00)
<b>Jumlah</b>		<b>548,617,378,647</b>	<b>386,815,398,044</b>	<b>161,801,980,603</b>	<b>41.83</b>

Aset Lain-lain sebesar **Rp548.617.378.647,00** terdiri dari akun aset lain-lain (154111) berupa Piutang Pajak/Bukan Pajak dan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang penagihannya dilimpahkan ke DJKN sebesar **Rp340.922.595.513,00** dan akun Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan (154112) sebesar **Rp207.694.783.134,00**.

Terdapat perbedaan saldo akhir akun Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan (154112) pada Neraca SAK dengan Laporan Posisi BMN di Neraca pada SIMAK-BMN sebesar Rp1.786.055.595,00 dengan rincian yang dapat dilihat pada Tabel 119 berikut.

**Tabel 119**  
**Perbedaan Saldo Akhir Akun Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan**  
**Pada Neraca SAK dengan Laporan Posisi BMN di Neraca**  
**(dalam rupiah)**

Eselon I	SAK	SIMAK-BMN	Selisih
SETJEN	4,296,956,204	5,241,731,349	(944,775,145)
ITJEN	2,872,675,798	2,872,675,798	0
DJP	98,607,569,987	98,626,769,987	(19,200,000)
DJBC	45,801,771,088	46,235,797,088	(434,026,000)
DJPK	153,297,279	153,297,279	0
DJPB	42,509,043,131	42,729,928,081	(220,884,950)
DJKN	7,316,517,079	7,316,517,079	0
BAPEPAM LK	932,542,296	932,542,296	0
BPPK	5,204,410,272	5,371,579,272	(167,169,000)
<b>Jumlah</b>	<b>207,694,783,134</b>	<b>209,480,838,229</b>	<b>(1,786,055,095)</b>

1. Selisih kurang sebesar Rp944.775.145,00 merupakan *write-off* nilai gedung bangunan GKN Aceh sudah hancur karena tsunami tahun 2004 namun belum terbit SK penghapusan, Aset rusak berat yang hilang pada GKN Denpasar I dan II serta Kantor Pusat Setjen. Dalam neraca berdasarkan SAK, nilai tersebut telah dikeluarkan namun

dalam laporan SIMAK-BMN belum dihapuskan;

2. Selisih kurang sebesar Rp19.200.000,00 merupakan *write-off* 2 unit Sepeda Motor hilang yang belum diterbitkan SK penghapusan yaitu pada Kanwil DJP Jakarta Timur sebesar Rp 8.000.000,00 dan Kanwil DJP Medan sebesar Rp11.200.000,00;
3. Selisih kurang sebesar Rp434.026.000,00 merupakan *write-off* 3 Unit Mobil hilang pada KPPBC Bogor sebesar Rp147.680.000,00, KPPBC Merak sebesar Rp147.966.000,00 dan KPPBC Tangerang sebesar Rp138.380.000,00;
4. Selisih kurang sebesar Rp220.884.950,00 merupakan *write-off* 1 unit sepeda motor hilang pada Kanwil VI DJPB Palembang dan Compaq Disc pada Kanwil DJPB Papua;
5. Selisih kurang sebesar Rp150.569.000,00 merupakan *write-off* aset hilang pada BLU STAN dan Rp16.600.000,00 merupakan aset hilang namun belum terbit SK Penghapusannya.

#### C.2.4.5. Aset Lain-lain BLU

Aset Lain-lain BLU  
Rp70.416.164.384,00

Nilai Aset Lain-lain BLU per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp70.416.164.384,00 dan Rp2.706.287.446,00.

Rincian Aset Lain-lain dapat dilihat pada Tabel 120 berikut.

**Tabel 120**  
**Aset Lain-lain BLU Per Unit Eselon I**  
**Per 31 Desember 2010 dan 2009**  
**(dalam rupiah)**

Kode	Eselon I	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Kenaikan/(Penurunan)	%
015.01	SETJEN	70,416,164,384	0	70,416,164,384	0.00
015.11	BPPK	0	2,706,287,446	(2,706,287,446)	(100.00)
	<b>Jumlah</b>	<b>70,416,164,384</b>	<b>2,706,287,446</b>	<b>67,709,876,938</b>	<b>2,501.95</b>

Aset Lain-lain BLU pada Setjen sebesar Rp70.416.164.384,00 merupakan Aset Lain-lain BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Jumlah tersebut terdiri dari Rp70.000.000.000,00 yang merupakan pokok deposito 1 bulanan yang dananya berasal dari bunga diterima dimuka deposito 12 bulanan Dana Pengembangan Pendidikan (DPPN)/*endowment fund* senilai Rp1.000.000.000.000,00. Senilai Rp416.164.384,00 merupakan bunga diterima dimuka dari deposito 1 bulanan Rp70.000.000.000,00 (diterima 30 Desember 2010). Atas pokok *endowment fund* sebesar Rp1.000.000.000.000,00 tersebut dicatat dalam BA 999.03 oleh DJKN.

Rincian mutasi/perubahan Aset Lain-lain BLU STAN (pada Unit Eselon I BPPK) dapat dilihat pada Tabel 121 berikut.

**Tabel 121**  
**Mutasi/Perubahan Aset Lain-lain BLU STAN**  
**(dalam rupiah)**

<b>Saldo Per 31 Desember 2009</b>	<b>2.706.287.446</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	<b>99.000</b>
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	99.000
<b>Mutasi Kurang</b>	<b>2.706.386.446</b>
Penghapusan	1.868.843.504
Koreksi saldo awal	686.973.942
<i>Write-off</i> Aset hilang	150.569.000
<b>Saldo Per 31 Desember 2010</b>	<b>-</b>

#### C.2.4.6. Dana Kelolaan BLU

Dana Kelolaan BLU per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar **RpNihil** dan **Rp3.315.400.000.000,00**. Dana Kelolaan BLU merupakan dana yang berasal dari BA 999.03 yang dikelola dan digulirkan kepada masyarakat, Badan Usaha dan BLU oleh PIP yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat, PNBP dan tujuan lainnya. Dana Kelolaan BLU per 31 Desember 2010 mencerminkan saldo Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan atau diinvestasikan.

Berdasarkan rekomendasi BPK-RI dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Dana Kelolaan BLU pada Tahun Anggaran 2010 dicatat dalam BA 999.03 serta dilaporkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

**Tabel 122**  
**Dana Kelolaan BLU Per Unit Eselon I**  
**Per 31 Desember 2010 dan 2009**  
**(dalam rupiah)**

Kode	Uraian	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Kenaikan/(Penurunan)	%
015.01	SETJEN	0	3,315,400,000,000	(3,315,400,000,000)	(100.00)

**Tabel 123**  
**Rincian Kewajiban Jangka Pendek**  
**Per 31 Desember 2010 dan 2009**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Kepada Pihak Ketiga	202,520,284,203	47,132,934,883	155,387,349,320	329.68
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	329,105,858,431	294,292,169,306	34,813,689,125	11.83
Pendapatan Diterima di Muka	1,657,970,182	1,803,878,207	(145,908,025)	(8.09)
Uang Muka	4,155,000	0	4,155,000	0.00
Uang Muka dari KPPN	2,249,602,563	4,021,141,586	(1,771,539,023)	(44.06)
Pendapatan yang Ditangguhkan	76,340,422,596	12,001,293,336	64,339,129,260	536.10
<b>Jumlah</b>	<b>611,878,292,975</b>	<b>359,251,417,318</b>	<b>252,626,875,657</b>	<b>70.32</b>

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Per Akun dapat dilihat pada Tabel 125 berikut.

**Tabel 125**  
**Utang Kepada Pihak Ketiga Per Akun**  
**Per 31 Desember 2010**  
**(dalam rupiah)**

No	Uraian	31 Desember 2010
1	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	9,505,713,606
2	Belanja barang yang masih harus dibayar	17,554,464,803
3	Belanja modal yang masih harus dibayar	157,997,610,000
4	Utang Kepada Pihak Ketiga BLU	191,660,142
5	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	17,270,835,652
	<b>Jumlah</b>	<b>202,520,284,203</b>

Utang kepada pihak ketiga pada TA 2010 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan TA 2009 yang disebabkan adanya utang pembelian tanah oleh Biro Umum yang akan jatuh tempo pembayaran tahap ke-2 pada bulan Juni 2011 sebesar Rp157.997.610.000,00.

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Per Akun dapat dilihat pada Tabel 127 berikut.

**Tabel 127**  
**Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Per Akun**  
**Per 31 Desember 2010**  
**(dalam rupiah)**

No	Uraian	31 Desember 2010
1	Utang Kelebihan Bayar Pajak PPh	101,856,020,850
2	Utang Kelebihan Bayar Pajak PPN/PPnBM	223,445,406,708
3	Utang Kelebihan Bayar Bea Masuk	306,168,000
4	Utang Kelebihan Bayar Bea Keluar	3,498,262,873
	<b>Jumlah</b>	<b>329,105,858,431</b>

#### C.2.5.4 Uang Muka

*Uang Muka  
Rp4.155.000,00*

Nilai Uang Muka per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar **Rp4.155.000,00** dan **RpNihil**. Nilai tersebut merupakan uang muka yang berasal dari penarikan kembali kelebihan setoran sisa UP TA 2008 pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan pada TA 2010.

Rincian Uang Muka dapat dilihat pada Tabel 129 berikut.

**Tabel 129**  
**Uang Muka Per Unit Eselon I**  
**Per 31 Desember 2010 dan 2009**  
**(dalam rupiah)**

Kode	Eselon I	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Kenaikan/ (Penurunan)	%
015.08	DJPB	4,155,000	0	4,155,000	0.00

#### C.2.5.5 Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari  
KPPN  
Rp2.249.602.563,00*

Nilai Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar **Rp2.249.602.563,00** dan **Rp4.021.141.586,00**. Nilai tersebut merupakan saldo Uang Persediaan yang ada pada Bendahara Pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan. Uang Muka dari KPPN merupakan akun penyeimbang dari akun Kas di Bendahara Pengeluaran.

Rincian Uang Muka dari KPPN dapat dilihat pada Tabel 130 berikut.

**Tabel 130**  
**Uang Muka dari KPPN Per Unit Eselon I**  
**Per 31 Desember 2010 dan 2009**  
**(dalam rupiah)**

Kode	Eselon I	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Kenaikan/ (Penurunan)	%
015.01	SETJEN	44,294,149	44,268,354	25,795	0.06
015.02	ITJEN	0	117,954	(117,954)	(100.00)
015.03	DJA	0	489,543,584	(489,543,584)	(100.00)
015.04	DJP	1,277,176,465	932,612,895	344,563,570	36.95
015.05	DJBC	413,703,068	707,708,058	(294,004,990)	(41.54)
015.06	DJPK	0	443,996,726	(443,996,726)	(100.00)
015.07	DJPU	0	0	0	0.00
015.08	DJPB	207,216,045	205,436,838	1,779,207	0.87
015.09	DJKN	262,704,258	470,614,265	(207,910,007)	(44.18)
015.10	BAPEPAM LK	0	0	0	0.00
015.11	BPPK	44,508,578	726,842,912	(682,334,334)	(93.88)
015.12	BKF	0	0	0	0.00
<b>Jumlah</b>		<b>2,249,602,563</b>	<b>4,021,141,586</b>	<b>(1,771,539,023)</b>	<b>(44.06)</b>

### C.2.5.6 Pendapatan Yang Ditangguhkan

Pendapatan Yang  
Ditangguhkan  
Rp76.340.422.596,0  
0

Nilai Pendapatan Yang Ditangguhkan per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar **Rp76.340.422.596,00** dan **Rp12.001.293.336,00**. Nilai tersebut merupakan PNBP yang belum disetor ke Kas Negara oleh Bendahara Penerimaan dan pendapatan BLU yang dibatasi penggunaannya yang belum disahkan per 31 Desember 2010. Pendapatan Yang Ditangguhkan merupakan akun penyeimbang dari akun Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya dan Setara Kas, dan Kas BLU yang dibatasi penggunaannya.

Rincian Pendapatan Yang Ditangguhkan dapat dilihat pada Tabel 131 berikut.

**Tabel 131**  
**Pendapatan Yang Ditangguhkan Per Unit Eselon I**  
**Per 31 Desember 2010 dan 2009**  
**(dalam rupiah)**

Kode	Eselon I	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Kenaikan/ (Penurunan)	%
015.01	SETJEN	70,416,164,384	1,022,845	70,415,141,539	6,884,243.61
015.02	ITJEN	316,795,001	0	316,795,001	0.00
015.03	DJA	933,012,949	0	933,012,949	0.00
015.04	DJP	12,649,358	6,546,697	6,102,661	93.22
015.05	DJBC	315,301,741	1,499,676,953	(1,184,375,212)	(78.98)
015.08	DJPB	124,562,722	97,913,377	26,649,345	27.22
015.09	DJKN	3,741,743,312	10,154,213,294	(6,412,469,982)	(63.15)
015.10	BAPEPAM LK	418,436,050	0	418,436,050	0.00
015.11	BPPK	61,727,779	241,920,170	(180,192,391)	(74.48)
015.12	BKF	29,300	0	29,300	0.00
<b>Jumlah</b>		<b>76,340,422,596</b>	<b>12,001,293,336</b>	<b>64,339,129,260</b>	<b>536.10</b>

### C.2.7 Ekuitas Dana Lancar

*Ekuitas Dana*

*Lancar*

*Rp71.846.529.727,45*

*55,00*

Ekuitas Dana Lancar adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara nilai Aset Lancar dengan Kewajiban Jangka Pendek yang terdiri dari :

**Tabel 133**  
**Rincian Ekuitas Dana Lancar**  
**Per 31 Desember 2010 dan 2009**  
**(dalam rupiah)**

Uraian	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Cadangan Piutang	71,010,875,515,466	63,822,802,296,105	7,188,073,219,361	11.26
Cadangan Persediaan	252,720,931,926	185,957,052,688	66,763,879,238	35.90
Dana yang harus disediakan untuk j	(531,332,342,563)	(342,162,149,341)	(189,170,193,222)	55.29
Dana Lancar BLU	1,085,722,227,076	684,555,535,893	401,166,691,183	58.60
Barang/Jasa yang Harus Diterima	30,201,365,732	0	30,201,365,732	0.00
Barang/Jasa yang Harus Diserahkan	(1,657,970,182)	0	(1,657,970,182)	0.00
	<b>71,846,529,727,455</b>	<b>64,351,152,735,345</b>	<b>7,495,376,992,110</b>	<b>11.65</b>

No	Uraian	31 Desember 2010
1	Belanja yang Masih Harus Dibayar	185,057,788,409
2	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	329,105,858,431
3	Pendapatan yang Ditangguhkan	165,040,487
4	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	16,811,995,094
5	Utang Kepada Pihak Ketiga BLU	191,660,142
	<b>Jumlah</b>	<b>531,332,342,563</b>

### C.2.8.3 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

*Diinvestasikan  
Dalam Aset Lainnya  
Rp915.323.045.495,  
00*

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya sebesar [Rp915.323.045.495,00](#) merupakan akun penyeimbang Aset Lainnya.

### C.2.8.4 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang

*Dana yang Harus  
Disediakan Untuk  
Pembayaran Utang  
Jangka Panjang  
(Rp149.937.775.00  
,00)*

Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang sebesar [\(Rp149.937.775.000,00\)](#) merupakan akun penyeimbang Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya.

## C.3 CATATAN PENTING LAINNYA

*Catatan Penting  
Lainnya*

### 1. Aset Rumah Negara

Dari 3.022 unit Bangunan Tempat Tinggal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat 378 unit yang dihuni oleh orang yang tidak berhak. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan upaya-upaya pengamanan baik secara administratif maupun secara hukum. Upaya tersebut antara lain:

- a. Upaya Administratif, yaitu:
  - 1) Penerbitan surat-surat kepada penghuni yang tidak berhak;
  - 2) Penerbitan surat-surat dalam rangka pengamanan aset tanah, yaitu surat dalam rangka melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
  - 3) Telah diusulkan Penetapan Status Golongan Rumah Negara kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan untuk Rumah Negara yang terdapat di Kanwil DJP Banten, Kanwil DJP Jawa Timur I dan Kanwil DJP Kalimantan Timur sebagai Rumah Negara Golongan I.
  - 4) Pembentukan Tim Satuan Tugas Penertiban Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: KEP-83/PJ./2009 tanggal 14 Juli 2009 dimana seluruh Kabag Umum Kanwil DJP terlibat dalam Tim Satuan Tugas tersebut.
  - 5) Pembentukan Tim Penertiban Rumah Negara di lingkungan Kementerian Keuangan Nomor: 534/KM.1/2009 tanggal 5 Des 2009.

#### b. Upaya Hukum, yaitu:

dengan melaporkan 119 (seratus sembilan belas) orang pensiunan penghuni rumah negara kepada Polda Metro Jaya dengan tuduhan telah memasuki pekarangan tanpa ijin yang berhak (Pasal 167 KUHP).

### 2. Aset Tetap berupa Tanah pada Kementerian Keuangan yang belum memiliki sertifikat telah ditindaklanjuti sebagai berikut:

- a) Bapepam LK telah melakukan proses sertifikasi atas tanah di Matraman (Sertifikat Hak Pakai Nomor 378 Tanggal 20 Desember 2010) dan Pejambon (Sertifikat Hak Pakai Nomor 346 Tanggal 9 Agustus 2010).
- b) Setjen Kementerian Keuangan telah melakukan proses sertifikasi atas tanah di Jakarta Timur (Sertifikat Hak Pakai Nomor 54), sedangkan tanah di Jakarta Pusat masih dalam proses.

### 3. PINTAR dan CTF-7

DJP dalam TA 2010 melaksanakan reformasi perpajakan tahap kedua yang juga disebut sebagai PINTAR (*Project for Indonesian Tax Administration Reform*). Dalam hal pendanaan, estimasi total pendanaan PINTAR adalah sebesar kurang lebih USD 146 juta, dimana sekitar 75% atau sebesar USD 110 juta dibiayai oleh pinjaman dari *World Bank*, sedangkan 25% atau USD 36 juta dibiayai oleh APBN. PINTAR merupakan proyek berskala besar yang membutuhkan waktu penyelesaian lebih dari satu tahun sehingga merupakan proyek yang bersifat *multi years*. *Loan agreement* PINTAR ditandatangani pada 9 Februari 2009 dan berlaku efektif (*loan effectiveness*) pada bulan Agustus 2009. *Closing date* dari *loan agreement* PINTAR adalah pada 31 Desember 2015. Dalam DIPA Tahun Anggaran 2010 Direktorat Jenderal Pajak, terdapat alokasi untuk PINTAR sebesar Rp239.550.563.000,00 yang terdiri dari belanja barang sebesar Rp37.125.988.000 dan belanja modal sebesar Rp202.424.575.000,00. Komposisinya terdiri dari pinjaman (*loan*) sebesar Rp217.918.125.000,00 dan Rupiah Murni Pendamping (RMP) sebesar Rp21.632.438.000,00 dengan asumsi penandatanganan kontrak dilakukan pada tahun 2010. Namun untuk TA 2010, alokasi anggaran untuk kegiatan PINTAR seluruhnya tidak dapat terserap dan direalisasikan kegiatan pembangunannya mengingat proses pengadaannya sendiri baru dapat diiklankan pada tanggal 15 September 2010 dan penandatanganan kontrak diperkirakan bulan Juli 2011. Permohonan revisi anggaran PINTAR telah disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.

Selain itu, DJP juga mendapatkan program bantuan dari *World Bank* untuk mendukung tujuan reformasi administrasi perpajakan, berupa *Indonesia: Technical Assistance to Indonesia Tax administration Reform under the Support to Public Financial Management and Revenue Administration Multi Donor Trust Fund Grant No. 093998*. Proyek yang didanai oleh hibah ini ditujukan untuk penyempurnaan sistem administrasi perpajakan guna mendukung PINTAR, peningkatan kapasitas manajemen proyek dan implementasi manajemen perubahan, pengembangan kapasitas intelijen dan penyidikan pajak, serta *knowledge management*. Dalam *grant agreement* CTF-7, jumlah hibah yang diberikan oleh *World Bank* adalah USD 2.343.200. Dalam DIPA Tahun Anggaran 2010 Direktorat Jenderal Pajak, terdapat alokasi untuk belanja jasa konsultan yang didanai oleh hibah sebesar Rp21.744.080.000,00. Namun untuk TA 2010, alokasi anggaran untuk kegiatan yang didanai hibah CTF-7 seluruhnya tidak dapat terserap dan direalisasikan kegiatannya karena proses pengadaan masih berjalan dan kontrak-kontraknya baru akan ditandatangani pada triwulan pertama tahun 2011. Permohonan revisi anggaran kegiatan yang didanai hibah CTF-7 telah disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.

### 4. Sengketa Pajak

Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan,

pembetulan, pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi, pengurangan dan pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan dan pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak. Disamping itu, undang-undang perpajakan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak. Atas putusan banding atau gugatan dari Pengadilan Pajak, masing-masing pihak yang bersengketa baik Direktorat Jenderal Pajak maupun Wajib Pajak masih diberikan hak oleh UU Pengadilan Pajak untuk menempuh upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Keuangan ini, yang dimaksudkan dengan sengketa pajak adalah keseluruhan pengajuan baik melalui permohonan oleh Wajib Pajak maupun jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dapat mempengaruhi nilai ketetapan pajak sebelumnya, meliputi:

a) Keberatan terdiri dari:

- 1) keberatan PPh dan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP);
- 2) keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB);
- 3) keberatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (UU BPHTB).

b) Non Keberatan terdiri dari:

- 1) pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU KUP;
- 2) pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP;
- 3) pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP;
- 4) pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP;
- 5) pembatalan hasil pemeriksaan pajak yang tidak didahului dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan/atau Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP;
- 6) pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang sebagaimana dimaksud Pasal 19 UU PBB;
- 7) pengurangan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 20 dalam UU PBB; dan
- 8) Pengurangan pokok BPHTB yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UU BPHTB.

- c) Banding atau Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- d) Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Jumlah ketetapan pajak yang diajukan keberatan, non keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan), banding, gugatan dan peninjauan kembali dan belum diputuskan per 31 Desember 2010 adalah 22.573 ketetapan dengan nominal ketetapan pajak yang menggunakan satuan mata uang rupiah sebesar Rp52.254.374.247.753,00 dan nominal ketetapan pajak yang menggunakan satuan mata uang valas sebesar USD455.464.773,63. Apabila dinyatakan dalam rupiah seluruhnya, nilai nominal seluruh ketetapan pajak yang diajukan sengketa pajak dan belum diterbitkan keputusan atau putusan per tanggal 31 Desember 2010 adalah Rp56.349.458.027.460,00 dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Ketetapan	Jumlah Ketetapan	Nominal Ketetapan		
		Dalam Rp	Dalam USD	Total Rp
Kurang bayar (SKP KB/SKPGBT/STP/SPPT)	20.283	41.908.467.808.853	259.137.704,93	44.238.374.913.879
Lebih bayar (SKP LB)	1.478	10.345.906.438.900	196.327.068,70	12.111.083.113.582
Nihil (SKP N)	812	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>22.573</b>	<b>52.254.374.247.753</b>	<b>455.464.773,63</b>	<b>56.349.458.027.460</b>

Selanjutnya, tunggakan sengketa pajak berdasarkan jenis sengketa dapat dirinci sebagai berikut:

Jenis Sengketa Pajak	Jumlah Ketetapan	Nominal Ketetapan		
		Dalam Rp	Dalam USD	Total Rp
Keberatan	9.575	26.316.590.734.974	330.431.143,00	29.287.497.141.687
Non Keberatan	7.759	3.035.431.700.313	3.040.556,00	3.062.769.339.309
Banding/Gugatan	3.583	18.127.729.608.285	103.491.157,45	19.058.218.604.918
Peninjauan Kembali	1.656	4.774.622.204.181	18.501.917,18	4.940.972.941.546
<b>Jumlah</b>	<b>22.573</b>	<b>52.254.374.247.753</b>	<b>455.464.773,63</b>	<b>56.349.458.027.460</b>

Tunggakan sengketa pajak berdasarkan jenis pajak dapat disajikan sebagai berikut:

No.	Jenis Pajak	Jumlah Sengketa Pajak			
		Jumlah Ketetapan	Nilai Dalam Rp	Nilai Dalam USD	Total Dalam Rp
1	PPh Pasal 25 OP	504	127.091.395.035	-	127.091.395.035
2	PPh Pasal 25 Badan	3.007	20.713.982.210.088	414.845.173,97	24.443.855.169.288
3	PPh Pasal 21	940	546.573.960.349	-	546.573.960.349
4	PPh Pasal 22	88	433.239.105.469	-	433.239.105.469
5	PPh Pasal 23	1.396	1.976.058.031.882	38.746.438,90	2.324.427.264.032
6	PPh Pasal 26	688	3.576.429.864.003	-	3.576.429.864.003
7	PPh Final (Pasal 4(2), Pasal 15, Pasal 19 dsb)	652	765.776.628.605	-	765.776.628.605
8	PPN	10.865	22.945.727.253.671	56.771,13	22.946.237.682.900
9	PPn BM	81	573.781.893.285	-	573.781.893.285
10	PBB	3.847	220.323.336.297	696.889,11	226.589.066.285
11	BPHTB	185	88.813.190.484	-	88.813.190.484
12	Bunga Penagihan	264	174.246.484.182	1.119.500,52	184.311.913.322
13	Lain-lain	56	112.330.894.404	-	112.330.894.404
	Jumlah	22.573	52.254.374.247.753	455.464.773,63	56.349.458.027.460

Atas sengketa pajak berupa keberatan, dan non keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan) ketetapan pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan keputusan yang dapat mempengaruhi nominal ketetapan pajak semula dengan isi keputusan mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, menambah, membetulkan, mengurangkan, menghapuskan, dan membantalkan. Atas sengketa banding dan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Pajak, Majelis Hakim dapat menerbitkan putusan yang dapat mempengaruhi nominal ketetapan pajak semula dengan amar putusan mengabulkan seluruhnya atau sebagian, membantalkan, menolak, tidak dapat diterima dan membetulkan. Sedangkan, pengajuan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung baik yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun oleh Wajib Pajak akan diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dengan amar putusan menerima atau menolak permohonan pemohon PK.

##### 5. Pengalihan BPHTB dan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan

Hal-hal penting terkait pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), adalah sebagai berikut:

- PBB-P2 dan BPHTB merupakan 2 (dua) jenis Pajak Pusat yang dialihkan ke kabupaten/kota dan menjadi bagian dari 11 (sebelas) jenis Pajak kabupaten/kota yang diamanatkan UU PDRD;
- DJP masih tetap mengelola PBB-P2 sampai dengan 31 Desember 2013, sepanjang belum terbit Peraturan Daerah;

- c. DJP masih tetap mengelola BPHTB untuk tahun 2010, sejak tahun 2011 BPHTB menjadi Pajak Kabupaten/Kota;
- d. Tahapan pengalihan PBB PBB-P2 serta BPHTB diatur bersama oleh Menteri Keuangan dengan Menteri Dalam Negeri;
- e. Secara umum pengaturan PBB-P2 serta BPHTB dalam UU PDRD adalah sama dengan yang diatur dalam UU PBB dan UU BPHTB, kecuali yang terkait dengan tarif pajak, NJOPTKP dan NPOPTKP.

Perbandingan antara UU PBB dengan UU PDRD adalah sebagai berikut:

No	Uraian	UU PBB	UU PDRD
		UU No.12 Tahun 1985 stdtd UU No.12 Tahun 1994	UU No.28 Tahun 2009
1	Cakupan sektor	tidak dikenal sektoral (meliputi sektor Perdesaan, Perkotaan, Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan)	sektor perdesaan dan perkotaan saja
2	Tarif	0,5% ( <i>fixed</i> )	1. Paling tinggi 0,3% 2. Ditetapkan dengan Perda
3	Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)	Menteri Keuangan	Kepala Daerah
4	Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)	20% s.d. 100% (PP No.25 tahun 2002 NJKP 20% dan 40%)	Tidak ada
5	Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJKP)	1. Setinggi-tingginya Rp12.000.000,00 2. Diatur oleh Menteri Keuangan	1. Paling rendah Rp10.000.000,00 2. Ditetapkan dengan Perda
6	Penghitungan PBB	0,5% x (20% atau 40%) x (NJOP - NJOPTKP)	0,3%(maksimal) x (NJOP - NJOPTKP)

Perbandingan UU BPHTB dengan UU PDRD adalah sebagai berikut:

No	Uraian	UU BPHTB	UU PDRD
		UU No.21 Tahun 1997 stdt UU No.20 Tahun 2000	UU No.28 Tahun 2009
1	Tarif	5% ( <i>fixed</i> )	1. Paling tinggi 5% 2. Ditetapkan dengan Perda
2	Dasar Pengenaan	Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)
3	Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	1. <u>Paling banyak</u> Rp300.000.000,00 untuk waris dan hibah wasiat 2. <u>Paling banyak</u> Rp60.000.000 untuk selain waris dan hibah wasiat 3. Ditetapkan Menteri Keuangan	1. <u>Paling rendah</u> Rp300.000.000 untuk waris dan hibah wasiat 2. <u>Paling rendah</u> Rp60.000.000 untuk selain waris dan hibah wasiat 3. Ditetapkan dengan Perda
4	Penghitungan BPHTB	5% dari (NPOP - NPOPTKP)	5%(maksimal) dari (NPOP - NPOPTKP)
5	Penggunaan NJOP	Dalam hal NPOP tidak diketahui atau nilainya lebih rendah daripada NJOP maka NJOP digunakan sebagai NPOP	Dalam hal NPOP tidak diketahui atau nilainya lebih rendah daripada NJOP maka NJOP digunakan sebagai NPOP

Sehubungan dengan tahapan pengalihan PBB-P2, telah disusun Peraturan Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 | Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah. Sebagai tindak lanjut Peraturan Bersama tersebut, DJP telah menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah. Sesuai PER-61/PJ/2010 tersebut, maka pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 hanya dapat dilakukan pada 1 Januari Tahun Pengalihan bagi Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bersama.

Sehubungan dengan tahapan pengalihan BPHTB, telah disusun Peraturan Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 | Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah. Sebagai tindak lanjut Peraturan Bersama tersebut, DJP telah menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah.

Sesuai PER-47/PJ/2010 tersebut kewenangan pemungutan BPHTB dialihkan dari Direktorat Jenderal Pajak ke Pemerintah Daerah mulai tanggal 1 Januari 2011 dengan persiapan pengalihan BPHTB sebagai pajak daerah dilakukan dalam waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2010.

Sehubungan dengan kegiatan pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 dan BPHTB, Kementerian Keuangan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010 telah melakukan Diseminasi dan Asistensi Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB Sebagai Pajak Daerah yang bertempat di Surabaya.

Untuk tahun 2011, baru Pemerintah Kota Surabaya yang akan melakukan pemungutan PBB-P2 maupun BPHTB sesuai dengan persetujuan Menteri Keuangan melalui surat nomor S-642/MK.07/2010 tanggal 19 November 2010, yang memberikan persetujuan bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk melaksanakan pemungutan PBB-P2 mulai tahun 2011 sekaligus ditunjuk sebagai *Pilot Project* Pemungutan PBB-P2.

Mengenai kesiapan Peraturan Daerah (Perda), sesuai data per 31 Desember 2010 daerah yang telah mempersiapkan Perda BPHTB adalah sekitar 268 daerah atau 54,5% dari jumlah total 492 Kabupaten/Kota.

Desain pengalihan PBB-P2 dan BPHTB, secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Pengalihan pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan serta BPHTB ke kabupaten/kota dapat dilakukan setelah :
  - 1) Perda tentang Pelaksanaan PBB-P2 dan BPHTB dari suatu kabupaten/kota telah disetujui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan;
  - 2) Pemerintah kabupaten/kota memberitahukan persetujuan Perda tersebut 4 bulan sebelum awal tahun pajak;
- b. Proses pengalihan PBB-P2 adalah dengan penyerahan aset DJP yang meliputi *copy* aplikasi SISMIOP (*source code* dan dokumen teknis), *copy* basis data SISMIOP tahun terakhir (data OP, WP, dan NJOP), *copy* peta-peta (peta blok dan ZNT), dan data tunggakan selambat-lambatnya 4 bulan sebelum tahun pajak dimulai kepada kabupaten/kota dengan suatu berita acara oleh Kepala KPP Pratama setempat;

- c. Proses pengalihan BPHTB adalah dengan penyerahan data tunggakan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun pajak dimulai kepada kabupaten/kota dengan suatu berita acara oleh KPP Pratama setempat;
- d. Setelah penyerahan aset dan *copy* data ke kabupaten/kota, maka DJP tidak lagi bertanggung jawab atas penggunaan data tersebut oleh kabupaten/kota dan khusus untuk basis data PBB, DJP tetap berhak memanfaatkan data tersebut guna kepentingan perpajakan.

Dalam rangka menjalankan desain dimaksud diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

**a. Masa persiapan (tahun 2010)**

- 1) Melakukan sosialisasi ke seluruh Wajib Pajak dan *stake holder* lainnya seperti Pemda, PPAT, Bank, KPPN dan lain-lain.
- 2) Menyampaikan peraturan, SOP dan bagan organisasi terkait pelaksanaan PBB-P2 dan BPHTB oleh DJP kepada kabupaten/kota guna dijadikan rujukan/model.
- 3) Membentuk Tim IT dan Basis Data yang bertugas menyiapkan aplikasi dan basis data SISMIOP yang akan diserahkan *copy*-nya ke meliputi:
  - a) Menyiapkan Aplikasi SISMIOP serta kelengkapannya (*source code* SISMIOP, dokumentasi sistem SISMIOP, dan *user manual* SISMIOP);
  - b) Menyiapkan basis data SISMIOP meliputi :
    - i. Data objek pajak termasuk NJOP kondisi terakhir;
    - ii. Data subjek pajak kondisi terakhir.
- 4) Menyiapkan Data dokumen Peta Desa, Peta Blok dan Peta ZNT per kabupaten/kota yang terbaru baik berbentuk *hardcopy* maupun *softcopy* untuk siap diserahkan *copy*-nya ke kabupaten/kota guna mendukung basis data SISMIOP;
- 5) Menyampaikan konsep Surat Edaran Dirjen Pajak tentang:
  - a) Materi dan tatacara sosialisasi pengalihan PBB-P2 dan BPHTB ke kabupaten/kota;
  - b) Tatacara pelayanan, batas waktu penyampaian permohonan dan jangka waktu penyelesaian pelayanan PBB-P2 dan BPHTB pada masa transisi;
  - c) Langkah-langkah pemeliharaan basis data PBB-P2 kepada KPP Pratama antara lain : kelengkapan dokumentasi, kelengkapan kertas kerja penentuan NJOP, pemutakhiran data dan lain-lain yang diawasi dan dikoordinir oleh Kepala Kanwil setempat;
  - d) Kebijakan stabilitas NJOP dalam rangka mengantisipasi pengalihan PBB-P2 dan BPHTB ke kabupaten/kota;
  - e) Pengaturan penyelesaian berkas pengurangan, keberatan dan banding pada masa transisi dan pada masa setelah PBB-P2 dan BPHTB dialihkan ke kabupaten/kota;
  - f) Evaluasi dan penegasan pelaksanaan SE-84/PJ/2008 tentang Pemutakhiran Data Pembayaran PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan;
  - g) Tatacara penyampaian usulan penghapusan tunggakan PBB-P2 dan BPHTB;
  - h) Tatacara dan SOP penyampaian basis data, aplikasi SISMIOP dan tunggakan PBB-P2 dan BPHTB ke kabupaten/kota;

- 6) Menginventarisasi tuggakan PBB-P2 dan BPHTB untuk siap dialihkan ke kabupaten/kota dengan berita acara;
- 7) Menginventarisasi infrastruktur yang dapat dialihkan secara hibah;
- 8) Membuat analisis sebaran SDM di DJP untuk mengelola PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan yang masih dikelola oleh DJP;
- 9) Membuat analisis penyesuaian unit organisasi DJP pada tingkat Kanwil yang akan melaksanakan fungsi pengelolaan PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan;

**b. Masa pengalihan**

- 1) Kanwil DJP dan KPP berkoordinasi dengan kabupaten/kota;
- 2) Pelaksanaan Berita Acara Penyerahan Basis Data, Peta, Aplikasi SISMIOP dan Tuggakan PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- 3) Serah terima selambat-lambatnya 2 Bulan sebelum tahun pajak dimulai;

**c. Masa pasca pengalihan**

DJP selama satu tahun dapat memberikan asistensi kepada kabupaten/kota terkait pelaksanaan PBB-P2 dan BPHTB apabila diminta oleh kabupaten/kota.

**d. Pengalihan Piutang Pajak PBB dan BPHTB**

1. Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010, kewenangan pemungutan BPHTB dialihkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah mulai tanggal 1 Januari 2011. Sebagai bagian persiapan pengalihan tersebut, telah diterbitkan serangkaian ketentuan sebagai berikut:

- a) Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan 53 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah;
- b) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah;
- c) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 108/PJ/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Tindak Lanjut Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ke Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dengan mengacu kepada ketentuan di atas, piutang BPHTB per 31 Desember 2010 tetap dilaporkan di Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan akan menjadi piutang pajak di Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sejak Berita Acara Serah Terima ditandatangani antara KPP Pratama dan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

Dari saldo piutang BPHTB per 31 Desember 2010 sebesar Rp101.220.473.265,00 sebagaimana yang tercantum dalam neraca Direktorat Jenderal Pajak, telah dialihkan oleh KPP Pratama ke Pemerintah kabupaten/Kota sebesar Rp93.012.053.871,00. Rincian atas nilai piutang BPHTB yang dialihkan ke pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

NO	KANWIL DJP	NILAI PIUTANG BPHTB YANG DIALIHKAN (Rp)
1	Kanwil DJP NAD	1.703.282
2	Kanwil DJP Sumut I	1.650.330.563
3	Kanwil DJP Sumut II	175.254.998
4	Kanwil DJP Riau dan Kep. Riau	9.090.463.489
5	Kanwil DJP Sumbar dan Jambi	820.512.777
6	Kanwil DJP Sumsel & Kep. Babel	4.923.497.441
7	Kanwil DJP Bengkulu & Lampung	365.191.740
8	Kanwil DJP Jakarta Pusat	10.384.997
9	Kanwil DJP Jakarta Barat	2.827.055.057
10	Kanwil DJP Jakarta Selatan	848.184.510
11	Kanwil DJP Jakarta Timur	8.310.623.339
12	Kanwil DJP Jakarta Utara	1.638.028.486
13	Kanwil DJP Jakarta Khusus	-
14	Kanwil DJP Banten	1.272.429.856
15	Kanwil DJP Jawa Barat I	7.244.653.898
16	Kanwil DJP Jawa Barat II	3.614.173.530
17	Kanwil DJP Jawa Bag. Tengah I	6.207.451.766
18	Kanwil DJP Jawa Bag. Tengah II	2.514.932.796
19	Kanwil DJP DI Yogyakarta	-
20	Kanwil DJP Jawa Timur I	2.534.580.911
21	Kanwil DJP Jawa Timur II	1.197.136.038
22	Kanwil DJP Jawa Timur III	2.410.098.141
23	Kanwil DJP Kalbar	15.966.222.889
24	Kanwil DJP Kalsel & Kalteng	2.859.916.667
25	Kanwil DJP Kaltim	12.341.661.725
26	Kanwil DJP Sulsel, Barat, dan Tenggara	651.682.060
27	Kanwil DJP Sulut, Tengah, dan Gorontalo	279.878.192
28	Kanwil DJP Bali	972.532.217
29	Kanwil DJP Nusa Tenggara	2.283.472.506
30	Kanwil DJP Maluku dan Papua	-
31	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	-
	<b>Jumlah</b>	<b>93.012.053.871</b>

2. Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah  
 Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010, kewenangan pemungutan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan dialihkan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 31 Desember 2013.

Sebagai bagian persiapan pengalihan tersebut, telah diterbitkan serangkaian ketentuan sebagai berikut:

- Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan 58 Tahun 2010 tanggal 30 November 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah;
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah;

Dengan mengacu kepada ketentuan di atas, piutang PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan per 31 Desember 2010 tetap dilaporkan di Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan akan menjadi piutang pajak di Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sejak Berita Acara Serah Terima ditandatangani antara KPP Pratama dan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

Dari saldo piutang PBB per 31 Desember 2010 Sektor Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp1.617.432.555.900,00 dan Rp9.391.433.663.661,00 sebagaimana yang tercantum dalam neraca Direktorat Jenderal Pajak, telah dialihkan oleh KPP Pratama ke Pemerintah kabupaten/Kota sebesar Rp619.519.003.081,00. Rincian atas nilai piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan yang dialihkan ke pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

NO	KANWIL DJP	KPP	BERITA ACARA PENGALIHAN PBB		NILAI PIUTANG PBB P2 YANG DIALIHKAN
			NOMOR	TANGGAL	
1	JATIM I	KPP MADYA SURABAYA	-	-	-
2	JATIM I	KPP PRATAMA SBY SUKOMANUNGGAL	BA-12/WPJ.11/KP.01/2011	14-01-2011	146.121.706.871
3	JATIM I	KPP PRATAMA SBY KREMBANGAN	BA-42/WPJ.11/KP.0201/2011	14-01-2011	15.416.160.000
4	JATIM I	KPP PRATAMA SBY GUBENG	BA-04/WPJ.11/KP.04/2011	21-01-2011	73.079.350.000
5	JATIM I	KPP PRATAMA SBY TEGALSARI	BA-04/WPJ.11/KP.0501/2011	14-01-2011	15.511.255.775
6	JATIM I	KPP PRATAMA SBY WONOCOLO	BA-03/WPJ.11/KP.07/2011	14-01-2011	59.334.972.590
7	JATIM I	KPP PRATAMA SBY GENTENG	BA-03/WPJ.11/KP.09/2011	14-01-2011	14.232.153.134
8	JATIM I	KPP PRATAMA SBY PABEAN CANTIKAN	BA-05/WPJ.11/KP.03/2011	14-01-2011	11.389.989.441
9	JATIM I	KPP PRATAMA SBY SAWAHAN	BA-03/WPJ.11/KP.06/2011	14-01-2011	42.979.818.000
10	JATIM I	KPP PRATAMA SBY RUNGKUT	BA-02/WPJ.11/KP.08/2011	14-01-2011	67.851.398.000
11	JATIM I	KPP PRATAMA SBY SIMOKERTO	BA-03/WPJ.11/KP.1004/2011	14-01-2011	17.400.283.000
12	JATIM I	KPP PRATAMA KARANGPILANG	BA-03A/WPJ.11/KP.13/2011	14-01-2011	81.369.451.362
13	JATIM I	KPP PRATAMA MULYOREJO	BA-10/WPJ.11/KP.12/2011	14-01-2011	74.832.464.908
<b>JUMLAH</b>					<b>619.519.003.081</b>

### 3. Pengalihan Tunggakan Sengketa Pajak atas PBB dan BPHTB

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diatur antara lain:

- Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.
- Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan oleh Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, sepanjang belum ada Peraturan Daerah tentang PBB yang terkait dengan Perdesaan dan perkotaan.

#### 3.1. Informasi Sengketa Pajak atas BPHTB

Berkaitan dengan pengalihan BPHTB yang mulai berlaku 1 Januari 2011, dapat diinformasikan bahwa tunggakan atas sengketa pajak yang berkaitan dengan BPHTB yang belum mendapatkan atas keputusan atau putusan per 31 Desember 2010 sebagai berikut:

Jenis Sengketa Pajak	Jumlah Ketetapan	Nominal Ketetapan		
		Dalam Rp	Dalam USD	Total Rp
Keberatan	44	17,100,436,572	-	17.100.436.572
Non Keberatan	117	4,809,793,028	-	4.809.793.028
Banding/Gugatan	17	42,162,076,522	-	42.162.076.522
Peninjauan Kembali	7	24,740,884,362	-	24.740.884.362
<b>Jumlah</b>	<b>185</b>	<b>88,813,190,484</b>	<b>-</b>	<b>88.813.190.484</b>

Tunggakan atas keberatan dan non keberatan atas BPHTB per 31 Desember 2010 yang masih tersisa sebanyak 161 berkas dengan nilai Rp21.910.229.600,00 merupakan tunggakan yang pada awalnya menjadi wewenang penyelesaian Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Wilayah DJP.

Tunggakan Banding/Gugatan merupakan surat permohonan banding/gugatan atas BPHTB oleh Wajib Pajak ke Pengadilan Pajak yang telah dikirimkan pemberitahuannya melalui permintaan Surat Uraian Banding (SUB) oleh Pengadilan Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak Terbanding/Tergugat dan belum diterima putusannya per 31 Desember 2010. Direktorat Keberatan dan Banding mewakili Direktorat Jenderal Pajak dalam menghadiri sidang banding/gugatan.

Tunggakan Peninjauan Kembali adalah surat memori Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atas BPHTB yang telah diajukan baik oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun oleh Wajib Pajak dan belum diterima putusannya per 31 Desember 2010. Sesuai peraturan yang berlaku, proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung tidak memerlukan kehadiran sidang baik dari Direktorat Jenderal Pajak maupun Wajib Pajak.

### 3.2. Informasi Sengketa Pajak atas PBB

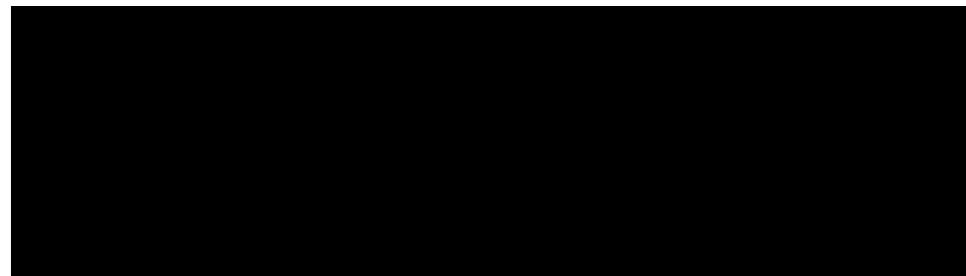
Berkenaan dengan pengalihan PBB, diinformasikan bahwa terdapat satu pemerintah daerah yang sudah siap melakukan pengalihan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan mulai 1 Januari 2011 yaitu Pemerintah Kota Surabaya. Tunggakan sengketa pajak yang berkaitan dengan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan untuk Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I yang wilayah kerjanya meliputi Pemerintah Kota Surabaya sebagai berikut:

Jenis Sengketa Pajak	Jumlah Ketetapan	Nominal Ketetapan		
		Dalam Rp	Dalam USD	Total Rp
Keberatan			-	-
Non Keberatan	84	231.717.941		231.717.941
Banding/Gugatan	1	847.597.490	-	847.597.490
Peninjauan Kembali				
<b>Jumlah</b>	<b>85</b>	<b>1.079.315.431</b>	<b>-</b>	<b>1.079.315.431</b>

### 6. Pungutan Ekspor/Bea Keluar

Terhitung tanggal 1 Januari 2009 seluruh urusan Pungutan Ekspor yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) telah diserahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Penyerahan keseluruhan berkas dilakukan pada tanggal 20 Februari 2009 bertempat di Gedung Radius Prawiro Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin No. 1 Jakarta dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Nomor: 01/AG/2009. Atas serah terima pengurusan PE tersebut, DJBC telah membentuk Tim Penyelesaian Pungutan Ekspor sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: 09/BC/2009 Tanggal 6 April 2009. Tim PE telah melakukan verifikasi berkas yang hasilnya terdapat ketidaktepatan klasifikasi berkas dan belum jelasnya posisi piutang PE yang telah dilimpahkan penagihannya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Mutasi akun pungutan ekspor selama Tahun 2010 secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:



Saldo Piutang per 31 Desember 2010 mengalami penurunan karena adanya koreksi, pembayaran dan pelimpahan penagihannya kepada KPKNL sehingga direklasifikasi dari aset lancar menjadi aset lain-lain.

Pada tanggal 28 Juni 2010 telah dilakukan penyerahan berkas pengembalian yang belum selesai diproses oleh Tim pungutan Ekspor sampai dengan berakhirnya jangka waktu masa tugas Tim Pungutan Ekspor. Atas penyerahan tersebut maka pencatatan akun pungutan ekspor baik piutang, aset lain-lain dan kewajiban masih dibukukan oleh Kantor Pusat DJBC. Berkas pengembalian Non SK Menteri Keuangan yang disetujui oleh KPPBC pada semester II tahun 2010 dibukukan oleh KPPBC yang bersangkutan sedangkan realisasi pengembalian atas berkas SK Menkeu dan Non SK yang telah disetujui oleh Tim pungutan Ekspor dicatat oleh Kantor Pusat DJBC sebagai pengurang akun kewajiban.

7. Pengelolaan Barang Hasil Tegahan, Sitaan/Rampasan, Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.04/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.04/2009, kriteria dari Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara dan Barang Yang Menjadi Milik Negara adalah sebagai berikut:

Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai adalah:

- a. Barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Sementara yang berada di dalam area pelabuhan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penimbunannya;
- b. Barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Sementara yang berada di luar area pelabuhan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak penimbunannya;
- c. Barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat yang telah dicabut izinnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pencabutan izin; atau Barang yang dikirim melalui Pos :
  - 1) Yang ditolak oleh si alamat atau orang yang dituju dan tidak dapat dikirim kembali kepada pengirim di luar Daerah Pabean;
  - 2) Dengan tujuan luar Daerah Pabean yang diterima kembali karena ditolak atau tidak dapat disampaikan kepada alamat yang dituju dan tidak diselesaikan oleh pengirim dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Pemberitahuan dari Kantor Pos.

Barang yang Dikuasai Negara adalah:

- a. Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau dieksport yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam Pemberitahuan Pabean;
- b. Barang dan/atau sarana pengangkut yang dicegah oleh Pejabat Bea dan Cukai; atau
- c. Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak dikenal.

Barang yang Menjadi Milik Negara adalah:

- a. Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai yang merupakan barang yang dilarang untuk dieksport atau diimpor, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai yang merupakan barang yang dibatasi untuk diekspor atau diimpor, yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean;
- c. Barang dan/atau sarana pengangkut yang dicegah oleh Pejabat Bea dan Cukai yang berasal dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal;
- d. Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak dikenal yang tidak diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean;
- e. Barang yang Dikuasai Negara yang merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor; atau
- f. Barang dan/atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dinyatakan dirampas untuk negara.

Atas barang yang menjadi milik negara yang dinilai dan dicatat dalam laporan keuangan sebagai persediaan adalah barang yang telah memiliki status akan dilelang dan sudah mendapat keputusan dari Menteri Keuangan. Sedangkan barang yang berstatus dihibahkan, dimusnahkan dan barang yang belum ada peruntukannya hanya diungkapkan di Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai lampiran. Hal ini karena barang-barang tersebut berada dibawah pengawasan Kantor Bea dan Cukai, tetapi belum ada keputusan dari Menteri Keuangan tentang peruntukannya.

8. Hibah Barang dari *Asian Development Bank* (ADB)

ADB menghibahkan barang berupa Note Book, Scanner, Printer, Switch Hub, Voice Recorder, *Copyboard* dan *Voice conference* kepada Bapepam-LK sesuai dengan *Certificate of Disposal/Turnover Of TA Equipment TA 4715-INO : Secondary Mortgage Facility* tertanggal 2 November 2009. Semua barang tersebut telah diterima oleh Bapepam-LK, tetapi pihak ADB sendiri belum menandatangani surat penyerahan barang dimaksud. Surat tersebut baru ditandatangani oleh PT Sarana Multigriya Finansial dan Bapepam dan LK, dan selanjutnya dikirim ke pihak ADB untuk dimintakan tanda tangan. Oleh karena itu pihak Bapepam-LK belum mencatat barang tersebut dalam SIMAK BMN Bapepam-LK.

9. Barang Milik Negara (BMN) yang belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) pada Kementerian Keuangan telah ditindaklanjuti dengan *progress* per 31 Desember 2010 sebagai berikut:

- a) BMN yang belum dilakukan IP pada Biro Umum Setjen Kemenkeu telah dilaksanakan penilaiannya sebesar Rp137 miliar sesuai dengan BA IP Nomor: 67/KN.3P/2010 tanggal 31 Desember 2010 (BA IP terlampir). Sedangkan terhadap sisa sebesar Rp59 miliar masih dalam proses identifikasi.
- b) BMN yang belum dilakukan IP pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) telah selesai dilaksanakan sesuai dengan BA IP Nomor: 66/KN.3P/2010 tanggal 31 Desember 2010 (BA IP terlampir).
- c) BMN yang belum dilakukan IP pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah diselesaikan penilaiannya sebesar Rp182 miliar sesuai dengan BA IP Nomor: 08/WKN.07/KNL.04.02/2010 tanggal 23 Maret 2010 (BA IP terlampir). Sedangkan terhadap sisa sebesar Rp13 miliar masih dalam proses identifikasi.

## D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

### D.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Daftar temuan dan tindak lanjut temuan BPK-RI terlampir.

### D.2. Rekening Pemerintah

Jumlah rekening pemerintah lingkup Kementerian Keuangan yang terdata hingga 31 Desember 2010 adalah 5.868 rekening dengan rincian 5.861 rekening senilai Rp1.509.114.562.656,66 dan 7 rekening senilai US\$1.028.684,77. Perkembangan rekening pemerintah lingkup Kementerian Keuangan dapat dilihat pada Tabel 134 berikut.

**Tabel 134**  
**Rekening Pemerintah Lingkup Kementerian Keuangan**  
**per 31 Desember 2010 dan 2009**

No.	Pengelompokan Rekening	per 31 Desember 2010				per 31 Desember 2009			
		Rek.	Rupiah	Rek.	Dolar	Rek.	Rupiah	Rek.	Dolar
<i>I. Dipertahankan</i>									
1.	Rek. Bend. Penerimaan	8	25.962.176.057,81	0	0,00	15	15.621.781.074,25	0	0,00
2.	Rek. Bend. Pengeluaran	1.496	1.624.332.352,30	0	0,00	1.613	3.379.518.460,72	0	0,00
3.	Rek. Penampungan Dana Dukungan Pelayanan Khusus yang Bersifat Permanen (Diusulkan menjadi BLU)	2	17.625.910.731,64	0	0,00	2	315.036.531.628,45	0	0,00
4.	Rek. Penampungan Dana Jaminan Pihak Ketiga	50	148.900.021.380,32	0	0,00	53	161.275.342.550,77	0	0,00
5.	Rek. Penampungan Dana Titipan	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Rek. Penampungan Hibah dan Kerjasama Terikat	0	0,00	2	3,26	1	972.000,00	2	23.563,36
7.	Rek. Penerimaan Non DIPA	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
8.	Rek. Aktif Lainnya	2.107	693.590.880.538,73	4	1.028.681,51	2.106	775.464.021.392,86	3	1.089.189,41
<b>Sub Total</b>		<b>3.663</b>	<b>887.703.321.060,80</b>	<b>6</b>	<b>1.028.684,77</b>	<b>3.790</b>	<b>1.270.778.167.107,05</b>	<b>5</b>	<b>1.112.752,77</b>
<i>II. Ditutup</i>									
1.	Ditutup setor ke Kas Negara	1.375	562.211.801.805,82	1	0,00	1.082	391.692.406.565,16	0	0,00
2.	Ditutup setor ke Non Kas Negara	314	18.746.180.248,11	0	0,00	313	18.746.180.248,11	0	0,00
3.	Ditutup digabung ke rekening pemerintah lainnya	185	1.944.156.528,16	0	0,00	124	1.645.475.486,16	0	0,00
4.	Ditutup setor ke Kas Negara dan Non Kas Negara	4	2.190,29	0	0,00	4	2.190,29	0	0,00
<b>Sub Total</b>		<b>1.878</b>	<b>582.902.140.772,38</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523</b>	<b>412.084.064.489,72</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1.	Penutupan yang belum/tidak dilaksanakan	320	38.509.100.823,48			324	38.514.605.665,48		
2.	Tidak jelas identitas pemilik rekening	0	0			0	0		
3.	Pembahasan deadlock (dokumen/informasi tidak lengkap)	0	0			0	0		
<b>Sub Total</b>		<b>320</b>	<b>38.509.100.823,48</b>			<b>324</b>	<b>38.514.605.665,48</b>		
<b>Total</b>		<b>5.861</b>	<b>1.509.114.562.656,66</b>	<b>7</b>	<b>1.028.684,77</b>	<b>5.637</b>	<b>1.721.376.837.262,25</b>	<b>5</b>	<b>1.112.752,77</b>

Rincian mutasi rekening Kementerian Keuangan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2010 Audited.

Daftar rekening pemerintah lingkup Kementerian Keuangan terlampir.

### D.3 Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul. Informasi pendapatan dan belanja secara akrual tingkat pemerintah pusat merupakan suplemen yang dilampirkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahunan, secara berjenjang dari mulai UAKPA sampai dengan UAPA, dimulai dari Laporan Keuangan Tahunan TA 2009.

Transaksi pendapatan secara akrual terdiri dari:

1. Pendapatan yang masih harus diterima (disajikan sebagai penambah pada informasi pendapatan secara akrual dan sebagai piutang di neraca); dan/atau
2. Pendapatan diterima dimuka (disajikan sebagai pengurang pada informasi pendapatan secara akrual dan sebagai kewajiban jangka pendek pada neraca).

Sedangkan transaksi belanja secara akrual meliputi:

1. Belanja yang masih harus dibayar (disajikan sebagai penambah pada informasi belanja secara akrual dan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca); dan/atau
2. Belanja dibayar dimuka (disajikan sebagai pengurang pada informasi belanja secara akrual dan sebagai piutang pada neraca).

Pendapatan dan belanja secara akrual tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 135 berikut.

**Tabel 135**  
**Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual**  
**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2010**  
**(dalam Rupiah)**

Uraian	Realisasi Menurut Basis Kas (Rp)	Penyesuaian Akrual Tambah (Rp)	Penyesuaian Akrual Kurang (Rp)	Realisasi Menurut Basis Akrual (Rp)
Penerimaan Perpajakan	743.789.417.246.043	24.884.713.563.758	20.582.261.551.575	748.091.869.258.227
Penerimaan Negara Bukan Pajak	981.178.407.030	104.032.657.988	56.804.582.790	1.028.406.482.228
<b>Total Penerimaan</b>	<b>744.770.595.653.073</b>	<b>24.988.746.221.746</b>	<b>20.639.066.134.365</b>	<b>749.120.275.740.455</b>
Belanja Pegawai	7.177.471.131.477	9.462.600.836	3.002.787.190	7.183.930.945.123
Belanja Barang	3.927.062.875.502	23.421.917.328	49.563.632.786	3.900.921.160.044
Belanja Modal	1.849.742.247.097	214.708.959	646.225.992	1.849.310.730.064
Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	1.321.487.211.977	16.913.527.963	135.254.163	1.338.265.485.777
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>14.275.763.466.053</b>	<b>50.012.755.086</b>	<b>53.347.900.131</b>	<b>14.272.428.321.008</b>

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi pendapatan TA 2010 menurut basis kas adalah sebesar Rp744.770.595.653.073,00, terdapat penyesuaian akrual tambah sebesar Rp24.988.746.221.746,00 dan penyesuaian akrual kurang sebesar Rp20.639.066.134.365,00. Berdasarkan mutasi penyesuaian tersebut maka realisasi pendapatan TA 2010 secara akrual adalah sebesar Rp749.120.275.740.455,00.
2. Realisasi belanja TA 2010 menurut basis kas adalah sebesar Rp14.275.763.466.053,00 terdapat penyesuaian akrual tambah sebesar Rp50.012.755.086,00 dan penyesuaian akrual kurang sebesar Rp 53.347.900.131,00. Berdasarkan mutasi penyesuaian tersebut maka realisasi belanja TA 2010 secara akrual adalah sebesar Rp14.272.428.321.008,00.

Daftar Informasi pendapatan dan belanja secara akrual terlampir.

**D.4. Barang Tegahan**

Daftar Barang Tegahan DJBC lingkup Kementerian Keuangan terlampir.

**D.5. Barang Sitaan**

Daftar Barang Sitaan DJP lingkup Kementerian Keuangan terlampir.